



SMALL STEPS FOR **BETTER PERFORMANCE**



Daftar Isi

Pendahuluan	4
Pesan Menteri BUMN	7
Sekilas Kementerian BUMN	8
Amanat Konstitusi	10
Sejarah Singkat Kementerian BUMN	11
Struktur Organisasi dan Profil Pejabat Kementerian BUMN	14
Milestones	20
Portofolio BUMN	22
Akuntabilitas Kinerja	28
Kerangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	30
Perencanaan Kinerja dan Evaluasi Kinerja 2017	34
Peningkatan Nilai dan Kontribusi BUMN	60
Holding BUMN	62
Restrukturisasi BUMN	63
<i>Financial Performance</i>	64
Kontribusi BUMN	65
BUMN Hadir Untuk Negeri	66
Program Strategis Nasional	68
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	72
Transformasi Institusi	76
Organisasi	78
Budaya	79
Kapabilitas	79
Penutup	80
Lampiran	82
Data Capaian Renstra 2012 - 2014	82
Data Capaian Renstra 2015 - 2016	82
Perjanjian Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2017	84
Pernyataan Telah Direviu	88
Profil BUMN	90

Pendahuluan

Indonesia memainkan peran yang semakin besar di perekonomian global. Saat ini Indonesia menempati urutan ekonomi ke-17 terbesar di dunia. Keterlibatan Indonesia pun sangat diharapkan dalam berbagai forum global dan regional seperti ASEAN, APEC, G-20, dan berbagai kerjasama bilateral lainnya. Di sisi lain, tantangan ke depan pembangunan ekonomi Indonesia tidaklah mudah untuk diselesaikan. Dinamika ekonomi domestik dan global mengharuskan Indonesia senantiasa siap terhadap perubahan. Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Sepanjang sejarah kemerdekaan selama lebih dari tujuh dasawarsa, BUMN telah menjadi penopang pemerintah untuk mewujudkan beragam kemajuan di bidang pembangunan ekonomi di Indonesia. Kementerian BUMN sebagai institusi yang memiliki tugas merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan BUMN, memiliki peran yang sangat menentukan bagi perkembangan BUMN secara umum. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Kementerian BUMN harus dapat mendukung pengelolaan BUMN sehingga mampu menciptakan BUMN yang sehat dan berdaya saing tinggi. Hal ini sangat penting agar BUMN siap dan mampu bersaing dengan swasta tidak hanya di tingkat nasional akan tetapi di tingkat regional dan internasional.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2017 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian BUMN pada tahun anggaran 2017. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian BUMN ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Kementerian BUMN sebagai institusi yang memiliki tugas merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan BUMN, memiliki peran yang sangat menentukan bagi perkembangan BUMN secara umum. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Kementerian BUMN harus dapat mendukung pengelolaan BUMN sehingga mampu menciptakan BUMN yang sehat dan berdaya saing tinggi. Hal ini sangat penting agar BUMN siap dan mampu bersaing dengan swasta tidak hanya di tingkat nasional akan tetapi di tingkat regional dan internasional.

Agar setiap kebijakan yang ditetapkan benar-benar diarahkan untuk mencapai maksud dan tujuan pendirian BUMN tersebut di atas, dibentuk Kementerian BUMN untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi pendirian BUMN dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, yang kemudian berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

Alat ukur yang dipergunakan sebagai implementasi Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tersebut adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pada setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terdiri laporan kinerja interim (triwulanan) dan laporan kinerja tahunan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah juga mengatur bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja.



Rini M. Soemarno
Menteri Badan Usaha Milik Negara

Pesan Menteri BUMN

Yang kami hormati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Bersama ini kami sajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kementerian BUMN Tahun 2017, serta laporan kinerja pencapaian visi dan misi Kementerian BUMN dalam periode Tahun 2017. Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2017 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan mandat yang diberikan.

Selain itu, LKIP Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2017 ini juga diharapkan dapat menjadi gambaran tentang berbagai capaian kinerja di tahun 2017, baik makro maupun mikro serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan di Kementerian BUMN.

Dasar keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sendiri ialah Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Dalam melaksanakan tugas konstitusional tersebut, Negara melakukan penguasaan atas seluruh kekuatan ekonomi melalui regulasi sektoral yang merupakan kewenangan Menteri Teknis dan kepemilikan Negara pada unit-unit usaha milik negara yang menjadi kewenangan Menteri BUMN.

Sebagaimana arahan Presiden yang disampaikan dihadapan Direktur Utama seluruh BUMN, pada hari Rabu, 21 Oktober 2015 yakni “***Saya ingin BUMN kita menuju BUMN yang besar, BUMN yang lincah, BUMN yang kuat***”. Beliau berharap tugas dan fungsi BUMN tidak hanya diarahkan untuk mendapat keuntungan, tetapi juga kontribusi dan peran aktif menghasilkan *multiplier effect* bagi akidah-akidah perubahan pembangun, akidah-akidah kecepatan membangun, dan memacu agar pembangunan dapat segera diselesaikan.

Berbekal arahan tersebut Kementerian BUMN menyusun Renstra Kementerian BUMN dan *Roadmap* BUMN, sehingga semua BUMN mempunyai mimpi yang sama dan diharapkan menjadi sebuah lokomotif penggerak pembangunan di Indonesia. Renstra tersebut kemudian dijabarkan per tahun menjadi target-target tahunan untuk kemudian direalisasikan oleh Kementerian BUMN.

Seluruh kebijakan yang ditempuh selama tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dan *Roadmap* BUMN, yang dalam sistem pengelolaan kinerja Kementerian BUMN ditetapkan dalam 11 Sasaran Strategis dengan 34 Indikator Kinerja Utama dengan pendekatan 4 perspektif dalam metode *Balanced Scorecard*. Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2017 menggambarkan capaian kinerja tahun 2017 yang diperbandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, beserta analisisnya. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tahun 2017, akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja tahun 2018. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk peningkatan kinerja Kementerian BUMN dalam rangka mewujudkan BUMN sebagai *agent of development* yang besar, kuat dan lincah.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran, program dan kegiatan Kementerian BUMN dapat mencapai kemajuan yang cukup besar. Hal ini menjadi modal dasar untuk lebih mengembangkan program dan kegiatannya di masa datang, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Sangat disadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun diharapkan masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dicapai Kementerian BUMN. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun.



Rini M. Soemarno
Menteri Badan Usaha Milik Negara

Sekilas Kementerian BUMN

hal.
10 Amanat Konstitusi

hal.
11 Sejarah Singkat
Kementerian BUMN

hal.
14 Struktur Organisasi
dan Profil Pejabat
Kementerian BUMN

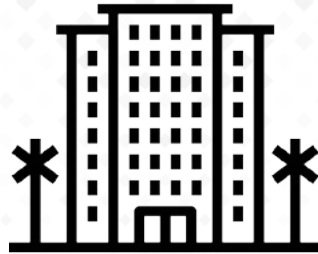
hal.
20 Milestones

hal.
22 Portofolio BUMN





Amanat Konstitusi



Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 33 ayat 2 menyatakan bahwa *“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”*. Dalam melaksanakan tugas konstitusional tersebut, Negara melakukan penguasaan atas seluruh kekuatan ekonomi melalui regulasi sektoral yang merupakan kewenangan Menteri Teknis dan kepemilikan Negara pada unit-unit usaha milik negara yang menjadi kewenangan Menteri BUMN.

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 2, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya
2. Mengejar keuntungan
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Sejarah Singkat Kementerian BUMN



Dalam perjalanannya melaksanakan pembinaan terhadap Perusahaan Negara atau Badan Usaha Milik Negara di Republik Indonesia, Kementerian BUMN telah mengalami beberapa kali transformasi organisasi.

Unit Kerja Departemen Keuangan

Organisasi Pemerintah yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) melaksanakan pembinaan terhadap Perusahaan Negara/Badan Usaha Milik Negara di Republik Indonesia telah ada sejak tahun 1973. Awalnya, organisasi ini merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan.

Unit Eselon II

Dalam periode 1973 sampai dengan 1993, unit yang menangani pembinaan BUMN berada pada unit setingkat Eselon II. Unit organisasi itu disebut Direktorat Persero dan PKPN (Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara). Selanjutnya, terjadi perubahan nama menjadi Direktorat Persero dan BUN (Badan Usaha Negara). Kemudian organisasi ini berubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sampai dengan tahun 1993.

Unit Eselon I

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Negara, dalam periode 1993 sampai dengan 1998, organisasi yang awalnya hanya setingkat Direktorat/Eselon II, ditingkatkan menjadi setaraf Direktorat Jenderal/Eselon I, dengan nama Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJ-PBUN). Dalam kurun waktu 1993-1998 tercatat 2 (dua) orang Direktur Jenderal Pembinaan BUMN, yakni Bapak Martiono Hadianoto dan Bapak Bacelius Ruru.

Kementerian

Mengingat peran, fungsi dan kontribusi BUMN terhadap keuangan negara sangat signifikan, maka sejak tahun 1998, pemerintah Republik Indonesia mengubah bentuk organisasi pembina dan pengelola BUMN menjadi setingkat Kementerian. Awal dari perubahan bentuk organisasi tersebut terjadi dimasa pemerintahan Kabinet Pembangunan VII, dengan nama Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN/ Kepala Badan Pembinaan BUMN. Menteri pertama yang bertanggung jawab atas pendayagunaan BUMN tersebut adalah Bapak Tanri Abeng.

Highlight Sejarah Kementerian BUMN



Menteri

Bapak Tanri Abeng

Direktur Jenderal

Bapak Martiono Hadianto

Bapak Bacelius Ruru

1973

Awalnya Kementerian BUMN merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

1993

Berubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

1998

Berubah menjadi setingkat Kementerian dengan nama Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN

1973 - 1993

Berada pada unit setingkat Eselon II dengan beberapa pergantian nama diantaranya:

1. Direktorat Persero dan PKPN (Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara)
2. Direktorat Persero dan BUN (Badan Usaha Negara)
3. Direktorat Pembinaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

1993 - 1998

Pada kurun 1993- 1998, organisasi yang kini merupakan Kementerian BUMN berada pada unit setingkat Eselon I dengan nama Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJ-PBUN). Dalam kurun waktu 1993- 1998 tercatat dua orang direktur DJ-PBUN:

2001

Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN

Bapak Laksamana Sukardi

digantikan

Bapak Rozy Munir

2004

(Kabinet Gotong Royong)

Menteri BUMN

Bapak Laksamana Sukardi

2004 - 2006

(Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I)

Menteri BUMN

Bapak Sugiharto

2001 - SEKARANG

Kembali menjadi setingkat Kementerian setelah sebelumnya kembali menjadi organisasi setingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan

2000 - 2001

Direktur Jenderal

Bapak I Nyoman Tjager

Pada rentang tahun 2000 - 2001, struktur organisasi Kementerian sempat dihapuskan dan kembali menjadi setingkat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan

2006 - 2009

(Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I)

Menteri BUMN

Bapak Sofyan A. Djalil

2009 - 2011

(Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I)

Menteri BUMN

Bapak Mustafa Abubakar

2009 - 2011

(Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II)

Menteri BUMN

Bapak Dahlan Iskan

2014-2019

(Kabinet Kerja)

Menteri BUMN

Ibu Rini M. Soemarno

Struktur Organisasi dan Profil Pejabat Kementerian BUMN



Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 41 tahun 2015 tentang Kementerian BUMN, susunan organisasi tugas dan fungsi Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Kementerian Badan Usaha Milik Negara dipimpin oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

2. Tugas pokok

Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian BUMN menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis badan usaha milik negara perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis badan usaha milik negara.
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian badan usaha milik negara;
- Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian badan usaha milik negara; dan
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian badan usaha milik negara.



Dengan telah ditetapkan struktur organisasi Kementerian BUMN dalam Peraturan Presiden nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 41 tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan ditindaklanjuti dengan penetapan peraturan menteri BUMN nomor per-10/mbu/07/2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian BUMN, susunan organisasi eselon I Kementerian BUMN terdiri dari :

- **Sekretariat Kementerian**

Mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian BUMN.

- **Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi**

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor industri perkebunan, pertanian, pengairan, perikanan, kehutanan, dan farmasi.

- **Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata**

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor industri energi, perdagangan, logistik, pergudangan, kawasan dan pariwisata.

- **Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media**

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor industri pertambangan, semen, industri strategis, percetakan, telekomunikasi dan media.

- **Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan**

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN dan entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung di sektor industri konstruksi, serta sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara.

- **Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey, dan Konsultan**

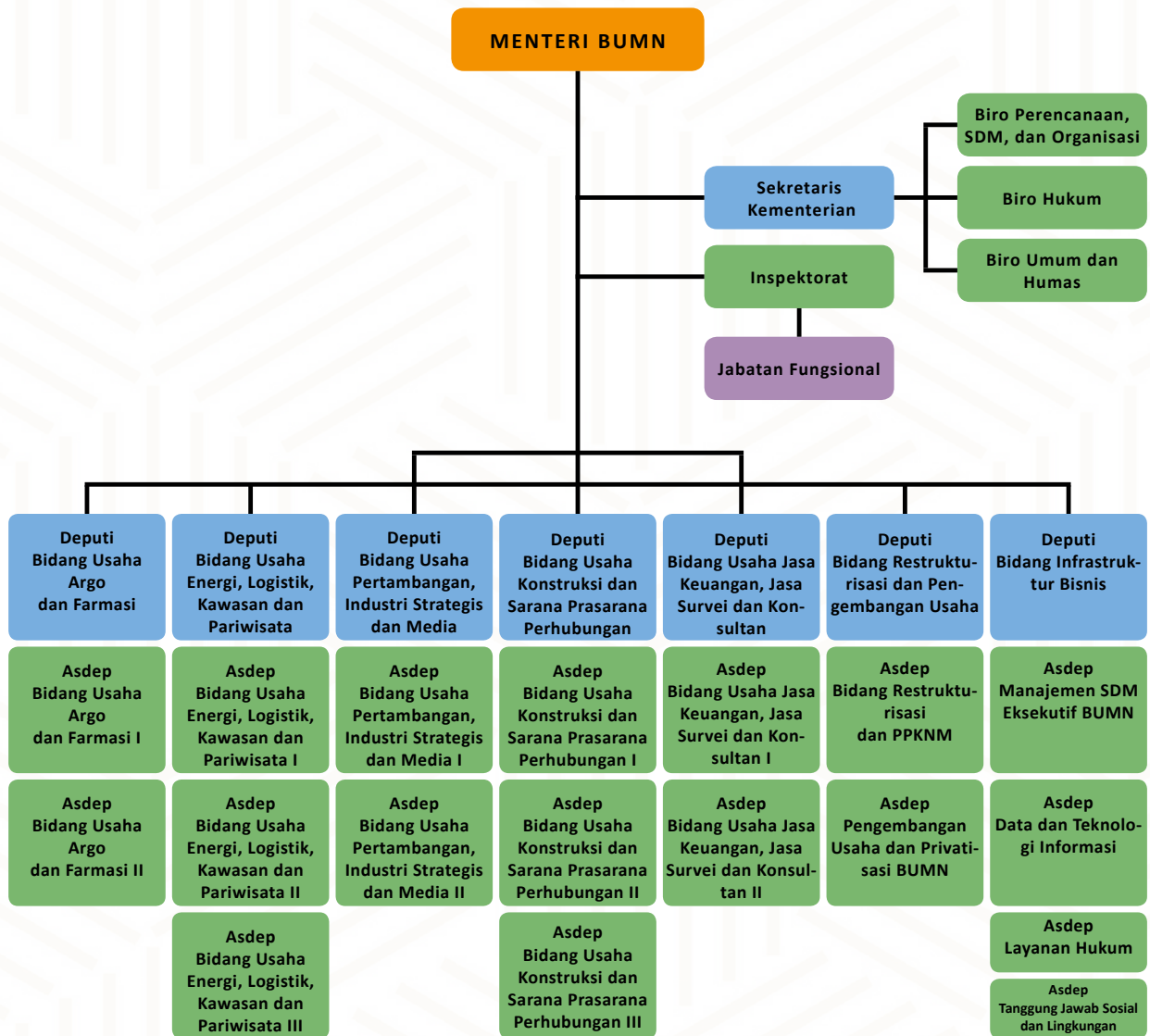
Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN dan entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung di sektor industri perbankan, asuransi, jasa pembiayaan, jasa survei, dan konsultan.

- **Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan usaha**

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang restrukturisasi, pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas, pengembangan usaha, dan kebijakan peta jalan (*roadmap*) BUMN.

- **Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis**

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas manajemen sumber daya manusia eksekutif, pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, layanan hukum BUMN, serta pengelolaan data dan teknologi informasi Kementerian BUMN.



Struktur Organisasi Kementerian BUMN



Rini M. Soemarno

Menteri BUMN

Lahir di Maryland, Amerika Serikat pada tanggal 9 Juni 1958. Gelar Sarjana Ekonomi di dapatnya dari Wellesley College, Massachusetts, Amerika Serikat. Mulai menjabat sebagai Menteri BUMN RI pada tanggal 27 Oktober 2014. Pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Gotong Royong tahun 2001 hingga tahun 2004.



Imam Apriyanto Putro

Sekretaris Kementerian BUMN

Lahir di Cilacap pada tanggal 22 Maret 1964. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang pada tahun 1988, gelar Magister Manajemen dari Institut Bisnis Indonesia pada tahun 2004. Menyelesaikan S-3 MSDM di Universitas Negeri Jakarta.



Wahyu Kuncoro

Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi

Lahir di Surakarta pada tanggal 31 Oktober 1969. Memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Universitas Sebelas Maret (1993) dan gelar Sarjana (S2) jurusan Magister Management dari Universitas Gadjah Mada (2005).



Edwin Hidayat Abdullah
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata

Lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 1971. Lulus S1 bidang Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995, dan memperoleh gelar Master of Public Management dari National University of Singapore (Lee Kuan Yew Fellowship Programme di LKYSPP, NUS dan Kennedy School of Government, Harvard University) pada tahun 2004-2005.



Fajar Harry Sampurno
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media

Lahir di Blitar pada tanggal 18 April 1966. Gelar S1 diperoleh dari Universitas Brawijaya, Master of Business Administration dari Monash University, dan meraih gelar Doctor of Philosophy dari University of Iowa, USA.



Ahmad Bambang
Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Lahir di Kediri 5 Juli 1962. Tamat pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan mengambil jurusan Teknik Informatika dan berhasil meraih gelar sarjananya pada 1986 dan pada tahun 1999 ia meraih gelar Magister dengan jurusan Manajemen Industri, di Universitas Indonesia (UI).



Gatot Trihargo

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan

Lahir di Jogjakarta pada tanggal 29 Agustus 1960. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1989, gelar Master di bidang Akuntansi dan Sistem Informasi Keuangan (MAFIS) dari Cleveland State University pada tahun 1993 dan gelar Doktor di bidang Strategic Management dari Universitas Padjajaran pada tahun 2016.



Hambra

Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis

Lahir di Ketapang, Maluku tanggal 10 Oktober 1968. Memperoleh gelar sarjana S1 Ilmu Hukum dari Universitas Pattimura Ambon, Meraih gelar S2 Magister Hukum Bisnis dari UGM.



Aloysius Kiik Ro

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha

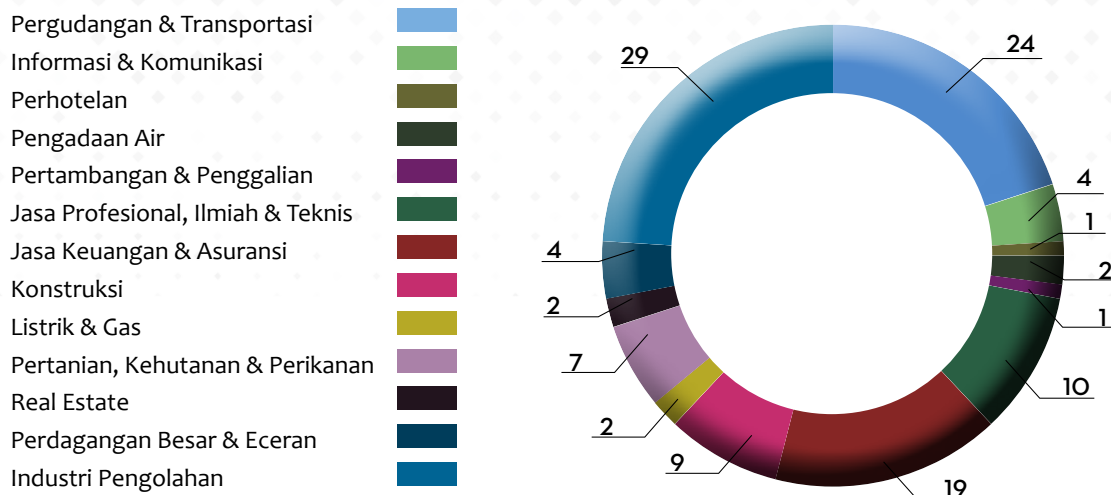
Lahir di Kupang 29 April 1961. Meraih gelar MBA Finance dari University of Illinois UrbanaChampaign, IL dan Ph.D-Finance dari University of Kentucky Lexington, KY.



Milestones



Portofolio BUMN



Jumlah BUMN pada Masing - Masing Sektor

Kontribusi kepada APBN

Sebagai wujud hasil investasi Pemerintah, BUMN selalu memberikan kontribusi kepada APBN melalui setoran pajak dan dividen. Dalam tahun 2016 BUMN tercatat telah menyetorkan dividen sebesar Rp 37 Triliun sedangkan dari pajak, BUMN telah menyetor sebesar Rp172 Triliun. Total setoran BUMN kepada APBN dari pajak dan dividen selama tahun 2016 Rp204 Triliun atau 13,1% dari total penerimaan Negara tahun 2016. Di masa mendatang Kementerian BUMN dan BUMN mempunyai komitmen untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketergantungan dari APBN dan terus berupaya untuk meningkatkan kontribusi kepada APBN.

Kapitalisasi Pasar BUMN

BUMN juga telah berkontribusi yang besar di bidang pasar modal dengan kontribusi kapitalisasi pasar mencapai 25,2% dari total kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Prestasi ini tentu sangat membanggakan mengingat jumlah BUMN yang mencatatkan sahamnya di BEI hanya sekitar 4% yaitu 20 (dua puluh) perusahaan dan 6 (enam) anak perusahaan BUMN dari total Emiten di BEI yang mencapai 538 perusahaan. Selain itu, terdapat 4 (empat) emiten BUMN yang masuk dalam 10 (sepuluh) emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar, yaitu Telkom, BRI, Bank Mandiri, dan BNI.



Tantangan BUMN ke Depan

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dan melaksanakan program serta kegiatan, falsafah Trisakti dan Nawa Cita yang memuat 9 (Sembilan) agenda prioritas pemerintah telah menjadi landasan utama. Berdasarkan hal tersebut Kementerian BUMN secara terus menerus mengarahkan segenap kemampuan dan seluruh sumber daya BUMN untuk menciptakan dan menguatkan kedaulatan untuk mewujudkan penguatan ekonomi nasional, melalui cara pandang “membangun Indonesia” (Indonesia Centris). Untuk mewujudkan hal tersebut, BUMN telah membangun daerah perbatasan, daerah terpencil maupun daerah yang terisolasi mulai dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, guna terus mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat di seluruh pelosok Nusantara. Sebagai entitas ekonomi yang dimiliki oleh Negara, BUMN sebagaimana telah diamanatkan Presiden Republik Indonesia, memiliki tanggung jawab besar agar keberadaannya bisa bermanfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. BUMN harus selalu hadir di tengah masyarakat, yang tertuang dalam bentuk pelayanan publik dan realisasi pelaksanaan program-program serta kegiatan prioritas nasional, baik berupa pembangunan secara *hard skill* maupun *soft skill*. Presiden Joko Widodo juga menekankan agar BUMN mampu menjaga keberlangsungan usaha (*sustainability*) hingga 100 tahun kedepan atau lebih sehingga kelak BUMN dapat menjadi kebanggaan dan dapat diwariskan kepada anak cucu bangsa. Kunci untuk mencapai keberlangsungan usaha adalah dengan mengedepankan integritas dan profesionalisme serta memegang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga kegiatan usaha yang dijalankan BUMN dapat menghasilkan keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan (*value of the firm*) yang pada ujungnya meningkatkan nilai investasi permanen Pemerintah.



Portofolio BUMN

Sektor Informasi & Komunikasi



Sektor Jasa Profesional, Ilmiah, Teknis



Sektor Konstruksi



Sektor Transportasi dan Pergudangan



Navigasi Penerbangan Indonesia



Sektor Perdagangan dan Eceran



Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan



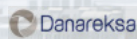
Sektor Penyediaan Migas dan Listrik (Energi)



Sektor Pertambangan
dan Penggalan



Sektor Jasa Keuangan
dan Asuransi



Sektor Pengolahan Air,
Limbah, Sampah



Sektor Penyediaan
Akomodasi





Akuntabilitas Kinerja

hal.
30 Kerangka Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah

hal.
34 Perencanaan dan Evaluasi
Kinerja 2017





Kerangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Kerangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pada gambar diatas yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa ada 5 komponen yaitu Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi dan Capaian Kinerja. Pada tahun 2017, guna meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui unit – unit kerja telah melakukan pengembangan dan beberapa perbaikan.

- **Pengembangan Manajemen Kinerja Organisasi.** Pada dasarnya Manajemen Kinerja Organisasi telah dirumuskan dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri BUMN pada tahun 2016. Pada tahun 2017, telah dilakukan beberapa pengembangan peraturan Manajemen Kinerja Organisasi agar lebih efektif dan efisien. Lebih lanjut, sistem pengelolaan kinerja sudah berbasis IT. Hal ini dapat mempermudah proses perencanaan, pelaporan, dan pengawasan karena dapat mengurangi pengaruh human error.
- **Perumusan Sistem Kinerja Pegawai Bulanan.** Seiring dengan kenaikan tunjangan kinerja untuk pegawai Kementerian BUMN, telah dilaksanakan perumusan Sistem Kinerja Pegawai. Sistem Kinerja Pegawai diharapkan dapat menciptakan pembayaran tunjangan kinerja berbasis kinerja. SKP akan dilaporkan setiap bulannya maksimal pada hari + 5 pada bulan pembayaran tunjangan kinerja.
- **Perumusan Tunjangan Kinerja dan 3R (Rapih, Resik, Ringkas).** Pada tahun 2017, Biro PSDMO telah merumuskan beberapa peraturan baru yaitu Tunjangan Kinerja dan Peraturan 3R. Perumusan kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pegawai.
- **Penyusunan RKT.** Pada awal tahun 2017, Biro PSDMO telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan periode tahun 2017, hal ini bermaksud untuk memperjelas program kerja Kementerian BUMN karena disusun dengan menggunakan Garis Waktu.

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan kinerja tahunan (20%), meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Kinerja	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (2%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (<i>output</i>) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (<i>outcome</i>) (5%) c. Kinerja tahun berjalan (<i>benchmark</i>) (5%)
Total		100%	

Komponen Penilaian SAKIP

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa setiap komponen penilaian SAKIP memiliki bobot yang berbeda – beda, beberapa hal yang telah dilakukan Kementerian BUMN dalam mencapai nilai – nilai komponen tersebut yaitu:

1. Perencanaan Kinerja (30%)

- Kementerian BUMN telah memiliki Rencana Strategis 2015-2019 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/MBU/01/2016 tanggal 25 Januari 2016. Setiap unit kerja, baik eselon I maupun eselon II di Kementerian BUMN juga telah memiliki Renstra sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pada Tahun 2017, Kementerian BUMN telah melaksanakan reviu Renstra periode 2015 – 2019 untuk melihat kualitas dan membandingkan dengan kondisi/situasi terkini termasuk melihat beberapa capaian terhadap target yang telah terealisasi.
- Kementerian BUMN dan setiap unit kerja pada tahun 2017 juga telah menyusun Rencana Kerja (Renja)/ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berisi: (1) Profil unit kerja; (2) Evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya; (3) Target dalam Perjanjian Kinerja tahun berjalan; (4) Program Kerja tahun berjalan; dan (5) Anggaran unit kerja tahun berjalan.



Kementerian BUMN meraih penghargaan dalam Apresiasi PPM 2017 kategori Komitmen Pengembangan Organisasi Terintegrasi



Kementerian BUMN meraih penghargaan dalam Procurement Award 2018 atas pengadaan tahun 2017



Kementerian BUMN meraih penghargaan dari Menteri Keuangan atas laporan keuangan 2016 (WTP)

2. Pengukuran Kinerja (25%)

- Dalam rangka menjaga akuntabilitas dan keseragaman dalam penilaian kinerja, Menteri BUMN pada tahun 2017 telah menetapkan Keputusan Menteri Nomor SK-217/MBU/10/2017 tentang Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, yang antara lain mengatur tentang rumusan/formula pengukuran kinerja organisasi/unit kerja.
- Mekanisme Pengukuran Kinerja organisasi/unit kerja Kementerian BUMN menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* yang memiliki 4 Perspektif yaitu Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Process Perspective dan Learning and Growth Perspective. Hasil akhir dari penilaian kinerja tersebut akan menghasilkan Nilai Kinerja Organisasi atau yang disebut NKO.
- Kementerian BUMN dan setiap unit kerja pada tahun 2017 telah mengimplementasikan rumusan/formula Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud di atas terhadap capaian kinerja tahun 2017.

3. Pelaporan Kinerja (15%)

- Dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-217/MBU/10/2017 tentang Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian BUMN juga diatur tentang mekanisme pelaporan kinerja organisasi/unit kerja.
- Berdasarkan ketentuan tersebut unit kerja setiap triwulan diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja dalam bentuk *Performance Report* yang berisi tabulasi/break down target unit kerja per triwulan dibandingkan dengan capaian pada triwulan yang berkesesuaian.
- Laporan Kinerja dalam bentuk *Performance Report* disampaikan oleh pimpinan unit kerja kepada Penanggung Jawab Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian BUMN dalam hal ini Sekretaris Kementerian BUMN.
- Pada tahun 2017 Kementerian BUMN telah menyempurnakan mekanisme Pelaporan Kinerja dengan menggunakan Sistem Teknologi Informasi. Melalui dukungan teknologi informasi diharapkan *Performance Report* dapat dilaporkan lebih cepat, pengukuran kinerja dapat dilakukan lebih akurat, dan evaluasi oleh pimpinan dapat dilakukan lebih tepat.



Kementerian BUMN meraih penghargaan dari Menteri Keuangan dalam bidang Utilisasi BMN



Kementerian BUMN meraih penghargaan dari Menteri Keuangan dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik



Kementerian BUMN meraih penghargaan dari Kemenkumham yaitu lima besar JDIH terbaik

4. Evaluasi Internal (10%)

- Sejalan dengan penyempurnaan pelaporan kinerja, mekanisme evaluasi kinerja juga diperbaiki dengan mengacu pada Keputusan Menteri BUMN SK-217/MBU/10/2017 tentang Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian BUMN.
- Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN tersebut, sebelum penyampaian *Performance Report*, unit kerja perlu melakukan pembahasan secara internal untuk mengevaluasi hasil/capaian dari setiap indikator kinerja dan menyiapkan langkah-langkah perbaikan yang akan diambil kedepannya.
- Hasil pembahasan dituangkan dalam bentuk risalah *Review Meeting* dan menjadi bagian yang dilaporkan bersama dengan penyampaian *Performance Report*.
- Berdasarkan hasil pembahasan internal, masing-masing unit kerja juga dapat melakukan penilaian dan pembinaan terhadap pegawai/jajaran di bawahnya.
- Dalam level organisasi/Kementerian BUMN, capaian dalam *Performance Report* dan hal-hal yang dibahas dalam *Review Meeting* digunakan untuk evaluasi penyusunan target dalam Perjanjian Kinerja periode berikutnya termasuk evaluasi SDM dan organisasi, baik dari sisi penempatan SDM, kecukupan SDM, kualitas SDM, maupun tugas dan fungsi organisasi.

5. Capaian Kinerja (20%)

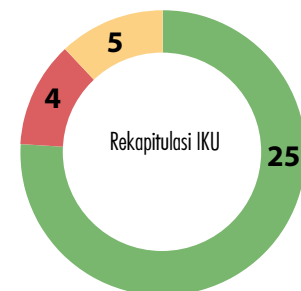
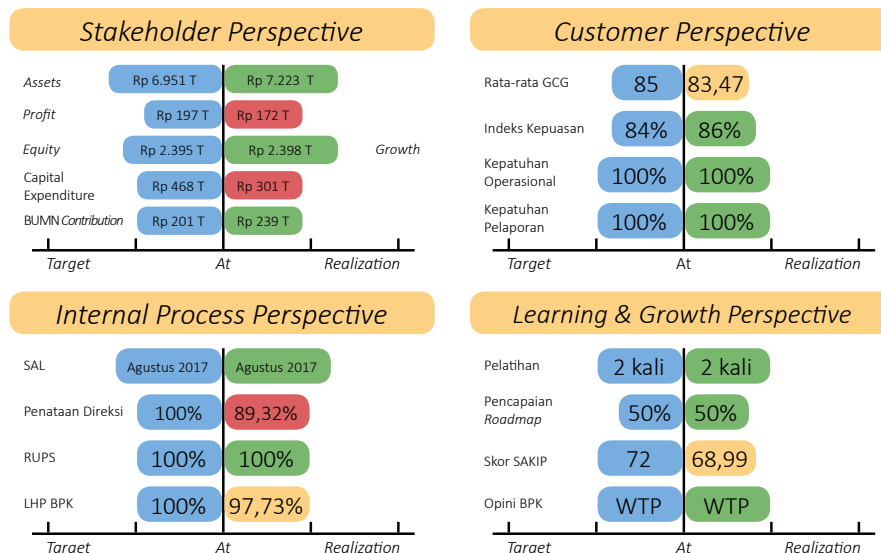
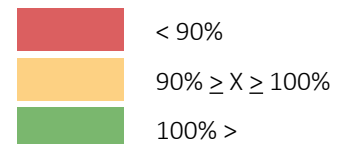
- Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian BUMN pada tahun 2017 tercapai sebesar 102,38 %.
- Berdasarkan mekanisme pengukuran kinerja sebagaimana Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-217/MBU/10/2017 tentang Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian BUMN, maka capaian NKO sebesar 102,38% termasuk dalam kategori “sangat memuaskan”.

Perencanaan Kinerja dan Evaluasi Kinerja 2017

Overall	Achievement	Value
1. Percentage of Aggregate Achievment in Stakeholder Perspective	100,55	30,17
2. Percentage of Aggregate Achievment in Costumer Perspective	105,19	31,56
3. Percentage of Aggregate Achievment in Internal Process Perspective	102,48	20,50
4. Percentage of Aggregate Achievment in Learning and Growth Process Perspective	99,55	19,91
Dashboard Kinerja	TOTAL	102,13

Dashboard Kinerja

Kriteria Capaian IKU

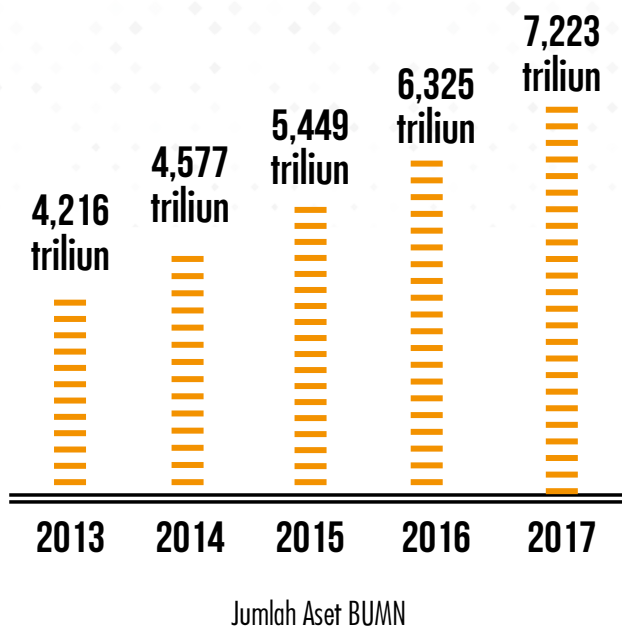


Sasaran Strategis 1

Tercapainya BUMN Sebagai *Agent of Development* yang Besar, Kuat, dan Lincah

Overall	2013	2014	2015	2016	2017
Aset	4,216	4,577	5,449	6,325	7,223
Ekuitas	963	1,091	1,763	2,235	2,398
Laba tahun berjalan	117	148	147	166	172
Belanja modal	196	241	268	298	301

1. Jumlah Aset BUMN

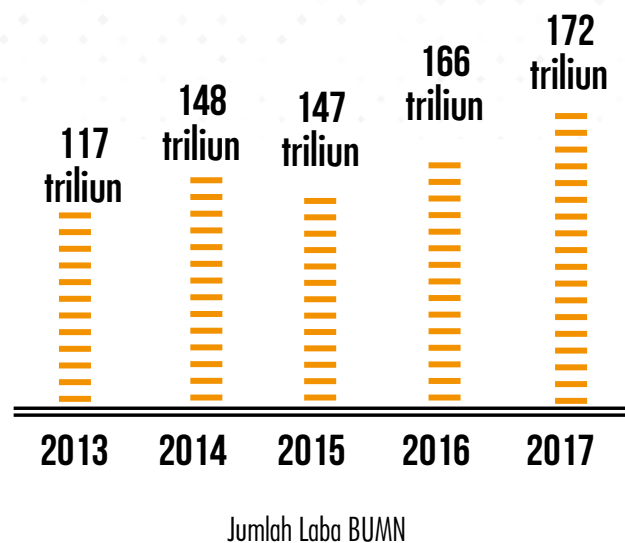


Aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. IKU ini bertujuan untuk mendorong BUMN untuk terus meningkatkan asetnya karena aset adalah salah satu faktor terpenting untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Total aset dari seluruh BUMN pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp 7.223 triliun, meningkat dari posisi akhir tahun 2016 sebesar Rp 6.325 triliun. Dari jumlah tersebut, maka pencapaian indikator utama jumlah aset BUMN sebesar 6.951 triliun terlampaui di tahun 2017.

Kontribusi peningkatan terbesar disumbangkan oleh BUMN dari sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Penyediaan Migas dan Listrik dan sektor Konstruksi. Sementara itu BUMN penyumbang kenaikan aset terbesar adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

2. Jumlah Laba BUMN

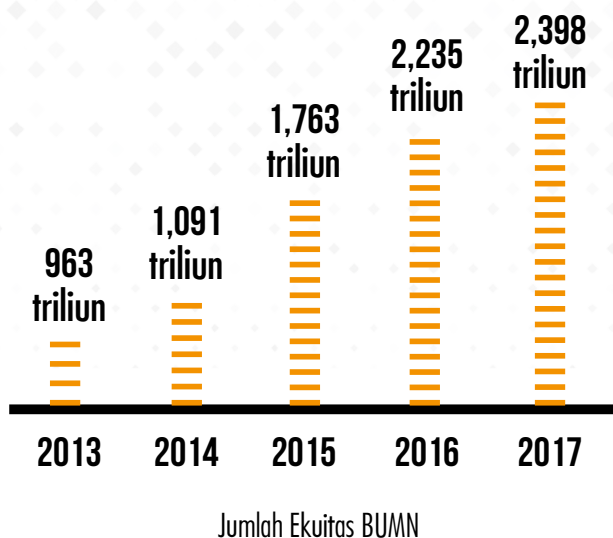


Laba merupakan salah satu ukuran keberhasilan dari suatu perusahaan yang mencerminkan efektivitas operasional perusahaan tersebut karena merupakan selisih antara pendapatan yang didapatkan dengan biaya yang dikeluarkan. Total Laba dari seluruh BUMN pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp 172 triliun, meningkat dari posisi akhir tahun 2016 sebesar Rp 166 triliun. Kontribusi peningkatan laba terbesar berasal dari sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Konstruksi, dan sektor Informasi dan Komunikasi. Sedangkan BUMN penyumbang kenaikan terbesar adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Target IKU Laba Tahun 2017 sebesar Rp 197 triliun tidak tercapai antara lain karena pengaruh fluktuasi harga komoditas (minyak bumi, gas, batu bara, mineral, CPO, dan lain sebagainya). Pertamina, PLN, PGN, dan Garuda adalah beberapa BUMN yang mengalami penurunan kinerja di tahun 2017.

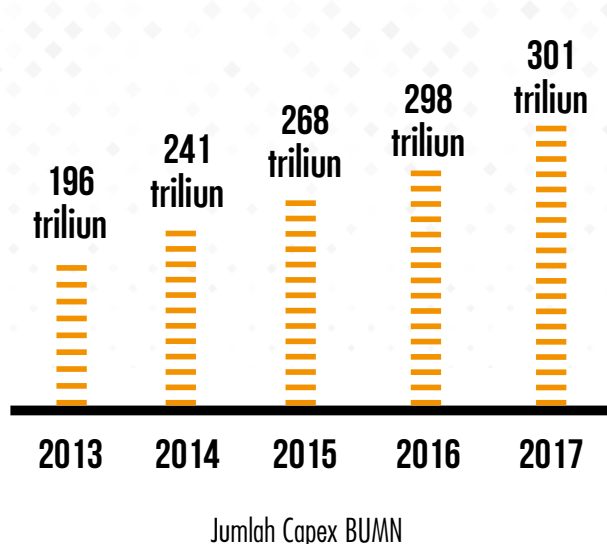
Upaya peningkatan kinerja kedepannya dilakukan antara lain melalui holding BUMN, sinergi, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

3. Jumlah Ekuitas BUMN



Ekuitas merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kekayaan bersih perusahaan. Ekuitas BUMN juga dapat menjadi ukuran perkembangan nilai kekayaan Pemerintah yang diinvestasikan dalam bentuk kepemilikan perusahaan (BUMN). Nilai total ekuitas dari seluruh BUMN pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp 2.398 triliun, meningkat dari posisi akhir tahun 2016 yang sebesar Rp 2.235 triliun. Hal tersebut menunjukkan pencapaian indikator utama jumlah ekuitas BUMN terlampaui di tahun 2017. Kontribusi terbesar peningkatan ekuitas juga disumbang oleh BUMN sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Industri Pengolahan dan sektor Penyediaan Migas dan Listrik. Sementara itu BUMN penyumbang peningkatan terbesar adalah PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

4. Jumlah Capex BUMN



Belanja Modal (*Capital Expenditure*) adalah alokasi yang direncanakan (dalam budget) untuk melakukan pembelian/perbaikan/penggantian segala sesuatu yang dikategorikan sebagai aset perusahaan secara akuntansi. IKU ini bertujuan untuk memperbesar Capex BUMN agar BUMN dapat berekspansi atau meningkatkan kapasitas produksi.

Pada tahun 2017 jumlah belanja modal BUMN mencapai Rp 301 triliun, meningkat dari pencapaian belanja modal BUMN tahun 2016 yang mencapai Rp 298 Triliun. Peningkatan jumlah Capex paling besar disumbangkan oleh BUMN sektor Konstruksi, sektor listrik dan sektor Transportasi dan Pergudangan. Sementara itu BUMN penyumbang peningkatan terbesar adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Namun, berdasarkan hal tersebut pada tahun 2017 ini target Jumlah Capex BUMN sebesar 468 triliun belum tercapai dikarenakan banyaknya proyek BUMN yang mengalami keterlambatan pekerjaan sehingga dialihkan ke tahun 2018. Upaya yang perlu dilakukan ialah melakukan perencanaan dan pembuatan *time line* Capex dengan lebih hati-hati sehingga pekerjaan dapat dilakukan tepat waktu.



Overall	Target	Realisasi Tahun 2017	% Pencapaian
BUMN yang masuk Global Fortune 500	3	1	33%
Kontribusi BUMN Terhadap Negara	201	239	119%
Skor Penilaian Kinerja BUMN (KPKU)	50	53	106%
Persentase Pencapaian <i>Roadmap</i> BUMN	50%	50%	100%
Tercapainya SLA Penugasan PSO	95%	103.77%	109,23%

5. BUMN yang Masuk *Global Fortune 500*



Global Fortune 500 adalah sebuah daftar tahunan yang disusun dan diterbitkan oleh majalah Fortune yang memeringkatkan 500 perusahaan umum dan milik pemerintah teratas yang diperingkat berdasarkan pendapatan bruto mereka setelah penyesuaian dibuat oleh Fortune untuk menghindari dampak pajak eksis yang dikumpulkan perusahaan. Pada tahun 2016, terdapat 2 perusahaan yang terdaftar dalam *Global Fortune 500* yakni PT. Pertamina (Persero) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Namun, pada tahun 2017, hanya satu BUMN yang masuk ke dalam daftar *Global Fortune 500* yakni PT. Pertamina (Persero). Berdasarkan hal tersebut target Jumlah BUMN yang masuk *Global Fortune 500* tahun 2017 sebanyak 3 BUMN tidak tercapai dikarenakan proses pembentukan holding BUMN Perbankan dan Jasa Keuangan serta holding BUMN Kepelabuhanan terealisasi. Upaya yang perlu dilakukan kedepannya ialah dengan mendorong BUMN - BUMN yang telah ditargetkan untuk terus meningkatkan kinerja.



6. Kontribusi BUMN terhadap Negara (Pajak dan Dividen)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang nantinya akan berdampak pada peningkatan pembayaran pajaknya dimana pajak adalah salah satu kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional terutama dalam penerimaan Negara.

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang nantinya akan berdampak pada peningkatan setoran dividen dimana dividen adalah salah satu kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional terutama dalam penerimaan Negara. Pada tahun 2017 jumlah setoran pajak BUMN mencapai Rp 196 triliun sedangkan setoran dividen dari BUMN mencapai Rp 43 triliun dengan total setoran pajak dan deviden sebesar Rp 239 triliun. Berdasarkan hal tersebut pencapaiannya melampaui target yang ditetapkan yaitu Rp 201 triliun.

Sumbangan pajak dan dividen terbesar berasal dari BUMN sektor Penyediaan Migas & Listrik (Energi), sektor Informasi & Komunikasi dan sektor Jasa Keuangan & Asuransi. Kontributor peningkatan pajak terbesar adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero) dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Sedangkan untuk peningkatan Dividen terbesar diberikan oleh PT Pertamina (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.



7. Skor Penilaian Kinerja BUMN (KPKU)

KPKU merupakan suatu sistem pengelolaan dan pengendalian kinerja BUMN berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul yang diadopsi dari *Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence* (MBCFPE) yang diimplementasikan melalui program pengembangan dan penerapan sistem manajemen kinerja BUMN mulai tahun 2012. KPKU bertujuan menjadi metode terpadu dalam pengelolaan kinerja BUMN yang diperuntukkan menghasilkan nilai yang meningkat kepada pelanggan dan kepada pemangku kepentingan lainnya sehingga berdampak pada keberlangsungan perusahaan dan meningkatkan efektifitas dan kapabilitas BUMN secara menyeluruh. Pada tahun 2017, sejumlah 5 perusahaan berhasil masuk ke dalam kategori *Industry Leader*, 14 perusahaan dalam kategori *Emerging Industry Leader*, dan 34 perusahaan dalam kategori *Good Performance*. Dari rincian tersebut, dapat diketahui bahwa total perusahaan yang berhasil meraih skor KPKU tinggi ialah sebanyak 53 perusahaan. Jumlah tersebut lebih tinggi dari target yang harus dicapai yakni 50 perusahaan dengan persentase capaian adalah 106%. Kelima perusahaan dengan skor KPKU tertinggi dan berhasil masuk kategori *industry leader* ialah PT Pertamina, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Jasa Marga, PT Wijaya Karya, dan PT Bank Rakyat Indonesia.



8. Persentase Pencapaian Roadmap BUMN

Roadmap BUMN tahun 2015 – 2019 merupakan pedoman Kementerian BUMN dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMN serta menjadi acuan bagi manajemen BUMN untuk menetapkan berbagai kebijakan strategis yang lebih detail dalam bentuk Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada masing-masing perusahaan.

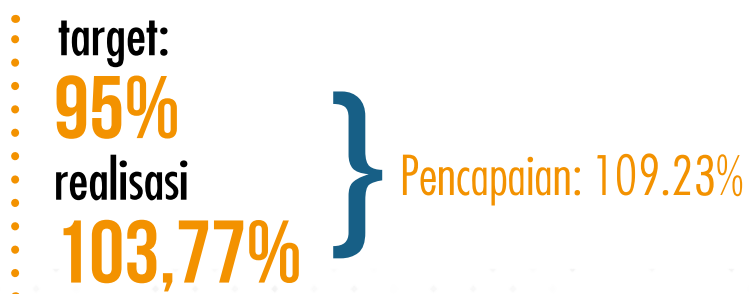
Dalam Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015-2019, sasaran program (*outcome*)/sasaran kegiatan (*output*) berupa persentase pencapaian *roadmap* ditargetkan mencapai 100% di akhir tahun 2019 dengan pendistribusian sebanyak 25% tiap tahun dimulai dari tahun 2016. Dengan kata lain, pada akhir tahun 2019 ditargetkan terdapat 15 (lima belas) holding sektoral BUMN yang dapat terwujud dengan pembentukan 4 (empat) holding sektoral BUMN per tahun mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

Pada tahun 2017, Kementerian BUMN telah melanjutkan proses pembentukan holding BUMN yang telah dirintis sejak tahun 2016 serta memulai proses pembentukan beberapa holding lainnya. Pada tanggal 10 November 2017 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang menjadi dasar Pembentukan Holding Pertambangan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dilakukan pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan PT Timah (Persero) Tbk serta seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada PT Freeport Indonesia.

Pada tahun 2017 juga telah dilakukan penyusunan kajian pembentukan holding BUMN Perkapalan dan Industri Berat yang melibatkan PT PAL, PT Dok Kodja Bahari (DKB), PT Dok Perkapalan Surabaya (DPS), PT Industri Kapal Indonesia (IKI), PT Barata Indonesia & PT Boma Bisma Indra (BBI), dan Holding BUMN Asuransi yang melibatkan PT Jasa Raharja PT Asuransi Asei Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT Jasaraharja Putera, PT Nasional-Re, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero). Penyusunan tersebut melibatkan Kementerian Keuangan serta beberapa Pemangku kepentingan lainnya seperti KPPU dan OJK. Dengan melibatkan pihak-pihak tersebut diharapkan kajian yang tersusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Persentase pencapaian IKU

Secara akumulasi sampai dengan akhir tahun 2017 telah diselesaikan 7 kajian holding BUMN, dan satu kajian holding sedang dalam tahap finalisasi, sehingga realisasi Pencapaian *Roadmap* BUMN sampai dengan tahun 2017 adalah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian BUMN Tahun 2015 – 2019 sebesar 50%.



9. Tercapainya SLA Penugasan PSO

Pada tahun 2017, terdapat 12 BUMN yang mendapat penugasan PSO dari Pemerintah. Secara keseluruhan realisasi penggunaan Dana PSO oleh BUMN sebesar 103,77% atau lebih besar dari target tahun 2017 sebesar 95%.

Sasaran Strategis 2

Kepuasan Pelanggan yang Tinggi atas Pelayanan Kementerian BUMN



Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang di maksudkan sebagai sarana bagi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan umum sesuai dengan permintaan masyarakat. Oleh karena itu core business dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah melayani kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan prima, baik dalam bentuk pelayanan administratif, pelayanan barang, maupun pelayanan jasa. Pemberian pelayanan publik tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan asas dan prinsip pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Fungsi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintah terbagi ke dalam tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah.

Kementerian BUMN merupakan instansi pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan BUMN, sehingga pelayanan yang diharapkan dari Kementerian BUMN adalah dalam kaitannya dengan pembinaan BUMN tersebut. Pelayanan yang diberikan oleh Kementerian BUMN berbeda dengan instansi lain yang langsung melayani kebutuhan masyarakat luas seperti kantor pelayanan pajak atau kantor bea dan cukai, namun fungsi utama pelayanan yang diberikan berupa kebijakan, perizinan, maupun regulasi kepada BUMN, walaupun terdapat juga kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti penyediaan data dan informasi tentang BUMN maupun Kementerian BUMN.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, perlu dilakukan pengukuran tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pengukuran tingkat pelayanan tersebut dilaksanakan dengan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan melalui penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sehingga dapat diketahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Sebagai pedoman dalam penyusunan IKM, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai cara penyusunan IKM serta unsur-unsur dalam penilaian IKM, namun karena jenis pelayanan dan masyarakat atau pemangku kepentingan dari setiap instansi pemerintah berbeda-beda, pedoman tersebut memberikan fleksibilitas dalam operasionalisasi pengukuran IKM. Adapun pedoman tersebut merupakan penyempurnaan dari pedoman sebelumnya, yakni Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Perubahan dimaksud adalah terkait penyempurnaan parameter penilaian.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2017	% Pencapaian
Indeks kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian	90%	87%	96,67%
Indeks kepuasan instansi pemerintah terkait/stakeholders atas pelayanan Kementerian BUMN	84%	86%	102,38%



1. Indeks Kepuasan BUMN atas Pelayanan Kementerian BUMN

Indeks kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN diukur melalui survei dengan penyebaran kuesioner kepada BUMN. Survei tersebut telah selesai dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Bagian Riset Kementerian BUMN. Skor yang didapat dari survey tersebut adalah 87% yang menunjukkan persepsi BUMN terhadap pelayanan Kementerian BUMN masuk dalam kategori memuaskan secara *aggregate*. Namun skor tersebut masih berada dibawah target yaitu 90%, sehingga untuk kedepannya *area of improvement* dalam pelayanan perlu untuk ditindaklanjuti juga mutu layanan sesuai dengan SOP yang berlaku perlu ditingkatkan agar indeks kepuasan pelayanan terhadap BUMN dapat meningkat sesuai dengan yang diharapkan.



2. Indeks Kepuasan Instansi Pemerintah Terkait/Stakeholders atas Pelayanan Kementerian BUMN

Pengukuran indeks kepuasan instansi pemerintah terkait/stakeholders atas pelayanan Kementerian BUMN dilakukan dengan cara melakukan survey melalui kuesioner. Survey tersebut telah selesai dilaksanakan dengan bekerjasama dengan PT Sucofindo (Persero) sebagai pihak ketiga pelaksana survey. Skor yang didapat dari survey tersebut adalah 86% yang menunjukkan persepsi instansi pemerintah terkait/stakeholders terhadap pelayanan Kementerian BUMN masuk dalam kategori memuaskan secara *aggregate* dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Sasaran Strategis 3

Kepatuhan BUMN yang Tinggi atas Kebijakan Kementerian BUMN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2017	% Pencapaian
Nilai rata-rata GCG BUMN	85	83,47	98,20%
Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN	100%	100%	100%
Persentase kepatuhan proses operasional BUMN	100%	100%	100%
Persentase kepatuhan pelaporan BUMN	100%	100%	100%

Kriteria GCG

Sangat Baik (Skor > 85)
Baik (85 > Skor > 75)
Cukup (75 > Skor > 60)
Kurang (60 > Skor > 50)
Tidak Baik (Skor < 50)

“**Kriteria penilaian GCG terdiri dari 5 aspek, 50 Indikator dan 160 Parameter penerapan GCG yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S. MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian/Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.**

target:
85
realisasi
83,47

} **Pencapaian: 98,20%**

1. Nilai Rata - rata GCG BUMN

Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Menteri BUMN berkewajiban memberikan petunjuk dan mengimplementasikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) pada BUMN, yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan kewajaran. Skor rata-rata GCG di tahun 2017 adalah 83.47 dengan kategori baik secara agregat. Namun, skor tersebut belum mencapai target Nilai rata-rata GCG BUMN di tahun 2017 yakni 85 poin. Terdapat 19 dari 96 perusahaan yang menyampaikan asesmen GCG dengan skor penilaian di bawah 75. Skor penilaian terendah yakni 47 yang diperoleh Perum Perikanan Indonesia. Upaya yang perlu dilakukan kedepannya adalah mendorong BUMN untuk memperbaiki tata kelola antara lain dengan menindaklanjuti *area of improvement* hasil assesment GCG.

Ketidaktercapaian target IKU tersebut juga disebabkan karena adanya beberapa BUMN yang belum melaksanakan asesmen GCG di tahun sebelumnya, dan setelah melaksanakan GCG di tahun 2017 nilainya masih rendah sehingga ketika dirata-ratakan nilainya menjadi di bawah target skor 85. Hal ini membuat capaian IKU hanya mencapai 98,20% sehingga perlu dilakukan peningkatan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

target:
100%
realisasi
100% } Pencapaian: 100%

2. Persentase Kepatuhan Proses Perencanaan BUMN

Perencanaan BUMN disusun dalam RKAP tahun 2017 dimana proses perencanaannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Menteri BUMN. Menurut Keputusan Menteri BUMN No. KEP-101/MBU/2002 tentang Penysunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, BUMN diharuskan telah menyampaikan perencanaan BUMN yang tertuang dalam RKAP selambat-lambatnya 60 hari sebelum tahun anggaran perusahaan tersebut. Dalam hal ini capaian 100% dari Kementerian BUMN menunjukkan penyampaian proses perencanaan telah dipatuhi yakni sebelum 60 hari dari tahun anggaran.

target:
100%
realisasi
100% } Pencapaian: 100%

3. Persentase Kepatuhan Proses Operasional BUMN

Pelaksanaan operasional BUMN selama tahun 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Menteri BUMN dengan persentase capaian sesuai dengan target yakni 100%.

4. Persentase Kepatuhan Proses Pelaporan BUMN

Pelaksanaan pelaporan BUMN selama tahun 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Menteri BUMN dengan persentase capaian sesuai dengan target yakni 100%.

Sasaran Strategis 4

Perencanaan dan Rumusan Kebijakan yang Berkualitas dan Implementatif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2017	% Pencapaian
Terpenuhinya batas waktu penerbitan Shareholder Aspiration Letter (SAL)	100%	100%	100%
Persentase hasil riset/kajian yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan	100%	100%	100%

target:
100%
realisasi
100% } Pencapaian: 100%

1. Terpenuhinya Batas Waktu Penerbitan Shareholder Aspiration Letter (SAL)

Shareholders Aspiration Letter (SAL) merupakan dokumen yang berisi pedoman penyusunan target-target Rencana Kerja dan Anggaran BUMN (RKAP) untuk tahun buku berikutnya. Sedangkan menurut peraturan Menteri BUMN tentang penyusunan RKAP, dokumen tersebut paling lambat harus sudah diserahkan kepada Pemegang Saham/ Pemilik Modal 60 hari sebelum tahun pelaksanaan RKAP. Oleh karena itu, guna mendukung proses penyusunan RKAP, dokumen SAL harus segera diterbitkan paling lambat bulan Agustus setiap tahunnya dan pada tahun 2017

target:
100%
realisasi
100% } Pencapaian: 100%

2. Persentase Hasil Riset/Kajian yang Dijadikan Sebagai Bahan Pertimbangan Perumusan Kebijakan

Pada tahun 2017, unit riset telah menyusun 4 (empat) kajian, yang seluruhnya telah menjadi bahan kebijakan, yaitu:

1. Efektivitas Penugasan Pegawai Kementerian BUMN di BUMN/ Anak Perusahaan BUMN
2. BUMN Konstruksi: Peran, Kinerja, dan Daya Saing
3. Peta Remunerasi Manajemen BUMN.
4. Analisa BUMN Rugi: Identifikasi Penyebab dan Strategi Pencegahannya



Sasaran Strategis 5

Pembinaan BUMN yang Optimal

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2017	% Pencapaian
Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi sesuai standar layanan	100%	100%	100%
Penetapan Direksi sesuai dengan peraturan	100%	89,32%	89,32%
Penyelenggaraan RUPS tepat waktu	100%	100%	100%
Ketersediaan kontrak Kinerja BUMN	100%	100%	100%

: target:

: 100%
: realisasi
: 100%



Pencapaian: 100%

1. Terpenuhinya Waktu Respon Usulan Aksi Korporasi Sesuai Standar Layanan

IKU ini bertujuan untuk menjadikan budaya kerja di lingkungan Kementerian BUMN menjadi lebih transparan, profesional dan akuntabel serta menunjang pengambilan keputusan yang lebih cepat terutama dalam usulan aksi kegiatan BUMN. IKU ini diukur berdasarkan oleh Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri BUMN atau Sekretaris Kementerian BUMN. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (*maximize*), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan. Target pencapaian IKU ini difokuskan pada layanan Evaluasi Kinerja Triwulanan/ Berkala dan persetujuan *corporate action* yang ditargetkan atas seluruh proses sesuai dengan standar layanan. Selama tahun 2017, IKU ini telah tercapai 100%.

: target:

: 100%
: realisasi
: 89,32%



Pencapaian: 89,32%

2. Penentuan Direksi Sesuai Dengan Peraturan

Sepanjang tahun 2017, telah dilakukan proses pemberhentian dan/atau pengangkatan Direksi BUMN sebanyak 92 orang, dari 103 orang yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2017. Dengan demikian, selama tahun 2017 realisasi penetapan Direksi BUMN yang sesuai dengan peraturan (berakhir masa jabatannya pada tahun 2017) mencapai 89,32%.

Tidak tercapainya target IKU tersebut karena terdapat beberapa BUMN yang dilakukan restrukturisasi organisasi sehingga beberapa jabatan direksi dilakukan pengurangan dan/atau penggabungan.

Sasaran Strategis 5

Pembinaan BUMN yang Optimal

target:

100%

realisasi

100%



Pencapaian: 100%

3. Penyelenggaraan RUPS Tepat Waktu

RUPS adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Penyelenggaraan RUPS tepat waktu menjadi salah satu IKU Kementerian dengan tujuan agar kepentingan pemegang saham dapat terlindungi. Dengan terlaksananya RUPS tepat waktu dan dipersiapkan sesuai dengan anggaran dasar perseroan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembinaan BUMN oleh Kementerian BUMN. Pelaksanaan RUPS yang telah dilakukan selama tahun 2017 adalah RUPS maupun RPB Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2017 serta RUPS maupun RPB Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2015.

Selama tahun 2017, pelaksanaan RUPS telah dilakukan 100% tepat waktu dimana seluruh BUMN telah melaksanakan RUPS tepat waktu dimana sesuai dengan UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 23 menyatakan bahwa batas waktu RUPS Laporan Tahunan paling lambat 5 bulan setelah tahun berlalu. Sementara itu untuk pelaksanaan RUPS RKAP diatur dalam Keputusan Menteri BUMN No.KEP- 101/ MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, dimana batas waktu RUPS adalah 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran perusahaan.

target:

100%

realisasi

100%



Pencapaian: 100%

4. Ketersediaan Kontrak Kinerja BUMN

Kontrak kinerja adalah suatu kesepakatan yang berisi mengenai indikator kinerja yang ingin dicapai baik sasaran pencapaiannya maupun jangka waktu pencapaiannya. Ada 2 (dua) hal yang perlu dicantumkan dalam kontrak kinerja yaitu sasaran akhir yang ingin dicapai serta program kerja untuk mencapainya. Seluruh target kontrak kinerja BUMN sudah terealisasi semua pada saat pelaksanaan RUPS dan RPB Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2017.

Sasaran Strategis 6

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Secara Efektif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2017	% Pencapaian
Persentase Tindak Lanjut LHP BPK	100%	97,73%	97,73%
Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan	100%	104%	104%

target:
100%
realisasi
97,73% } Pencapaian: 97,73%

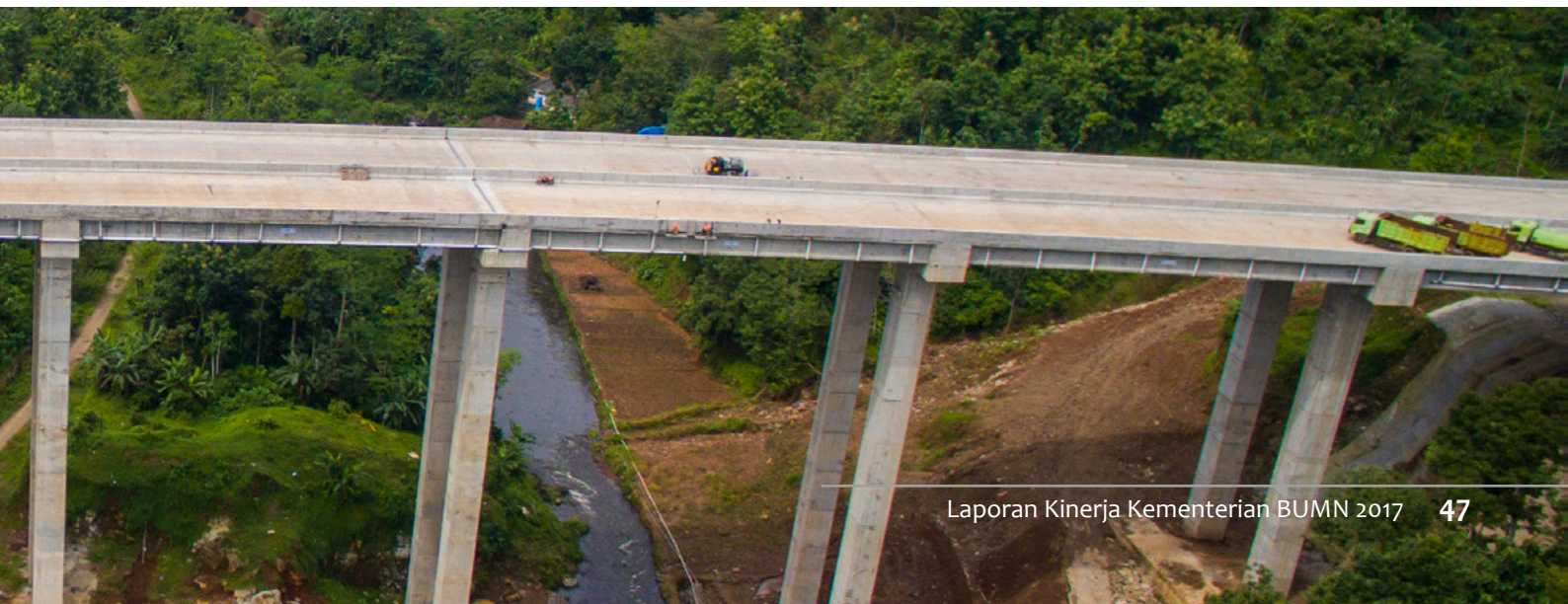
1. Terselenggaranya Tindak Lanjut Penyelesaian LHP BPK

Capaian IKU persentase tindak lanjut penyelesaian LHP BPK sebesar 97,73% dari target 100% yang merupakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas BPK di Kementerian BUMN.

target:
100%
realisasi
104% } Pencapaian: 104%

2. Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan

Capaian persentase Pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) adalah 104% dari target sebesar 100%, merupakan kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian BUMN.



Sasaran Strategis 7

Terwujudnya SDM yang Kompeten dan Profesional

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2017	% Pencapaian
Rata-rata jumlah program pengembangan dan pelatihan yang diikuti oleh masing-masing pegawai	2	2	100%



target:

2

realisasi

2



Pencapaian: 100%

1. Rata - rata Jumlah Program Pengembangan dan Pelatihan yang Diikuti oleh Masing - masing Pegawai

Program pengembangan dan pelatihan untuk pegawai dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berada di lingkungan kerja Kementerian BUMN. Pelatihan diberikan untuk pemenuhan kompetensi manajerial, kompetensi teknis, maupun kompetensi umum. Realisasi untuk rata-rata jumlah program pengembangan dan pelatihan yang diikuti oleh masing-masing pegawai telah mencapai target yakni sebanyak 2 kali.



Sasaran Strategis 8

Terwujudnya Organisasi Pengelola Korporasi yang Modern

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2017	% Pencapaian
Persentase Pencapaian Road Map Transformasi Organisasi	50%	50%	100%

“

Transformasi Kementerian BUMN dilaksanakan dalam rangka menuju organisasi korporasi yang modern dengan beberapa tahapan diantaranya persiapan, mobilisasi, transformasi, dan eksekusi. Tahap persiapan adalah target pencapaian di tahun 2017.

: target:

: 50%

: realisasi

: 50%



Pencapaian: 100%

1. Persentase Pencapaian Road Map Transformasi Organisasi

Target pencapaian transformasi organisasi di tahun 2017 ini adalah tahap persiapan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan High Level Blueprint Organisasi

- Benchmark Best Practices
- Pendefinisian struktur super holding
- Desain peran dan tanggung jawab level eksekutif
- Desain mekanisme key governance dalam pengelolaan BUMN

Kegiatan penyusunan High Level Blueprint Organisasi telah disusun oleh konsultan dengan rincian sebagai berikut:

Kick Off Penyusunan Kajian Organisasi dan Proses Bisnis pada Senin, 10 Juli 2017 yang dihadiri oleh Menteri BUMN dan seluruh jajaran Eselon I Kementerian BUMN. Dalam kegiatan tersebut, Menteri BUMN menyampaikan arahan sebagai berikut

- Organisasi Pembina BUMN kedepannya diarahkan dapat lebih profesional agar dapat menjalankan 2 (dua) fungsi pembinaan BUMN, yaitu melakukan pembinaan BUMN sebagai korporasi agar lebih kompetitif supaya dapat berkompetisi secara global dan pembinaan BUMN untuk mendukung dinamika pelaksanaan peran BUMN dalam menjalankan peran penugasan yang diberikan oleh Pemerintah.

- BUMN diarahkan menjadi *economic anchor* bagi Indonesia, sehingga pengelolaannya harus memperhatikan praktik-praktik korporasi, namun dalam pelaksanaannya agar tetap memperhatikan pelaksanaan penugasan negara yang hanya dapat dilakukan oleh BUMN (misal : kebijakan penugasan BBM Satu Harga).
- Hasil kajian agar dapat mendudukkan posisi Kementerian BUMN sebagai Organisasi Pembina BUMN dengan instansi terkait dan menjauhkan dari ranah politis, agar pengelolaan BUMN tetap sustain kedepannya.
- Dalam pelaksanaan kajian, agar memperhatikan benchmark best practices pengelolaan BUMN yang dilakukan secara global. Praktik pengelolaan BUMN di Khazanah Malaysia dapat menjadi referensi model pengelolaan BUMN.

Pelaksanaan One-on-One Interview kepada seluruh pejabat Eselon I, sebagai berikut:

Posisi	Nama
Plt. Deputy Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Fadjar Judisiawan
Deputy Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha	Aloysius Kiik Ro
Deputy Bidang Infrastruktur Bisnis	Hambra
Deputy Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata	Edwin Hidayat Abdullah
Deputy Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media	Fajar Harry Sampurno
Sekretaris Kementerian BUMN	Imam Apriyanto Putro
Deputy Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey, dan Konsultan	Gatot Trihargo
Deputy Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi	Wahyu Kuncoro Ahmad Bambang
Staf Khusus Kementerian BUMN	Devy Suradji Budi Gunadi Sadikin

FGD Teknis dengan unit kerja internal Kementerian BUMN dalam rangka memotret proses bisnis dan sistem kerja Kementerian BUMN saat ini, meliputi :

- Aspek kelembagaan dan SDM Kementerian BUMN dengan Biro Perencanaan, SDM, dan Organisasi.
- Aspek legal pengelolaan BUMN saat ini dengan Biro Hukum dan Asdep Layanan Hukum.
- Aspek teknis pengelolaan BUMN meliputi mekanisme pengelolaan, mekanisme penugasan (PMN dan PSO), dan kebijakan dividen saat ini dengan *Working Team* Deputy Teknis Kementerian BUMN.
- Aspek high level *roadmap* dan *review* kebijakan sektoral BUMN dengan *Working Team* Deputy Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha

Pelaksanaan *Visioning Workshop* sebagai bagian dari pengumpulan aspirasi para pimpinan Kementerian BUMN di level Eselon I pada Kamis, 7 September 2017. Berdasarkan hasil *Visioning Workshop* tersebut berhasil disimpulkan *Purpose*, Peran, dan *Positioning* Organisasi Pengelola BUMN sebagai berikut:

- **Purpose.** Perlu mempertegas tujuan kelembagaan Organisasi Pengelola BUMN dengan menjabarkan prinsip-prinsip Value Adding Ownership yang dapat memberikan nilai tambah pengelolaan BUMN oleh Organisasi Pengelola BUMN. Prinsip-prinsip tersebut meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
 - **Strategi.** Penyusunan strategi dan target yang jelas dan terukur, menentukan pengukuran kinerja sesuai dengan *purpose* BUMN, serta mengembangkan skala bisnis BUMN menuju global champion.
 - **Investasi.** Mendukung dalam pemberian akses pendanaan yang lebih luas dan mendorong investasi yang menghasilkan multiplier effect.
 - **Governance.** Menegakkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga tidak ada intervensi secara langsung kepada BUMN tanpa melewati pemegang saham.
 - **Identitas.** Membangun reputasi dan komunikasi publik untuk menciptakan citra organisasi yang baik dan berkelanjutan (*sustainable*)
 - **Kapabilitas.** Berkomitmen mendukung peningkatan kapabilitas yang dibutuhkan untuk pengelolaan BUMN secara lebih profesional dan pemilihan orang-orang yang tepat untuk mengelola BUMN.
- **Peran.** Peran Kementerian BUMN perlu diselaraskan dengan *purpose* BUMN untuk menyeimbangkan antara fungsi kontributor finansial dan agen pembangunan. Dalam rangka memaksimalkan nilai BUMN, Organisasi Pengelola BUMN perlu bertindak sebagai Investor dan Pembina bagi BUMN untuk BUMN dengan *purpose* kontributor finansial, dan bertindak sebagai Pembina dan Pengelola untuk BUMN dengan *purpose* agen pembangunan.

- **Positioning.** Agar dapat melaksanakan *purpose* Kementerian BUMN dengan prinsip *Value Adding Ownership*, maka *Positioning* Kementerian BUMN perlu diperkuat secara kelembagaan dengan bentuk Badan. Bentuk Organisasi Pengelola BUMN kedepannya dapat berbentuk Badan Hukum Publik (BHP) atau Badan Usaha (Holding) Milik Negara (BUHMN).

Prinsip Desain Organisasi Kementerian BUMN

Berdasarkan arahan *purpose*, peran, dan *positioning* seperti di atas, prinsip desain yang perlu menjadi dasar organisasi KBUMN ke depan adalah sebagai berikut:

Pengelompokan portofolio BUMN

- Pengelompokan portofolio BUMN dapat menggunakan opsi berdasarkan Tema Strategis untuk jangka pendek, sedangkan secara jangka panjang opsi ideal adalah berdasarkan Obyektif Portofolio BUMN.
- Pembagian portofolio BUMN secara jangka pendek dapat menggunakan opsi Tema Strategis dalam rangka penyesuaian dengan *roadmap* sektoral termasuk konsolidasi holding sektoral yang menjadi fokus Kementerian BUMN saat ini.
- Pembagian portofolio BUMN secara jangka panjang perlu diarahkan selaras dengan Obyektif / *Purpose* Portofolio BUMN sebagai agen pembangunan atau sebagai kontributor finansial.

Pembagian Unit Fungsional dan Bisnis

Fungsi Organisasi Pengelola BUMN kedepannya perlu dikelompokkan ke dalam fungsi korporat, portofolio dan layanan pendukung. Fungsi-fungsi tersebut perlu dipetakan pada sepanjang rantai nilai dan disesuaikan dengan peran Organisasi Pengelola BUMN sebagai Investor, Pembina, dan Pengelola.

Penguatan proses bisnis dan kapabilitas

Proses bisnis dan kapabilitas Organisasi Pengelola BUMN kedepannya perlu diperkuat dengan kapabilitas kunci, antara lain Pengembangan Bisnis Portofolio, Sinergi Bisnis Portofolio, Talent Management, dan *Fund Raising* Portofolio.

Pengambilan keputusan

Kewenangan pengambilan keputusan di Organisasi Pengelola BUMN kedepannya berdasarkan tingkat kepentingan perlu dilimpahkan dari Menteri / CEO kepada pejabat dibawah untuk memastikan kelincahan organisasi.

Pengukuran kinerja

Organisasi Pengelola BUMN kedepannya perlu menetapkan ukuran kinerja berdasarkan *value driver* portofolio yang dikelola. Misalnya, perhitungan aspek kinerja atas *multiplier effect* terhadap pembangunan, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta keunggulan nasional.

Interaksi eksternal

Organisasi Pengelola BUMN kedepannya perlu mengkonsolidasikan akuntabilitas peran strategis yang diperlukan untuk pengelolaan BUMN. Pola hubungan dengan instansi stakeholder seperti dengan DPR, Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis perlu diperjelas agar pengelolaan portofolio dapat

Sebagai langkah awal implementasi kajian ini, dilakukan kegiatan piloting dengan pembentukan Tim Inisiatif Strategis yang bertugas untuk mengawal inisiatif-inisiatif strategis yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN.

Penyempurnaan mekanisme governance organisasi existing sebagai transisi:

- *Standard Operating Procedure* (SOP)
- Standar Layanan
- Pra-kajian Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pengelola BUMN

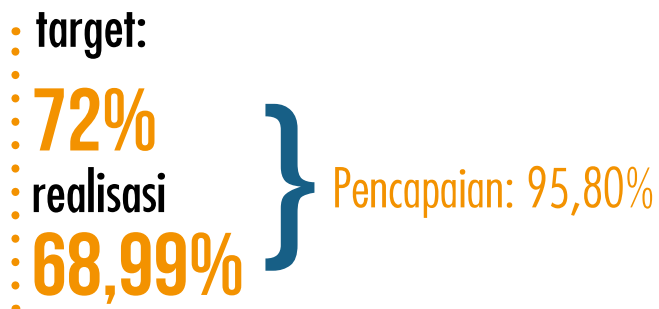
Evaluasi dan penyempurnaan SOP telah dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-09/MBU/S/2017 tentang Penetapan *Standard Operating Procedure* (SOP) Proses Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara.



Sasaran Strategis 9

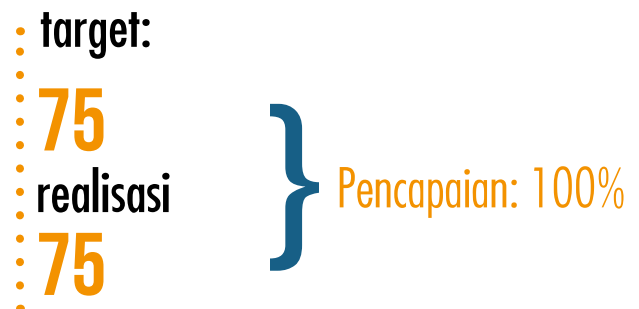
Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Baik dan Bersih

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2017	% Pencapaian
Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian BUMN	72	68,99	95,80%
Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN	75	75	100%
Nilai inisiatif Anti Korupsi	76	76	100%



1. Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian BUMN

IKU ini bertujuan agar Kementerian BUMN dapat memiliki akuntabilitas kinerja yang baik, taat kebijakan, mengimplementasikan budaya kerja, hasil kerjanya optimal, dan memiliki sistem informasi manajemen kinerja untuk pertanggungjawaban. Melalui penerapan SAKIP instansi pemerintah diharapkan dapat merencanakan hasil atau *outcome* yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mengukur capaian serta melaporkan kerjanya secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas pada publik. Nilai pada tabel didapatkan pada *meeting* terakhir dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nilai *assessment* tersebut belum final score karena masih dalam revisi oleh Kementerian PAN dan RB.



2. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN

Untuk mendukung program reformasi birokrasi, Kementerian BUMN dituntut untuk selalu dapat membangun organisasi yang *Good Governance* dan *Clean Government*. Untuk melihat sejauh mana kesesuaian reformasi birokrasi yang dijalankan Kementerian BUMN dalam memenuhi harapan masyarakat, maka diperlukan adanya penilaian atas pelaksanaan program-program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian BUMN dengan menggunakan metode penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrument penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assessment*) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Model PMPRB ini menitikberatkan penilaian pada 2 (dua) komponen utama yaitu Komponen Pengungkit (*Enablers*) meliputi kriteria kepemimpinan, perencanaan strategik, SDM aparatur, kemitraan dan sumber daya, serta proses; dan Komponen Hasil (*Result*) yang terdiri dari kriteria hasil pada masyarakat/ pengguna layanan, kriteria hasil pada komunitas lokal, nasional dan internasional, kriteria hasil pada sumber daya manusia aparatur, dan kriteria hasil kinerja utama. IKU ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian BUMN. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (*maximize*), di mana capaian yang makin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.

target:

76
realisasi
76,23

} Pencapaian: 100,3%

3. Nilai Inisiatif Anti Korupsi

Kegiatan penilaian inisiatif anti korupsi telah dilaksanakan pada bulan Desember 2017. Dalam Program Penilaian Inisiatif Anti Korupsi, Kementerian BUMN melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan insisiatif anti korupsi sebagai upaya untuk mencapai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal tersebut sebagai wujud kesungguhan Kementerian BUMN dalam meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan K/L dan Pemerintah Daerah. Dari skor 1 sampai dengan 100.



Sasaran Strategis 10

Tersedianya informasi yang handal,
valid, dan mudah diakses

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2017	% Pencapaian
Ketersediaan data BUMN yang valid melalui portal	90%	92%	102,2%
Persentase Pencapaian Service Level Agreement Index (SLAI) system informasi	90%	98,77%	109,7%
Persepsi User terhadap Kemudahan Akses (Skala 1-5)	4	3,86	96,50%
Persentase downtime layanan TIK	≤ 3%	2,34%	128%

: target:

: 90%

: realisasi

: 92%



Pencapaian: 102,2%

1. Ketersediaan data BUMN yang valid melalui portal

Sejak terbitnya Peraturan Menteri Nomor PER-18/MBU/10/2014 tentang Penyampaian Data, Laporan, dan Dokumen Badan Usaha Milik Negara Secara Elektronik serta adanya himbauan-himbauan kepada Keasdepan Pembina BUMN dan BUMN agar tertib menyampaikan data kinerja BUMN melalui portal FIS, maka progress penyampaian data, laporan dan dokumen melalui portal FIS mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Hingga saat ini, terdapat 98 BUMN dan 20 Minoritas yang telah menyampaikan data dan laporan berkala periode tahunan audited TB 2016 secara valid dan lengkap. Selain periode tahunan Audited TB 2016, Bidang Analisis Data juga melakukan pengelolaan data dan laporan berkala periode lainnya yakni:

RKAP Final TB 2017

87 BUMN

88% DARI TARGET

Tahunan Unaudited TB 2016

90 BUMN

92% DARI TARGET

Tahunan Audited TB 2016

98 BUMN

85% DARI TARGET

Triwulan I TB 2017

107 BUMN

93% DARI TARGET

Semester I TB 2017

107 BUMN

93% DARI TARGET

Triwulan III TB 2017

90 BUMN

78% DARI TARGET

target:
90%
realisasi
98,77% } Pencapaian: 109,7%



2. Persentase Pencapaian Service Level Agreement Index (SLAI) system informasi

Bidang Teknologi Informasi menggunakan aplikasi berbasis open source untuk mengukur pelaksanaan SLA yang bernama GLPI (*Gestionnaire libre de parc informatique*). Aplikasi tersebut digunakan untuk mencatat permasalahan yang muncul dari user dan menghasilkan nomor ticket untuk setiap permasalahan. Aplikasi tersebut dapat diakses di <http://netmon.BUMN.go.id/glpi>. Sebagai jaminan atas keberlangsungan pelayanan, maka telah ditetapkan Standar Pelayanan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian BUMN sesuai dengan Nomor: PERJ-01/S.MBU/2012 dan PERJ-01/D5.MBU.4/2012 pada tanggal 17 Desember 2012 yang kemudian telah diterbitkan juga Katalog Layanan Teknologi Informasi Komunikasi untuk melengkapi standar pelayanan sistem informasi sebagai dokumen terstruktur yang berisi informasi mengenai semua layanan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang tersedia di Kementerian BUMN.

Aplikasi GLPI ini merupakan aplikasi siap pakai yang dikembangkan oleh pihak ketiga (*third party application*). Dalam implementasinya pada tahun 2017 Triwulan IV, pengguna di Bidang Teknologi Informasi sebanyak 18 pengguna, yang terdiri dari Kabid Teknologi Informasi, Kasubbid Infrastruktur dan Pemeliharaan TI, Kasubbid Perencanaan dan Kebijakan TI, Kasubbid Pengembangan TI, Analis Informatika, Analis Sistem Informasi dan Jaringan, helpdesk officer, technical support, application support, programmer dan system administrator. Implementasi SLA pada tahun 2017 Triwulan IV dimaksud kemudian diinputkan ke dalam aplikasi GLPI yang menampilkan hasil analisis sebagai berikut:

Status Tiket	Jumlah Tiket 2017	Persentase
Ticket Solved + Closed	2642	98,77%
Processing/Ticket Not Solved	24	0,90%
Pending	9	0,34%
Opened Ticket	2675	100%



Jenis - jenis SLA	Jumlah Tiket 2017	Persentase
Layanan Aplikasi diluar aplikasi milik KBUMN	93	3.48%
Layanan Aplikasi SMS Gateway	0	0%
Layanan Aplikasi OA	<u>274</u>	10.24%
Layanan <i>Desktop</i>	693	25.91%
Layanan Email	109	4.07%
Layanan <i>File Sharing</i>	<u>31</u>	1.16%
Layanan Jaringan & Internet	311	11.63%
Layanan Konsultasi TI dan Otomasi Sistem	61	2.28%
Layanan Multimedia	<u>14</u>	0.52%
Layanan Pelatihan TI	12	0.45%
Layanan Telekomunikasi	51	1.91%
Layanan Perangkat Data Center	<u>38</u>	1.42%
Layanan Portal ASET	133	4.97%
Layanan Portal FIS	82	3.07%
Layanan Portal PKBL	201	7.51%
Layanan Portal Publik	132	4.93%
Layanan Portal SDM	92	3.44%
Perbaikan Bug dan Error	<u>97</u>	3.63%
Perbaikan Bug dan Error	9	0.34%
Layanan Aplikasi Digital Map	44	1.64%
Layanan Aplikasi Untuk Negeri	198	7.40%
<i>Un-Categories SLA</i> *)	2675	100%
Total :	93	3.48%

*) *Uncategories SLA* berupa administrasi naskah kedinasan dan aktivitas-aktivitas nya yang belum terkategori

Dari hasil pengukuran yang tercatat dalam aplikasi GLPI sampai dengan 31 Desember 2017, atas layanan SLA yang terselesaikan mencapai 98,77%. Jumlah permasalahan/permintaan Layanan Sistem Informasi sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebanyak 2642 tiket, dengan permasalahan terbesar adalah untuk layanan *desktop*, Layanan Jaringan & Internet dan layanan Aplikasi OA.

target:

4

realisasi

3,86



Pencapaian: 96,50%



3. Laporan hasil survey atas layanan Teknologi Informasi Kementerian

Survei Kepuasan Pengguna ditujukan untuk mengetahui pendapat dan harapan mengenai Produk dan Layanan TI KBUMN yang telah diberikan oleh Penyedia sesuai dengan yang tercantum di dalam Service Level Agreement.

- Mengukur tingkat kepuasan (S) dan tingkat kepentingan (I) terhadap 4 (empat) aspek untuk Layanan Teknologi Informasi, yaitu: kemudahan akses, Service Level Agreement (SLA), produk/ layanan TI, dan pelatihan.
- Mengukur persepsi dan ekspektasi unit kerja penerima layanan TI mengenai layanan TI yang telah diberikan oleh unit kerja TI dan juga persepsi unit kerja TI mengenai layanan yang telah diberikan.

Berdasarkan hasil survei, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Pencapaian tingkat kepuasan (S) layanan TI Kementerian BUMN tahun 2017 adalah 96% dibandingkan dengan target.
- Tidak terdapat perbedaan signifikan persepsi antara Unit Kerja User dan Unit Kerja TI untuk *average response score* terhadap tingkat kepuasan (S) dan tingkat kepentingan (I).
- Sekitar 24.79% - 36.88% range jawaban berada di angka 1 – 3 (di bawah target) untuk tingkat kepuasan (S).
- Sekitar 63.12% – 75.21% range jawaban berada di angka 4 – 5 (sesuai target) untuk tingkat kepuasan (S).
- Total *average response score* tingkat kepuasan (S) untuk setiap pernyataan sebagian besar berada di area “memuaskan” dengan *average response score*-nya sebagian besar masih < 4, dan sebagian kecil berada di area “netral” dengan *average response score* < 3.5. Sehingga secara keseluruhan Total Average Score adalah 3.86, dimana sudah mendekati target 4.
- Berdasarkan point no a, c & e dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan (*gap*) untuk mencapai Target (*Average Response Score* < Target (Score 4 – Memuaskan) untuk sebagian besar pernyataan, sehingga harus dilakukan perbaikan/ peningkatan terhadap semua komponen-komponen tersebut.

target:

≤ 3%

realisasi

2,34%



Pencapaian: 128%

4. Laporan downtime layanan TIK

Durasi downtime layanan pada Tahun 2017 Triwulan I s.d IV selama 51 jam atau sebesar 2,34%. Downtime layanan TIK tersebut disebabkan oleh perangkat jaringan error, gangguan koneksi fiber optik dari provider, dan AC presisi error.



Sasaran Strategis 11

Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2017	% Pencapaian
Persentase Pemanfaatan Anggaran	90%	95,20%	105,78%
Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP	WTP	100%

target:

90%

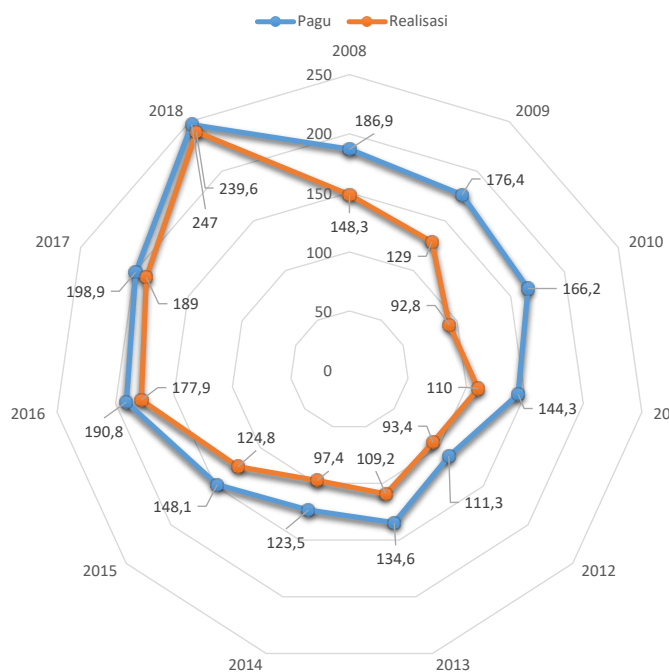
realisasi

95,20%

Pencapaian:
105,78%

1. Persentase Pemanfaatan Anggaran

Pada tahun 2017, Kementerian BUMN telah menetapkan target sebesar 90% dimana PAGU awal Kementerian BUMN adalah Rp 243.865.072.000,-. Terdapat penghematan anggaran menjadi sebesar Rp 198.865.072.000,- yang telah terealisasi pada akhir tahun dengan persentase 95,20% atau sebesar Rp 188.958.923.914,-.



target:

WTP
realisasi
WTP



Pencapaian: 100%



2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN

Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun 2017 disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:222/PMK.05/2016 serta berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kementerian BUMN berharap bahwa opini Laporan Keuangan Tahun 2017 mendapatkan WTP sama seperti Laporan Keuangan Tahun 2016 sehingga dapat mempertahankan prestasi akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sedangkan untuk saat ini proses audit oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2017 masih berlangsung hingga bulan Mei 2018 mendatang.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian BUMN. Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIBA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN digunakan untuk mencatat dan mengorganisasi barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Selain mengelola DIPA Bagian Anggaran 041, Kementerian BUMN juga mendapatkan DIPA BA 999.03 (Penyertaan Modal Negara) yang dilaporkan terpisah dari laporan keuangan.

Kementerian BUMN menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. IKU ini bertujuan agar terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara dimana Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Negara harus disusun dengan prinsip-prinsip tepat waktu dan mengikuti standar akuntansi Pemerintah yang telah diterima secara umum.



Peningkatan Nilai dan Kontribusi BUMN

hal.
62 Holding BUMN

hal.
63 Restrukturisasi BUMN

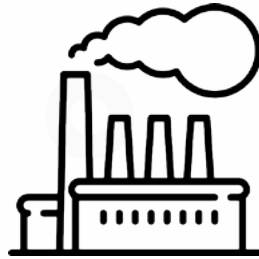
hal.
64 *Financial
Performance*

hal.
65 Kontribusi BUMN





Holding BUMN

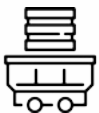


Pada tahun 2017, Kementerian BUMN telah berhasil merealisasikan pembentukan Holding BUMN Pertambangan. Pembentukan Holding BUMN Pertambangan merupakan salah satu langkah strategis menuju terwujudnya BUMN yang “besar, kuat, dan lincah”. Pembentukan Holding BUMN Pertambangan diharapkan dapat mendukung program - program pemerintah antara lain mewujudkan hilirisasi industri pertambangan di Indonesia.

Latar Belakang Pembentukan Holding BUMN Pertambangan



Sumber daya dan cadangan mineral dan batu bara yang besar, namun mayoritas sumber produksinya dikuasai oleh asing/swasta.



Peningkatan nilai tambah dari sumber daya alam mineral yang diproduksi belum optimal



Keterbatasan kemampuan BUMN Pertambangan untuk melakukan investasi



Skala BUMN Pertambangan relatif masih lebih rendah dibandingkan perusahaan tambang domestik maupun regional



Masing - masing BUMN Pertambangan masih fokus pada satu atau beberapa komoditas sehingga lebih rentan terhadap fluktuasi harga komoditas

Tujuan Pembentukan Holding BUMN Pertambangan

Strategi Jangka Pendek

1. Menciptakan efisiensi biaya setelah adanya sinergi
2. Meningkatnya kemampuan finansial dan adanya akses terhadap pendanaan
3. Diversifikasi produk untuk membuat perusahaan lebih kuat dalam menghadapi volatilitas harga komoditas
4. Terciptanya Business Scale untuk dapat bersaing di regional dan internasional

Strategi Jangka Panjang

1. Melakukan akuisisi atas sumber daya yang dimiliki oleh asing/swasta
2. Sinergi untuk mendorong terjadinya hilirisasi

Restrukturisasi BUMN



Restrukturisasi adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Adapun langkah-langkah restrukturisasi yang telah dilakukan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

PT Djakarta Lloyd (persero)

- Penyelesaian kewajiban perpajakan sebesar Rp 152 Miliar.
- Peningkatan *performance* keuangan dimana laba bersih meningkat dari Rp 30 miliar (2016) menjadi Rp 60 miliar (2017)
- *Clearence Balance Sheet* atas BPYBDS
- Efisiensi melalui perampingan organisasi

PT Primissima

- Penyelesaian kewajiban perpajakan sebesar Rp 17,6 miliar
- Peningkatan *performance* keuangan dimana sebelumnya pada tahun 2016 mengalami kerugian Rp 9,08 miliar menjadi laba Rp 2,4 miliar pada tahun 2017.
- Menginisiasi sinergi dengan BUMN lain dalam rangka peningkatan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan modal kerja perusahaan.

PT ISN

- Penyelesaian kewajiban perpajakan sebesar Rp 33,7 miliar
- Penyelesaian seluruh kewajiban terhadap karyawan dan utang deviden
- Efisiensi melalui perampingan organisasi
- Menginisiasi program sinergi dengan BUMN lain untuk peningkatan pendapatan
- Mengkaji potensi/transformasi bisnis perusahaan
- Peningkatan *performance* keuangan dimana laba bersih meningkat dari Rp 53,1 miliar di tahun 2016 menjadi Rp 107,7 miliar di tahun 2017

PT Nindya Karya

- *Performance* keuangan sudah baik, laba bersih meningkat dari Rp 68,62 miliar (2016) menjadi Rp 208,8 miliar (2017)
- Ekuitas perusahaan mengalami peningkatan dari sebesar Rp 608,67 miliar (2015) menjadi sebesar Rp 950,92 miliar (2017) sehingga lebih kompetitif dalam mengikuti tender
- Perusahaan sudah mampu untuk memperoleh pendanaan dari eksternal melalui penerbitan MTN sebesar Rp 300 miliar untuk modal kerja
- Melakukan pengembangan usaha melalui optimalisasi aset untuk dibangun hotel

Financial Performance



Sebagai agen pembangunan, BUMN harus besar, kuat dan lincah agar bisa mengemban tugas dari negara sebagai alat negara untuk menggerakkan ekonomi. Peningkatan nilai BUMN ini juga merupakan salah satu indikator dari keberhasilan atas pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN. Kinerja keuangan BUMN diukur berdasarkan beberapa indikator utama antara lain nilai aset, laba, ekuitas dan belanja modal. Pada tahun 2017 kinerja keuangan BUMN meningkat cukup baik jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana table di bawah ini.

Aset (Rp Triliun)

7.233



Ekuitas (Rp Triliun)

2.398



Laba (Rp Triliun)

172



Belanja Modal (Rp Triliun)

301



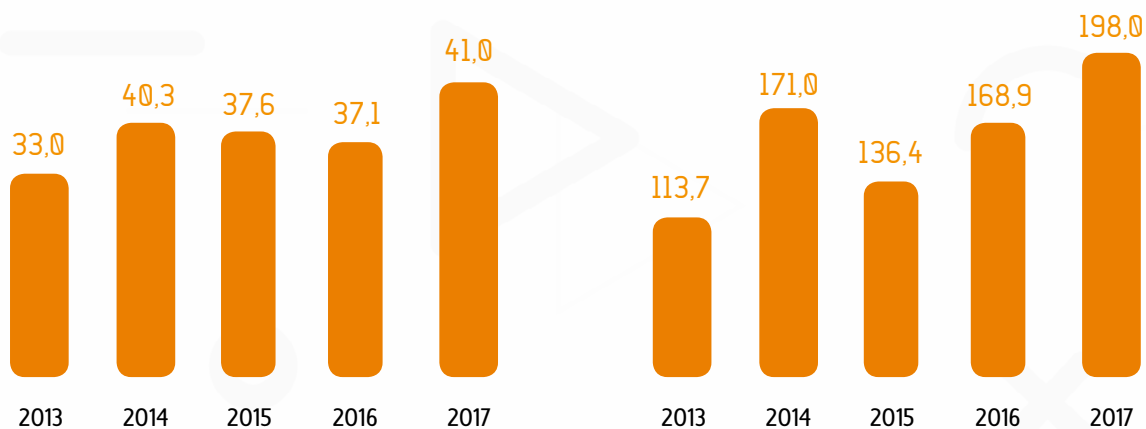
Realisasi nilai aset dan ekuitas tahun 2017 sudah mencapai target tahun 2017 namun untuk realisasi nilai laba dan belanja modal masih di bawah target masing-masing 87% dan 64%.

Kontribusi BUMN



Sebagai dampak dari perkembangan positif kinerja BUMN, kontribusi BUMN terhadap Negara baik dalam bentuk dividen, pajak maupun PNPB lainnya terus meningkat. Dari sisi pembayaran dividen terus mengalami peningkatan khususnya tahun 2013-2016. Dalam periode tersebut, kontribusi BUMN dari pembayaran dividen terhadap negara meningkat rata-rata sebesar 5,2 persen per tahun. Sejalan dengan hal tersebut, pendapatan bagian laba BUMN meningkat dari Rp34,0 triliun (2013) menjadi Rp37,1 triliun (2016). Pada tahun 2015, terdapat kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan peran BUMN sebagai *agent of development* dalam rangka mendukung program prioritas Pemerintah (Nawa Cita) terutama dalam bidang kedaulatan energi, kedaulatan pangan, serta pembangunan infrastruktur dan maritim. Untuk itu, Pemerintah menerapkan kebijakan pay out ratio yang tepat untuk mendukung penguatan permodalan BUMN sehingga target pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp41,0 triliun atau lebih tinggi 10,0 persen dari rata-ratanya pada periode 2013—2016.

Peningkatan setoran dividen ini antara lain disebabkan oleh percepatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina.



Kontribusi BUMN dari sisi setoran pajak juga mengalami peningkatan seiring meningkatnya kinerja BUMN. Pada tahun 2017 target dividen dan pajak BUMN mencapai 239 triliun atau 119% dari target sebesar 201 triliun.

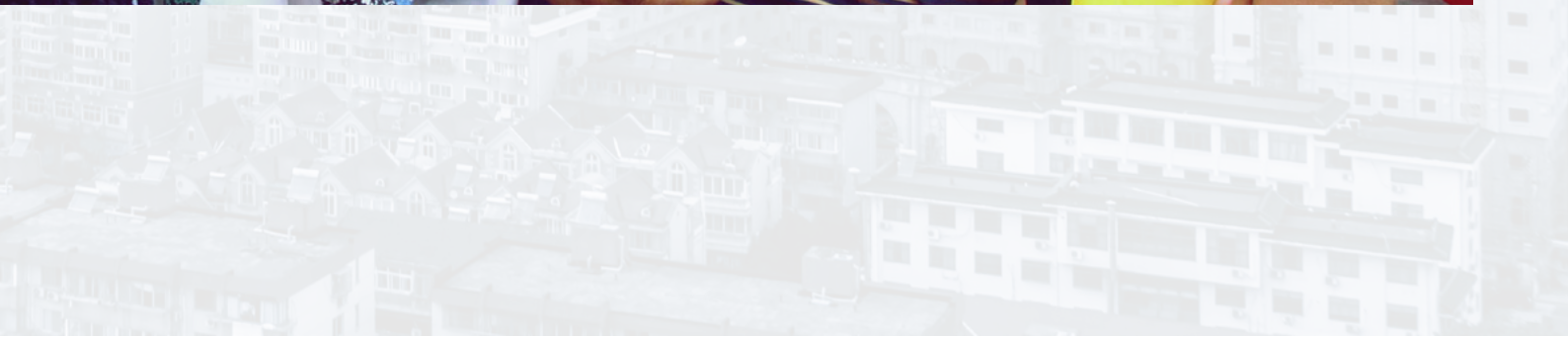
Selain kontribusi berupa setoran dividen dan pajak, BUMN juga berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi kecil dengan program-program kemitraan yang dilakukan BUMN baik menggunakan dana PKBL maupun CSR.

BUMN Hadir untuk Negeri

hal.
68 Program Strategis Nasional

hal.
72 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan





Program Strategis Nasional



Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah melakukan upaya pembangunan di segala sektor yang memiliki urgensi tinggi untuk memberikan efek manfaat bagi rakyat Indonesia, khususnya bagi peningkatan perekonomian daerah dan masyarakatnya yang selama ini belum tersentuh pembangunan.

Badan Usaha Milik Negara sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi mempunyai peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermututinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Kementerian BUMN harus dapat mendukung pengelolaan BUMN sehingga mampu menciptakan BUMN yang sehat dan berdaya saing tinggi. Hal ini sangat penting agar BUMN siap dan mampu bersaing dengan swasta tidak hanya di tingkat nasional akan tetapi di tingkat regional dan internasional.

Salah satu peran pemerintah dalam ekonomi nasional adalah mendirikan BUMN yang ditujukan menjadi agent of development, serta mengambil posisi untuk mencari keuntungan bagi negara. BUMN merupakan milik negara yang pembentukannya ditetapkan dengan UU, termasuk proses Penyertaan Modal Negara (PMN) karena menggunakan uang rakyat. BUMN juga termasuk organisasi hibrida karena diperbolehkan untuk mengelola dua jenis dana yang terdiri atas dana publik dari keuangan negara tersebut dan swasta.

PROYEK STRATEGIS BUMN



Pada tahun 2017, Kementerian BUMN telah berhasil melaksanakan Proyek Strategis Nasional meliputi 15 sektor diantaranya: Jalan (74 Proyek), Bendungan (54 Proyek), Kawasan (30 Proyek), Kereta Api (23 Proyek), Energi (12 Proyek), Pelabuhan (10 Proyek), Pengelolaan air (9 Proyek), Bandar Udara (8 Proyek), Irigasi (7 Proyek), Smelter (6 Proyek), Teknologi (3 Proyek), Perumahan (3 Proyek), PLBN (3 Proyek), Kelautan (1 Proyek), Tanggul Laut (1 Proyek), Industri Pesawat (1 Proyek).

Untuk melaksanakan dan membangun proyek - proyek tersebut diperlukan pembiayaan yang besar yang bersumber dari internal (ekuitas) dan eksternal (leverage/pinjaman). Kementerian BUMN bersama - sama dengan BUMN menyusun alternatif pendanaan pada tahun 2017 antara lain: (1) domestic securitization; (2) domestic project bonds; (3) global IDR bonds; dan (4) global equity offering.

Sedangkan untuk mendukung pendanaan internal BUMN, pemerintah memberikan dukungan berupa tambahan PMN, antara lain untuk tahun 2017 kepada PT Kereta Api Indonesia sebesar Rp 2 triliun yang cair pada akhir tahun untuk mendukung keuangan perusahaan dalam pembangunan LRT Jabodebek.

Proyek Jalan Tol Binjai

Jalan Tol Medan-Binjai merupakan bagian dari JalanTol Trans Sumatera (JTTS) yang akan menghubungkan koridor-koridor ekonomi di Sumatera Utara. Ruas ini di bagi menjadi 3 seksi dan akan berlokasi di Sumatera Utara menghubungkan Kota Medan dengan Binjai. Ketiga seksi yang dimaksud adalah: (1) Seksi I: Tanjung Mulia; (2) Seksi II: Tanjung Mulia – Semayang; (3) Seksi III Semayang – Binjai.

Proyek jalan Tol Binjai memiliki jumlah keseluruhan nilai investasi sebesar 1,064 Miliar dengan sumber dana 40,56% dari ekuitas dan 59,44%. Pelaksana proyek tersebut ialah PT Utama Karya Infrastruktur. Per 30 September 2017 relaisasi proyek telah menyelesaikan pembangunan fisik sebesar 71,52%

Proyek Jalan Tol Palembang – Indralaya

Jalan Tol Palembang-Indralaya merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang akan menghubungkan koridor-koridor ekonomi di Sumatera Selatan. Ruas ini adalah salah satu ruas yang terletak di Sumatera Selatan dengan panjang total 22 Km dan terbagi kedalam tiga seksi: (1) Seksi I: Palembang – IC Pemulutan; (2) Seksi II: IC Pemulutan – IC KTM; (3) Seksi III: IC KTM – Simpang – Indralaya. ini diharapkan dapat mengakomodir proyeksi pertumbuhan lalu lintas harian antara Kota Palembang dengan Indralaya di sisi barat daya Kota Palembang. Dengan adanya jalan tol ini, volume kendaraan akan terbagi dan mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan serta aksesibilitas menuju dan dari Indralaya serta Palembang.

Proyek jalan Tol Palembang – Indralaya memiliki jumlah keseluruhan nilai investasi sebesar 3301 Triliun dengan sumber dana 70% dari ekuitas dan 30%. Pelaksana proyek tersebut ialah PT Utama Karya Infrastruktur. Per 30 September 2017 relaisasi proyek telah menyelesaikan pembangunan fisik sebesar 67,97%.

Proyek Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar

Ruas ini adalah salah satu ruas yang terletak di Sumatera Selatan dengan panjang total 140,9 km. Ruas ini terbagi kedalam tiga seksi: (1) Seksi I: Bakauheni – Sidomulyo; (2) Seksi II: Sidomulyo – Branti; (3) Seksi III: Branti – Terbanggi Besar. Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar diharapkan mampu menghubungkan koridor-koridor ekonomi di Sumatera dan Jawa karena merupakan akses pertama bagi kendaraan yang masuk dari Pelabuhan Merak menuju Lampung melalui Pelabuhan Bakauheni

Proyek jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar memiliki jumlah keseluruhan nilai investasi sebesar 16.795 Triliun dengan sumber dana 52% dari ekuitas dan 48%. Pelaksana proyek tersebut ialah PT Utama Karya Infrastruktur. Per 30 September 2017 relaisasi proyek telah menyelesaikan pembangunan fisik sebesar 47,36%.

Proyek Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu

Jalan Tol sepanjang 21,04 km ini diharapkan dapat menjadi jalur alternatif lalu lintas antara Bekasi dan Jakarta sehingga dapat mengurangi beban pada jalur yang sudah ada.

Proyek jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu memiliki jumlah keseluruhan nilai investasi sebesar 16.795 Triliun dengan sumber dana 100% Investasi. Pelaksana proyek tersebut ialah PT Waskita Karya. Per 30 September 2017 relaisasi proyek telah menyelesaikan pembangunan fisik sebesar 93,34%.

Proyek Tol Kanci – Penjagaan

Jalan tol Kanci-Pejagan adalah bagian dari jaringan jalan tol Trans Jawa. Jalan tol ini menghubungkan Kanci yang berada di Cirebon hingga Pejagan di Brebes, melintasi kota dan Kabupaten Cirebon, serta Kabupaten Brebes. Proyek jalan Tol Proyek Tol Kanci – Penjagaan memiliki jumlah keseluruhan nilai investasi sebesar 3 Triliun dengan sumber dana Ekuitas 30% dan Pinjaman 70%. Pelaksana proyek tersebut ialah PT Waskita Karya. Per 30 September 2017 relaisasi proyek telah menyelesaikan pembangunan fisik sebesar 100%.

Kereta Cepat Jakarta – Bandung

Pembangunan jalur kereta cepat antara Jakarta –Bandung sepanjang 142,3 km ini akan dimulai dari Halim, lalu menuju Karawang, lalu ke Walini, dan ke Tegal Luar. Kota-kota tersebut merupakan sebagai transit oriented development (TOD) dengan panjang rel sekitar 142,3 kilometer. Proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif. Dengan adanya proyek ini, perekonomian masyarakat yang dilalui jalur kereta cepat akan terangkat. Bahkan, bagi pemerintah Jawa Barat, terbangunnya proyek transportasi masal ini akan memunculkan titik-titik ekonomi baru. Selain berdampak pada perekonomian masyarakat, proyek ini juga akan mengangkat sektor pariwisata. Proyek kereta cepat ini juga padat karya, karena membutuhkan tenaga kerja yang banyak.

Proyek tersebut memiliki nilai investasi sebesar 80,2 triliun Ekuitas 25%, PT PSBI sebesar Rp12.02 Triliun, Beijing Yawan HSR Co. Ltd sebesar Rp8,02 Triliun dan Dana Pinjaman 75%. Progress tahun berjalan adalah pembebasan lahan 54,4%

Pengembangan Kereta Api Soekarno – Hatta

Proyek Kereta Ekspres Bandara merupakan pembangunan moda transportasi alternatif menuju Soekarno-Hatta International Airport (SHIA). Stasiun Manggarai–Stasiun Sudirman–Stasiun Duri–Stasiun Batu Ceper–Bandara Soekarno Hatta. Proyek ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan akses dari dan ke Bandara SHIA, mendukung pertumbuhan permintaan BandaraSHIA, dan mendorong ekonomi lokal dan nasional. Keuntungan ekonomi dari proyek ini diantaranyaadalah mendorong peningkatan aktivitas komersial dan industrial di jalur tersebut serta peningkatan lapangan kerja bagi penduduk lokal. Proyek tersebut memiliki nilai investasi sebesar 2.6 triulan. Pemilik proyek tersebut ialah Waskita Karya dan pengelola nya ialah PT KAI. Kereta api bandara telah diresmikan pada awal tahun oleh Presiden RI

LRT Sumatera Selatan

Salah satu modal transportasi massal berbasis rel yang ramah lingkungan terintegrasi di ProvinsiSumatra Selatan. Keberadaan kereta api ringan atau light rail transif (LRT) di Kota Palembang akanbanyak memberi manfaat. Salah satunya, untuk memperlancar arus transportasi. Nilai Investasi proyek ini adalah 10,9 Triliun berasal dari APBN (Prasarana) dan PT KAI (Sarana). Progress proyektersebut per juni 2018 dengan konstruksi 64%

Pembangunan Kawasan Pariwisata Mandalika, Lombok

Landasan pembangunan proyek ini mengacu pada PP Nomor 52 Tahun 2014 mengenai pembentukan kawasan ekonomi (KEK) Mandalika. Membantu pemerintah dalam pembangunan nasional khususnya di bidang perekonomian melalui penciptaan destinasi wisata baru yang bertaraf internasional.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan



Kementerian BUMN dan BUMN sebagai bagian dari masyarakat bernegara, telah melaksanakan program “BUMN Hadir untuk Negeri” secara berkesinambungan sejak tahun 2015. Sebagai komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan dan memupuk rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia kepada seluruh masyarakat di seluruh pelosok Negeri, Kementerian BUMN dan BUMN kembali mewujudkan “BUMN Hadir untuk Negeri” pada tahun 2017.

Tujuan dari “Program BUMN hadir Untuk Negeri” adalah Untuk menanamkan rasa bangga sebagai bangsa yang memiliki keragaman kekayaan Nusantara serta sebagai wujud nyata peran BUMN di masyarakat. Pelaksanaan kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN dan difasilitasi oleh seluruh BUMN yang memiliki wilayah kerja di 34 Provinsi seluruh Indonesia, juga menjadi bagian dalam “membangun pemahaman para pemangku kepentingan (*stakeholders*)” mengenai peran Kementerian BUMN dan BUMN sebagai Agen Pembangunan (*Agent of Development*) untuk turut serta “Membangun Kapasitas Nasional (*National Capacity Building*)”. Para peserta maupun pemangku kepentingan diharapkan akan memiliki pandangan yang baik tentang Kementerian BUMN dan seluruh BUMN Indonesia, yang telah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa, melalui kerja nyata yang berdampak langsung.

Program “BUMN hadir Untuk Negeri” tahun 2017 diantaranya Upacara, Jalan Sehat, Bedah Rumah Veteran, dan Siswa Mengenal Nusantara, seluruh kegiatan tersebut telah dilaksanakan di 34 Provinsi di Indonesia.



1. Upacara

Upacara Peringatan HUT RI bertujuan untuk turut memeriahkan peringatan HUT RI bersama masyarakat.

- 1 Upacara Peringatan HUT RI dilaksanakan di Kabupaten / Kota dalam provinsi yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - Belum pernah dilaksanakan tahun sebelumnya
 - Bukan di ibukota Provinsi
 - Terdapat kantor BUMN
 - Sedapat mungkin di daerah perbatasan / daerah Terpencil
- 2 Direktur Utama BUMN Koordinator Provinsi sebagai Inspektur Upacara
- 3 Peserta upacara yang diundang:
 - Seluruh/perwakilan pegawai BUMN di provinsi tersebut;
 - Pendamping dari Kementerian BUMN
 - Veteran penerima bantuan Bedah Rumah, dan LVRI setempat.
 - Perwakilan Pemerintah Daerah Setempat.
- 4 Pakaian upacara: Kemeja putih, Celana gelap
- 5 Susunan Acara Upacara :
 - Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi Lagu Indonesia Raya;
 - Pembacaan Pembukaan UUD 1945, Pancasila, Proklamasi;
 - Pembacaan kata-kata mutiara (dipilih oleh BUMN);
 - Menyanyikan lagu nasional;
 - Pembacaan Doa;



2. Bedah Rumah Veteran

Tujuan kegiatan BRV adalah untuk mewujudkan rasa penghargaan BUMN pada para veteran atas jasa-jasanya memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Program BRV telah dilaksanakan sejak tahun 2015, yaitu sejumlah 990 rumah pada tahun 2015, dan 1.443 rumah pada tahun 2016. Kegiatan BRV dilakukan dengan cara/metode berupa:

- BRV dilaksanakan oleh BUMN Koordinator dan Anggota Provinsi.
- Kementerian BUMN berkoordinasi dengan Legiun Veteran RI terkait dengan daftar rumah yang akan dibedah.
- BUMN Koordinator berkoordinasi dengan Legiun Veteran RI setempat, ZENI-TNI setempat terkait dengan pemilihan rumah yang akan dibedah.
- Bantuan bedah rumah diberikan dalam bentuk natura yang pembangunannya dapat dilakukan bekerjasama dengan ZENI-TNI, TNI teritorial atau Kontraktor (apabila mengalami kesulitan).
- Nilai bedah rumah sederhana adalah kurang lebih Rp 40 juta per rumah.
- Rumah Veteran diperbaiki dengan standar atap yang layak, lantai keramik, MCK, pengecatan dinding, ventilasi yang layak, dapur, ruang tidur dan ruang tamu.
- Kegiatan dilaksanakan dimulai bulan Januari sampai dengan Agustus (diharapkan sudah ada sarana yang telah diselesaikan dan diserahkan pada upacara peringatan HUT RI).

3. Jalan Sehat 5 Km

Jalan Sehat 5 KM bertujuan untuk memeriahkan peringatan HUT RI, serta menumbuhkan kebersamaan. Tata Cara pelaksanaan Jalan Sehat diserahkan sepenuhnya kepada BUMN Koordinator Provinsi, dengan tetap memperhatikan efisiensi biaya.



4. Siswa Mengenal Nusantara

Tujuan program Siswa Mengenal Nusantara (SMN) adalah untuk menanamkan rasa bangga dan cinta tanah air sejak dini kepada siswa SMA/SMK/SLB. Keragaman kekayaan Nusantara dan potensi daerah diperkenalkan melalui interaksi langsung siswa dengan komponen Pemerintahan dan masyarakat di provinsi yang dikunjungi. Program SMN telah dilaksanakan sejak tahun 2015, dengan diikuti oleh 632 siswa pada tahun 2015 dan 679 siswa pada tahun 2016.

Wawasan yang disampaikan:

- Wawasan Sosial Budaya berisi materi pengenalan tentang aspek budaya, pariwisata dan juga tatanan sosial kemasyarakatan di daerah setempat. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan keberagaman budaya nusantara dan juga menanamkan nilai-nilai sosial kemanusiaan dalam tatanan masyarakat Indonesia
- Wawasan Pendidikan berisi materi pengenalan tentang sistem pendidikan berkualitas yang diselenggarakan oleh sekolah setempat baik sekolah umum (SMU), sekolah khusus (SMK), universitas maupun sarana pendidikan lain yang diselenggarakan atas inisiatif dan swadaya masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran pada peserta pentingnya sistem pendidikan untuk menghasilkan manusia berkualitas, sebagai awal dari pembangunan bangsa yang kuat dan bermartabat.
- Wawasan Entrepreneurship berisi materi pengenalan tentang UKM/Koperasi di daerah pilihan, mulai dari operasional sampai pada produk-nya. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat berkreasi dan berinovasi serta kejelian dalam menangkap peluang, hingga akhirnya mampu bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
- Wawasan pengenalan BUMN berisi materi pengenalan tentang BUMN setempat, mulai dari operasional sampai pada produk-nya, dengan tujuan siswa/i dapat mengenal BUMN. Apabila diperlukan, dapat dilaksanakan kegiatan magang di 1 (satu) BUMN selama 1 (satu) hari.

Transformasi Institusi

hal.
76 Organisasi

hal.
77 Budaya

hal.
77 Kapabilitas







Organisasi

Berdasarkan arahan *purpose*, peran, dan *positioning* seperti di atas, prinsip desain yang perlu menjadi dasar organisasi KBUMN ke depan adalah sebagai berikut:

Pengelompokan portofolio BUMN

- Pengelompokan portofolio BUMN dapat menggunakan opsi berdasarkan Tema Strategis untuk jangka pendek, sedangkan secara jangka panjang opsi ideal adalah berdasarkan Obyektif Portofolio BUMN.
- Pembagian portofolio BUMN secara jangka pendek dapat menggunakan opsi Tema Strategis dalam rangka penyelarasan dengan *roadmap* sektoral termasuk konsolidasi holding sektoral yang menjadi fokus Kementerian BUMN saat ini.
- Pembagian portofolio BUMN secara jangka panjang perlu diarahkan selaras dengan Obyektif / *Purpose* Portofolio BUMN sebagai agen pembangunan atau sebagai kontributor finansial.

Pembagian Unit Fungsional dan Bisnis

Fungsi Organisasi Pengelola BUMN kedepannya perlu dikelompokkan ke dalam fungsi korporat, portofolio dan layanan pendukung. Fungsi-fungsi tersebut perlu dipetakan pada sepanjang rantai nilai dan disesuaikan dengan peran Organisasi Pengelola BUMN sebagai Investor, Pembina, dan Pengelola.

Penguatan proses bisnis dan kapabilitas

Proses bisnis dan kapabilitas Organisasi Pengelola BUMN kedepannya perlu diperkuat dengan kapabilitas kunci, antara lain Pengembangan Bisnis Portofolio, Sinergi Bisnis Portofolio, Talent Management, dan Fund Raising Portofolio.

Pengambilan keputusan

Kewenangan pengambilan keputusan di Organisasi Pengelola BUMN kedepannya berdasarkan tingkat kepentingan perlu dilimpahkan dari Menteri / CEO kepada pejabat dibawah untuk memastikan kelincahan organisasi.

Pengukuran kinerja

Organisasi Pengelola BUMN kedepannya perlu menetapkan ukuran kinerja berdasarkan value driver portofolio yang dikelola. Misalnya, perhitungan aspek kinerja atas multiplier effect terhadap pembangunan, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta keunggulan nasional.

Interaksi eksternal

Organisasi Pengelola BUMN kedepannya perlu mengkonsolidasikan akuntabilitas peran strategis yang diperlukan untuk pengelolaan BUMN. Pola hubungan dengan instansi stakeholder seperti dengan DPR, Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis perlu diperjelas agar pengelolaan portofolio dapat dilakukan secara maksimal.

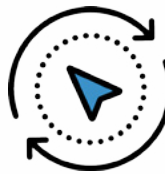


Budaya

Setiap perusahaan atau badan usaha memiliki budaya kerja yang berbeda – beda dalam mencapai visi dan misi. Budaya dapat diklasifikasikan “the way we do” dalam mengejar target yang telah ditetapkan diawal. Setiap budaya kerja tersebut akan menimbulkan sikap antara apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

Budaya kerja telah diturunkan menjadi perilaku, kode etik, tata nilai budaya di Kementerian BUMN. Hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN nomor Per-04/MBU/2012 pada tanggal 9 April 2012. Ada 4 pilar yang menjadi tata nilai/ budaya di Kementerian BUMN yaitu:

1. **Integritas.** Bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan berdasarkan sistem nilai, moral kejujuran, komitmen dan kepatuhan pada peraturan yang ada serta mempertimbangkan benturan kepentingan
2. **Profesional.** Bersikap, bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang mendalam, pengetahuan yang sesuai dan keterampilan yang memadai
3. **Produktivitas.** Bersikap, bertindak dan mengambil keputusan berbasis pada prinsip – prinsip efektivitas dan efesiensi, baik dari sisi waktu, biaya dan sumber daya lainnya
4. **Inisiatif.** Bersikap, bertindak dan mengambil keputusan dengan berlandaskan pada semangat proaktif, kepeloporan, dan perbaikan berkelanjutan



Kapabilitas

Pengembangan kompetensi manajerial dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dalam hal memimpin dan mengelola unit organisasi. Program yang telah diikuti oleh para pegawai terkait dengan kemampuan tersebut yaitu

- Diklat Kepemimpinan yang diselenggarakan oleh LAN,
- Reform Leader Academy yang diselenggarakan oleh LAN,
- Leadership program yang disesuaikan dengan kebutuhan Kementerian BUMN dan telah diikuti oleh seluruh jenjang jabatan antara lain mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi sampai dengan Pelaksana, dan
- Communication program dalam hal membangun partnership internal pegawai untuk membentuk tim kerja yang solid maupun membangun komunikasi dengan para stakeholders, yang diikuti mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi sampai dengan Pelaksana

Pengembangan kompetensi teknis dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan teknis pelaksanaan tugas masing-masing jabatan yang spesifik. Jabatan yang menjadi fokus untuk memperoleh pengembangan secara inhouse adalah jabatan-jabatan utama di Kementerian BUMN. Sedangkan jabatan pendukung, program pengembangannya melalui pengiriman peserta ke public training.

Adapun topik pengembangan kompetensi teknis yang dilakukan secara inhouse training antara lain: (i) *business strategy*, (ii) *good corporate governance*, (iii) *risk management*, (iv) *auditing for non auditor*, (v) *merger dan akuisisi*, (vi) *microsoft excel for advance*, (vii) *infographic for power point*, (viii) *english fluency*.

Pengembangan kompetensi teknis untuk kegiatan pendukung diantaranya berkenaan dengan topik: (i) akuntansi pemerintah dan (ii) sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pada tahun 2017, seluruh pegawai Kementerian BUMN telah memperoleh akses terhadap program pengembangan. Minimal jam pelatihan (jamlat) yang harus diikuti oleh setiap pegawai adalah sebanyak 30 jamlat.



Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian BUMN Tahun 2017 merupakan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di lingkup Kementerian BUMN dalam rangka mencapai tujuan tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan Kementerian BUMN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2017. Sesuai dengan visi, misi, sasaran strategis dan indikator kinerja utamanya, Biro Perencanaan SDM dan Organisasi tengah menjalankan beberapa aktivitas strategis. Dalam situasi dan kondisi dimana Aparatur Sipil Negara yang dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya, tugas Kementerian BUMN dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Namun demikian, dengan Sistem Manajemen Kinerja yang akan terus disempurnakan, aparatur Kementerian BUMN akan berhasil mengatasi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.



Sedangkan langkah ke depan yang perlu dilakukan dalam rangka perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian BUMN adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja aparatur Kementerian BUMN dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pembinaan BUMN antara lain dengan perubahan budaya dan pola kerja dan peningkatan kualitas dan kapasitas selaku Pembina BUMN;
2. Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan Negara melalui peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sebagai salah satu wujud dari pengelolaan Negara yang akuntabel. Di samping itu, Kementerian BUM akan terus melakukan monitoring, review dan tindak lanjut atas setiap temuan audit BPK RI;
3. Melakukan perbaikan-perbaikan sistem dan pengelolaan manajemen kinerja sehingga kinerja setiap unit dan individu dapat terukur serta dapat diberikan reward dan punishment yang sesuai;
4. Melakukan penyempurnaan peraturan tentang akuntabilitas kinerja di internal Kementerian BUMN melalui Peraturan Menteri dan mensosialisasikannya ke seluruh pegawai agar dilaksanakan dan diterapkan dalam setiap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Meningkatkan keterlibatan setiap pegawai dalam mendukung pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan menjadikannya sebagai bagian dari kinerja. Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Kementerian BUMN, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Kementerian BUMN dapat semakin berperan membawa BUMN dalam kancah persaingan global.

Data Capaian Renstra 2012 - 2014

Uraian	2013			2014		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pajak BUMN	Rp 135 T	Rp 113.7 T	84%	Rp 135 T	RP 171 T	127%
Jumlah dividen BUMN	Rp 31 T	Rp 34.02 T	110%	Rp 35 T	Rp 40 T	114%
Persentase pertumbuhan aset BUMN	10%	17.42%	174%	10%	15.30%	153%
Persentase pertumbuhan ekuitas BUMN	10%	6.62%	66%	10%	11.70%	117%
Jumlah belanja modal BUMN	Rp 240 T	Rp 184,36 T	77%	Rp 200 T	RP 255 T	128%
Rata-rata RoA BUMN	4.40%	5.11%	116%	5%	3.28%	66%
Rata-rata RoE BUMN	17.50%	13.30%	76%	15%	14, %	90%
Indeks Kepuasan BUMN	78 point	72.9 point	93%	75 point	74.08 point	99%
Ndas rata-rata GCG BUMN	Baik	Sangat baik	100%	Sangat baik	sangat baik	100%
Jumlah riset/ kajian	25	24	96%	25	29	116%
Pelaksanaan RUPS tepat Waktu	100%	98%	98%	100%	100%	100%
Persentase Penetapan Direksi tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase penetapan Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase ketersediaan kontrak kinerja Direksi BUMN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase ketersediaan kontrak kinerja Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris BUMN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skor SAKIP Kementerian BUMN	60	59.13	99%	65 point	65,10 point	100%
Jumlah rancangan peraturan perundangan di bidang pembinaan BUMN yang disusun/ direvisi/ dicabut	15	24	160%	15	27	180%
Rata-rata pencapaian target kinerja pegawai	85%	85%	100%	85%	85%	100%
Persentase pencapaian SLA penyediaan sarana dan prasarana kinerja	100%	101%	101%	100%	78%	78%
Persentase pencapaian SLA Sistem Informasi	60%	90%	150%	90%	90%	100%
Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi	60	59.13	99%	70%	54.52%	78%
Persentase penyerapan anggaran	85%	81.70%	96%	85%	78.87%	93%
Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%

Data Capaian Renstra 2015 - 2016

Uraian	2015			2016		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Aset BUMN	tumbuh 12%	turnbuh 19%	158%	Rp 5.632 T	Rp 6.325 T	112.3%
Jumlah Laba BUMN	turnbuh 8%	tumbuh 26%	325%	Rp 143 T	Rp 166 T	116.08%
Jumlah Ekuitas BUMN	tumbuh 12%	turnbuh 62%	517%	Rp 1.340 T	Rp 2.235 T	166.79%
Jumlah Capex BUMN	tumbuh 24%	tumbuh 11%	46%	Rp 401 T	Rp 298 T	74.31%
BUMN Yang Masuk Forbes 500	11 BUMN	5 BUMN	45%			
BUMN Yang Masuk Global Fortune 500				3 BUMN	2 BUMN	66.67%
Kontribusi BUMN Terhadap Negara	Rp 227 T	Rp 164 T	72%	Rp 244 T	Rp 206 T	84.43%
Skor Penilaian Kinerja BUMN (KPKU)				35 BUMN masuk kategori Good Performance	22 BUMN masuk kategori Good Performance	62.86%
Persentase penyelesaian pniontas pernbangunan nasional	100%	100%	100%.			
Penentase Pencapaian Roadmap BUMN				2S%	40%	160.00%
Tercapainya SLA Penugasan PSO				93%	105.91%	113.39%

Indeks kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN	80%	0	0%	134%	813.55%	105.42%
Indeks kepuasan instansi pemerintah terkait / stakeholders atas pelayanan Kementerian BUMN				82%	90.2%	110.00%
Nilai rata-rata GCG BUMN	75	81.5	109%	83	86.49	104.20%
Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
Persentase kepatuhan proses operasional BUMN	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
Persentase kepatuhan pelaporan BUMN	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
Terpenuhinya Batas Waktu Penerbitan Shareholder Aspiration letter (SAL)	Agustus 2015	Agustus 2015	100%	Agustus 2016	Agustus 2016	100.00%
Persentase hasil riset/kajian yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan	100%	100%	100%	≥80%	100%	100.00%
Persentase kebijakan kementerian BUMN dengan Pencapaian VISI dan Misi Presiden				100%	100%	100.00%
Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi sesuai standar layanan	80%	100%	125%	100% respons Sesuai batas waktu dalam standar layanan	100,4 respons sesuai batas waktu dalam standar layanan	100%
Penetapan Direksi Sesuai dengan Peraturan				100% penetapan direksi sebelum masa jabatan berakhir	100% penetapan direksi sebelum masa jabatan berakhir	100%
Penyelenggaraan RUPS Tepat Waktu	100%	100%	100%	100% Penyelenggaraan RUPS tepat waktu	100% penyelenggaraan RUPS tepat waktu	100%
Ketersediaan Kontrak Kinerja BUMN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan sesuai dengan SOP	75%	100%	133%			
Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian LHP BPK				100%	100%	100%
Persentase Pelaksanaan Program kerja Pemeriksaan Tahunan				100%	100%	100%
Persentase jumlah BUMN yang di advokasi	44 BUMN	57 BUMN	130%			
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	2 Laporan	2 laporan	100%			
laporan audit operasional dan kepatuhan	3 Laporan	2 laporan	67%			
Tersusunnya program pengembangan masing-masing individu sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan dengan target	100%	100%	100%			
Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan				83%	162.50%	196%
Persentase pencapaian standar kompetensi jabatan				60%	60%	100%
Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan program pengembangan masing-masing individu dengan target	100%	100%	100%			
Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan dengan target		100%	100%			
Persentase pelaksanaan diklat yang sesuai dengan Training Needs Analysis (TNA)				≥ 90%	117.60%	131%
Persentase pencapaian Road Map Transformasi Organisasi	100% program tahun 2015	80% program tahun 2015	80%	25% dari seluruh program	25% dari seluruh program	100%
Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian BUMN	70	65.1	93%	70	66 (prognosa)	94%
Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN	60	65.56	109%	70	79.21 (self assesment)	113%
Nilai Inisiatif Anti Korupsi				73	75.23	103%
Ketersediaan data BUMN yang valid melalui portal	75%	93%	124%	85%	74%	87%
Persentase Pencapaian Service level Agreement index (SLAI) sistem informasi	90%	98.88%	110%	≥ 90%	99.11%	110%
Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses (skala likert 1 -5)	3	37.5	1250%	Rata-rata skala 4	3.8	95%
Persentase downtime layanan TIK	3%	1.26%	158%	≤ 3%	1.02%	166%
Jumlah SOP Prioritas yang Disusun	30 SOP	30 SOP	100%			
Persentase Pemanfaatan Anggaran	90%	84.84%	94%	≥ 90%	93.26%	104%
Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP	WTP	100%	WTP Opini BPK	WTP OPP	75%

Perjanjian Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2017



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rini M. Soemarno

Jabatan : Menteri BUMN

Pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 07 Januari 2017



Menteri Badan Usaha Milik Negara

Rini M. Soemarno

Perjanjian Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2017

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Tahun Anggaran : 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya BUMN sebagai <i>Agent of Development</i> yang besar, kuat dan lincah	Jumlah Aset BUMN	6.951 T Rupiah
		Jumlah Laba BUMN	197 T Rupiah
		Jumlah Ekuitas BUMN	2.395 T Rupiah
		Jumlah Capex BUMN	468 T Rupiah
		BUMN Yang Masuk Global Fortune 500	3 BUMN
		Kontribusi BUMN Terhadap Negara	201 T Rupiah
		Skor Penilaian Kinerja BUMN (KPKU)	50 BUMN masuk kategori Good Performance
		Persentase Pencapaian Roadmap BUMN	100 %
		Tercapainya SLA Penugasan PSO	95 %
2	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Kementerian BUMN	Indeks kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN	90 %
		Indeks kepuasan instansi pemerintah terkait /stakeholders atas pelayanan Kementerian BUMN	84 %
3	Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kementerian BUMN	Nilai rata-rata GCG BUMN	85
		Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN	100 %
		Persentase kepatuhan proses operasional BUMN	100 %
		Persentase kepatuhan pelaporan BUMN	100 %

Perjanjian Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2017



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
4	Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan implementatif	Terpenuhinya Batas Waktu Penerbitan Shareholder Aspiration Letter (SAL)	100%
		Presentase hasil riset/kajian yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan	100 %
5	Pembinaan BUMN yang optimal	Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi sesuai standar layanan	100%
		Penetapan Direksi Sesuai dengan Peraturan	100%
		Penyelenggaraan RUPS Tepat Waktu	100%
		Ketersediaan Kontrak Kinerja BUMN	100 %
6	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara efektif	Persentase Tindak Lanjut LHP BPK	100 %
		Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	100 %
7	Terwujudnya SDM yang kompeten dan profesional	Rata-rata jumlah program pengembangan dan pelatihan yang diikuti oleh masing-masing pegawai	2 Kali
8	Terwujudnya organisasi pengelola korporasi yang modern	Persentase Pencapaian Road Map Transformasi Organisasi	50 %
9	Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik dan bersih	Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian BUMN	75
		Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN	72
		Nilai Inisiatif Anti Korupsi	76
10	Tersedianya informasi yang	Ketersediaan data BUMN yang	90 %

Perjanjian Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2017



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	valid, handal dan mudah diakses	valid melalui portal	
		Persentase Pencapaian Service Level Agreement Index (SLAI) sistem informasi	≥90 %
		Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses (skala likert 1-5)	Rata-rata skala 4
		Persentase downtime layanan TIK	≤2.5 %
11	Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel	Persentase Pemanfaatan Anggaran	≥90 %
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP Opini BPK

Program

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN
 2. Program Pembinaan BUMN
- Total Anggaran

Anggaran

Rp144.571.656.000,00
Rp 99.293.416.000,00
Rp243.865.072.000,00

Jakarta, 07 Januari 2017



Menteri Badan Usaha Milik Negara

Riri M. Soemarno

Pernyataan Telah Direviu



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO.13 TELP (021)2993567, FAKSIMILI (021) 3520463, JAKARTA PUSAT 10110

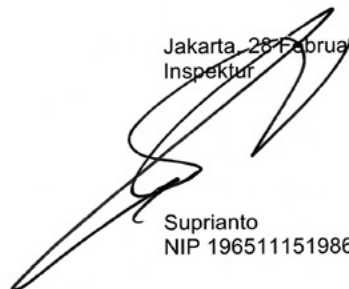
PERNYATAAN TELAH DIREVIU KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk tahun anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 28 Februari 2018
Inspektur



Suprianto
NIP 196511151986031001



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

BUMN
Hadir untuk negeri

Profil BUMN

Informasi dan Komunikasi



Perum Produksi Film Negara

Jl. Otto Iskandardinata 125-127, Jakarta 10330
Telp (62-21) 819-2508, Fax: (62-21) 819-0339
Website: www.pfn.co.id
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government
100%

Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara merupakan pengalihan bentuk dari Pusat Produksi Film Negara, sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Departemen Penerangan RI. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama: peliputan pada momen penting negara dan juga memfokuskan pada produksi dokumenter, animasi, dan penyediaan kebutuhan bagi dunia perfilman Indonesia, seperti: penyewaan studio.



PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

Jl. Japati No. 1, Bandung, Indonesia 40133
Tel. (62-22) 4527101, Fax. (62-22) 4240313
Website: www.telkom.co.id
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government
52,09% Masyarakat / Public 47,91%

Telkom merupakan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang bergerak di bidang layanan jasa dan jaringan telekomunikasi terintegrasi di Indonesia yang beroperasi di dalam dan di luar negeri. Usaha utama perusahaan ini ialah Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan atau menjual, menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dengan memperhatikan perUndang-Undangan yang berlaku. Usaha penunjang perusahaan ini ialah menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.



Perum LKBN ANTARA

Wisma Antara Lt. 18-20
Jl. Merdeka Selatan No. 17 Jakarta 10110
Telp: (62-21) 3802383 Faks: (62-21) 3522178
Website: www.antara.net.id
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government
100%

Pada tahun 2007, status hukum LKBN Antara berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) LKBN Antara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 18 Juli 2007 tentang Perum LKBN Antara. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi usaha di bidang penerimaan berita dari dalam dan luar negeri, seleksi penyuntingan, percetakan dan pendistribusian kepada para pelanggan melalui jaringan telex, paket udara dan kurir. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama: peliputan dan/ atau penyebaran informasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan.



PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Jl. Moch. Toha No. 77 Bandung 40253, Indonesia
Telp. (62-22) 520 1501, Fax. (62-22) 520 2444
Website : www.inti.co.id
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government
100%

Sejak tahun 2009, perusahaan telah memantapkan langkahnya untuk memasuki bisnis solusi engineering, system integrator, dan pengembangan produk-produk genuine. Sebagai sistem integrator, perusahaan memfokuskan diri pada segmen pasar Telco, Celco & Private Enterprise. Perseroan menyelenggarakan kegiatan usaha utama: usaha produksi, perdagangan, dan jasa dalam bidang telekomunikasi.

Jasa Profesional, Ilmiah, Teknis



PT Energy Management Indonesia (Persero)

GGraha Pura Lt.3 Jl. Pancoran Indah I No.52
Jakarta Selatan 12780 - Indonesia
Telp: (62-21) 791 83309 Faks: (62-21) 791 93459
Website: www.emipersero.co.id
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government
100%

PT. Energy Management Indonesia (Persero) atau dulu dikenal sebagai PT Konservasi Energi Abadi (Persero) didirikan pada tahun 1987. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama berupa konservasi energi dan penyediaan fasilitas penyediaan energi terbarukan. Konsep yang ditawarkan adalah End to End Solution yang berarti menyediakan jasa mulai dari konsultasi dan audit hingga penyediaan sistem, peralatan, dan pengoperasiannya.



PT Bina Karya (Persero)

Jl. DI. Panjaitan Kav.12, Cawang, Jakarta Timur 13340
- Indonesia
Tel. (62-21) 8198445, Fax. (62-21) 8197490
Website: www.binakarya.co.id
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government
100%

PT Bina Karya (Persero) (Perusahaan) berdiri tanggal 13 November 1962 melalui Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1962. Kemudian, melalui Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1970 dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi usaha di bidang Konsultan Perencanaan Teknis, Pengawasan dan Manajemen Konstruksi. Perusahaan ini menawarkan pelayanan jasa konsultasi dalam arti yang luas antara lain pekerjaan identifikasi, survei, investigasi, perencanaan, perancangan/ desain, persiapan, pengawasan dan manajemen konstruksi.



PT Indah Karya (Persero)

Jl. Golf No. 2A Ujungberung, Bandung 40294 - Indonesia
Tel. (62-22) 7807971, Fax. (62-22) 7834094
Website: www.BUMN.go.id/indahkarya/
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government
100%

PT Indah Karya (Persero) (Perusahaan) pada awalnya merupakan sebuah perusahaan milik bangsa Belanda bernama Ingenieurs Bureau Ingenegeren Vrijburg NV (IBIV-NV) yang pada tahun 1961 dinasionalisasi menjadi Perusahaan Negara (PN) Indah Karya. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi usaha di bidang konsultan engineering dan perencanaan. Ruang lingkup kegiatan usaha meliputi perencanaan pembangunan, bangunan umum, pengawasan atas pelaksanaan bangunan, bertindak sebagai penasihat dalam arti luas dalam pembangunan serta kegiatan konsultasi bidang manajemen serta kegiatan bidang properti (tahap pengembangan).



PT Virama Karya (Persero)

Jalan Raya Hang Tuah No, 26, Gunung, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12120 - Indonesia
Tel. (62-21) 7397545, Fax. (62-21) 720 4331
Website: www.viramakarya.co.id
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government
100%

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1970, status Perusahaan berubah dari Perusahaan Negara (PN) Virama Karya menjadi PT Virama Karya (Persero). Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi usaha di bidang jasa konsultasi yang meliputi antara lain survei dan investigasi seperti pemetaan udara untuk darat dan laut, topografi, geografi, hidrografi, penginderaan jauh serta penyelidikan teknik geologi, hidrologi, dan studi termasuk studi makro, studi detail, analisa mengenai dampak lingkungan, perencanaan, desain dan persiapan/pengawasan/ pengelolaan/ manajemen untuk konstruksi/ pelaksanaan proyek.

Profil BUMN

Jasa Profesional, Ilmiah, Teknis



PT Yodya Karya (Persero)

Jalan D.I. Panjaitan Kav.8 Cawang,
Jakarta Timur 13340 - Indonesia
Tel. (62-21) 8194038, Fax. (62-21) 8193519
Website: www.BUMN.go.id/yodyakarya
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government
100%

Yodya Karya merupakan perusahaan pertama yang memutuskan untuk memilih bentuk Perusahaan Perseroan (Persero), karena menilai bentuk tersebut sangat tepat serta bermanfaat untuk mengembangkan diri dan berkreasi. Perusahaan melakukan pekerjaan perencanaan dalam bidang bangunan air, bangunan gedung, jalan dan jembatan, lingkungan pemukiman dan tata kota, survei dan pemetaan, pembangkit tenaga dan distribusi listrik, instalasi mekanikal dan pekerjaan yang dipandang sebagai perencanaan dan penasihat bidang teknik, penasihat dan peneliti ekonomi dan melakukan usaha jasa pemeliharaan bangunan, menyediakan tanah matang dan mendirikan bangunan untuk dijual dan disewakan.



PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Jl Yos Sudarso 38-40, Tanjung Priok
Jakarta 14320 - Indonesia
Telp. (62-21) 4301017 Fax. (62-21) 43936175
Website : <http://www.bki.co.id/>
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government
100%

PN. Biro Klasifikasi Indonesia diubah namanya menjadi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 tahun 1977. Perusahaan memeriksa konstruksi, pengawasan dan pengujian serta pencatatan sertifikasi las dan registrasi kapal, memeriksa dan menguji alat-alat apung dan fasilitas konstruksi lepas pantai, menguji dan sertifikasi material dan komponen, menguji dan menerbitkan sertifikasi kualitas juru las, inspektur las dan ahli las, melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi sertifikat statutoria yang mendapat otorisasi dari Pemerintah Republik Indonesia.



PT Indra Karya (Persero)

Jl. Biru Laut X Kav. 9, Cawang, Jakarta Timur 13340
- Indonesia
Tel. (62-21) 8192636, Fax. (62-21) 8192179
Website: www.indrakarya.co.id
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government
100%

PT. Indra Karya (Persero) adalah Perusahaan BUMN yang didirikan di Jakarta pada tahun 1972. Perusahaan melaksanakan Layanan Jasa Konsultasi dalam arti yang seluas-luasnya meliputi pekerjaan identifikasi, survei dan investigasi, studi, perancangan/ planning, perencanaan/ desain, pengawasan/ pengelolaan/ manajemen untuk konstruksi/ pelaksanaan proyek, melaksanakan layanan jasa informasi yang meliputi sistem informasi manajemen dan pengolahan data komputer serta teknologi informasi, melaksanakan jasa manajemen, meliputi manajemen keuangan, sumber daya manusia, perasuransian, alih teknologi, audit teknik, dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kawasan, rancang bangun dan perekrutannya, produksi, penjualan.



PT Sucofindo (Persero)

Graha Sucofindo Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34
Jakarta 12780 - Indonesia
Tel. (62-21) 7983666, Fax. (62-21) 7986473, 7983888
Website: www.sucofindo.co.id
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government
95%
Societe Generale De Surveillance Holding S.A.
Geneva 5%

PT Superintending Company of Indonesia (Persero), yang disebut pula dengan nama PT Sucofindo (Persero), didirikan dengan Akta No. 42 tanggal 22 Oktober 1956. Perseroan bergerak di bidang usaha sertifikasi, audit, assessment, konsultasi, pelatihan dan berbagai kegiatan penunjang terkait, diantaranya pada Sektor Pertanian, Kehutanan, Pertambangan (Migas dan Non Migas), Konstruksi, Industri Pengolahan, Kelautan, Perikanan, Pemerintah, Transportasi, Sistem Informasi dan Energi Terbarukan.

Jasa Profesional, Ilmiah, Teknis



PT Surveyor Indonesia (Persero)

Graha Surveyor Indonesia Lt. 4-11
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta 12950 -
Indonesia
Tel. (62-21) 526 5526, Fax. (62-21) 526 5525
Website: www.pts.co.id
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government
85,12 %
Societe Generale de Surveillance SA 10,40% | PT
Sucofindo 4,48%

Surveyor Indonesia (Persero) didirikan berdasarkan akta notaris No. 154 tanggal 29 Juli 1991. Perusahaan melakukan kegiatan surveyor, menyediakan/melakukan jasa pemeriksaan pra-pengapalan dan jasa-jasa yang berhubungan untuk menunjang pemeriksaan pra-pengapalan, melakukan kegiatan inspeksi dan sertifikasi, dan melakukan jasa-jasa pelayanan manajemen mutu dan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, manajemen risiko, konsultasi investasi dan perdagangan, konsultasi pertambangan umum/ migas, pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi, penyedia sumber daya manusia yang terkait dengan bidang Perseroan, konsultasi kegiatan teknik, dan konsultasi penyelidikan geologi serta survei dan pemetaan.



PT Survei Udara Penas (Persero)

Puri Sentra Niaga, Blok B/36
Jl. Kalimalang Jakarta 13620 - Indonesia
Tel. (62-21) 866 12369, Fax. (62-21) 866 12369
Website: -
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government
100%

PT Survei Udara Penas (Persero) didirikan pada tahun 1992 dan bekerjasama erat dengan sejumlah lembaga pemerintah termasuk Departemen Pertahanan, TNI Angkatan Udara. Kegiatan usaha perseroan antara lain Survei udara meliputi pemotretan udara, geofisika udara dan profil radar/laser; Survei darat untuk peta teristris, peta fotogrametris, geofisika udara; Pengolahan dan interpretasi foto udara, geofisika udara, foto, radar, citra satelit dan profil radar/laser untuk pemetaan dan eksplorasi sumber daya alam; Kegiatan laboratorium foto udara, laboratorium elektronika dan avionik; Menyewakan (charter) pesawat terbang; dan Jasa konsultan dan perekayasa di bidang survei dan pemetaan.

Profil BUMN

Konstruksi



PT Adhi Karya (Persero) Tbk

Jl. Raya Pasar Minggu km. 18 Jakarta 12510 - Indonesia
Tel. (62-21) 797 5312, Fax. (62-21) 797 5311
Website: www.adhi.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 51% | Masyarakat/Publik 49%

PT Adhi Karya (Persero) Tbk ("ADHI") didirikan berdasarkan akta notaris No. 1 tanggal 1 Juni 1974. Perusahaan ini memiliki ruang lingkup usaha meliputi jasa konstruksi, konsultasi manajemen dan rekayasa industri meliputi perencanaan, pengadaan, dan sekaligus mengerjakan konstruksi yang dalam hal ini lebih menekankan pada jenis pekerjaan oil & gas dan power plant, penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian, beton percontak, properti, hotel, real estate, dan pengembangan Transit Oriented Development (TOD).



PT Brantas Abipraya (Persero)

Jl. D.I. Panjaitan Kav, 14, Jakarta 13340
Tel. (62-21) 851 6290, Fax (62-21) 851 6095
Website: www.brantas-abipraya.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

Perseroan pada awalnya didirikan dengan nama PT Brantas Abipraya sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Brantas Abipraya pada tahun 1980. Perseroan melaksanakan konstruksi pekerjaan sipil, pekerjaan mekanikal elektrik, perencanaan dan pengawasan konstruksi, pelayanan jasa konsultasi, building management, fabrikasi bahan dan komponen bangunan, peralatan konstruksi, fabrikasi barang logam, kayu, karet, dan plastik, penyewaan peralatan konstruksi, layanan jasa keagenan bahan dan komponen bangunan, investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana, melakukan usaha di bidang agro industri, ekspor impor, perdagangan umum, pengelolaan kawasan, system development, layanan jasa di bidang teknologi informasi, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi.



PT Amarta Karya (Persero)

Jl. Veteran No.112, Bekasi 17141, Indonesia
Tel. (62-21) 8842315, Fax (62-21) 8842313
Website: www.amartakarya.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 65% | Masyarakat/Publik 35%

PT Amarta Karya (Persero) didirikan pada tanggal 20 Desember 1972. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama: bidang konstruksi, termasuk melakukan pekerjaan perekayasaan, rancangbangun, produksi, fabrikasi, perakitan, penjualan, distribusi, pemasangan, penyewaan jasa dalam peralatan, keagenan bahan dan komponen, konsultasi, pengerjaan tanah dan pengaspalan, pintu air, jembatan, pengerukan dan pemancangan.



PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Gedung Waskita
Jl. MT Haryono Kav. No, 10 Cawang, Jakarta 13340, Indonesia
Tel. (021) 8508510 Faks (021) 8508506
Website: www.waskita.co.id
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government 70% | Masyarakat / Public 30%

PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("WSKT") didirikan pertama kali sebagai perusahaan asing dengan nama "Volker Aaneming Maatschappij N.V." yang kemudian dinasionalisasi pada tahun 1961. Kegiatan usaha WSKT antara lain pekerjaan pelaksanaan konstruksi, jasa pertambangan, pekerjaan terintegrasi Engineering, Procurement and Construction (EPC), perancangan dan pembangunan, layanan jasa konsultasi manajemen, gedung, pabrikasi bahan dan komponen bangunan, pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi, pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik, penyewaan peralatan konstruksi, investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar khususnya jalan tol dan energi serta industri usaha

Konstruksi



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Jl. D.I Panjaitan Kav, 9 Jakarta 13340 - Indonesia
Tel. (62-21) 8192808, 8508640, 8508650, Fax. (62-21) 8191235, 8199713

Website: www.wika.co.id

Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government
66,37% | Publik / Public 33,63%

PN Widjaja Karja kemudian dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) dengan nama "PT Wijaya Karya" berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.110 tanggal 20 Desember 1972. Ruang lingkup kegiatan WIKA dan entitas anak meliputi bidang industri konstruksi, industri fabrikasi, industri konversi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, energi terbarukan dan energi konversi, perdagangan, engineering procurement, construction, pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi jasa engineering dan perencanaan.



PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

Plaza PP, Wisma Subiyanto Building
Jl. Letjend Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760

Tel. (62-21) 840 3883, Fax (62-21) 840 3936

Website: www.pt-pp.com

Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government
51%

PT Pembangunan Perumahan (Persero) ("PTPP") didirikan dengan nama NV Pembangunan Perumahan pada tahun 1953. Kegiatan usaha yang dijalankan PTPP hingga saat ini berfokus pada beberapa pilar bisnis, yaitu Konstruksi dan Engineering, Procurement & Construction (EPC); Properti and Realiti, serta investasi. . PTPP melaksanakan pembangunan Gedung Perkantoran, apartemen, hingga Pusat Perbelanjaan.



PT. Hutama Karya (Persero)

Jl. Letjend MT Haryono Kav. 8 Cawang
Jakarta 13340 - Indonesia
Tel. (62-21) 819 3709, Fax (62-21) 819 6107
Website: www.hutama-karya.com
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government
100%

PT. Hutama Karya (Persero) (HK) pada awalnya merupakan perusahaan swasta Hindia Belanda 'Hollandsche Beton Maatschappij' yang dinasionalisasi pada tahun 1961. Perseroan melaksanakan usaha dibidang industri konstruksi, pengusahaan jalan tol dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), perencanaan dan pengawasan pelaksanaan konstruksi, usaha rekayasa, rancang bangun, produksi/ pabrikan/ perakitan dan penjualan antara lain: komponen, bahan, dan kelengkapan bangunan konstruksi, kelistrikan, telekomunikasi. kelistrikan, telekomunikasi dan lain-lain, Usaha pengembangan, pembangunan, penjualan, penyewaan di bidang real estate yang meliputi bangunan dan kawasan serta melakukan pengusahaan dan pengelolaan di bidang properti.



Perum Pembangunan Perumahan Nasional

Jl. D.I Panjaitan Kav,11 Jakarta Timur 13340, Indonesia
Tel. (62-21) 819 4807, Fax (62-21) 819 3825
Website: www.perumnas.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government
100%

Perum Perumnas didirikan tanggal 18 Juli 1974. Perusahaan memiliki tiga bisnis utama yaitu agent of development berupa penyedia perumahan, perumahan dan pemukiman, peremajaan dan peningkatan kualitas kawasan, pembukaan kota – kota baru; pengelolaan land bank (pengelolaan lahan – lahan pemerintah); building/estate management (pengelolaan rumah susun dan/atau pengelolaan kawasan).



PT Istaka Karya (Persero)

Jl. Iskandarsyah Raya No,66 Jakarta - Indonesia
Tel, (62-21) 7258686, Fax, (62-21) 7258787
Website: www.istaka.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government
100%

Pada awalnya, Perusahaan bernama PT ICCI (Indonesian Consortium of Construction Industries) dan berganti nama PT Istaka Karya (Persero) dengan diterbitkannya akte pendirian No. 01 tahun 1986. Bisnis utama perusahaan meliputi pembangunan dibidang konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agroindustri, perdagangan, pengelolaan kawasa, layanan jasa peningkatan kemampuan dibidnag jasa konstruksi, teknologi infrmasi serta kepariwisataan dan pengembang pada khususnya.

Profil BUMN

Transportasi dan Pergudangan



PT Bhandara Gara Rekso (Persero)

Jl. Kali Besar Timur No. 5-7, Jakarta 11110 - Indonesia
Tel. (62-21) 6916666, Fax. (62-21) 6903162
Website: www.bgrIndonesia.com
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government 100%

PT. Bhandara Gara Rekso (Persero) (Perusahaan) didirikan pada tahun 1976. Perusahaan menyelenggarakan jasa logistik yang meliputi kegiatan pergudangan antara lain: gudang milik, gudang sewa, gudang manajemen, collateral management service serta jasa distribusi yang meliputi kegiatan transportasi darat, laut dan udara. Selain itu, entitas juga menyelenggarakan jasa kurir.



PT Pos Indonesia (Persero)

Jl. Ujung Surabaya, PO BOX 1134
Surabaya 60165
Telp. (62-31) 329 2275, Fax (62-31) 329 2530
Website : www.pal.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

PT Pos Indonesia (Persero) pendiriannya diawali dengan pembukaan kantor pos pertama didirikan di Batavia pada tahun 1746. Pos Indonesia berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero) pada tahun 1995. Perseroan didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan usaha jasa pos dan giro termasuk jasa keuangan secara tunai maupun berbasis giro (account) bidang usaha jasa komunikasi, jasa logistik, jasa retail, jasa keagenan dan jasa-jasa lain yang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.



PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)

Jl. Raya Cakung Cilincing, Tg. Priok Jakarta Utara 14140
Telp: (62-21) 44820909 Faks: (62-21)44820042
Website: www.kbn.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah Republik Indonesia / Government of the Republic Indonesia 73.15% -
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Provincial Government of DKI Jakarta 26.85%

Pada tahun 1994, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1994, PT Pengelola Kawasan Berikat Indonesia (Persero) dilikuidasi dan kemudian merger dengan PT Pengelola Kawasan Berikat Indonesia (Persero). Bisnis utama PT Kawasan Berikat Nusantara terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu Jasa Properti dan Jasa Pelayanan Logistik. Perusahaan juga memiliki kegiatan usaha/bisnis penunjang yang terdiri dari Strategic Business Unit ("SBU") Pengelolaan Kebersihan, SBU Pengelolaan Air, SBU Komunikasi, dan Teknologi Informasi, SBU Manajemen Properti Non Industri, SBU Pelayanan Kesehatan, SBU Pengelolaan Bengkel, Kegiatan Kepelabuhanan, dan Kegiatan Prima Beton.



PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)

Jl, Raya Semarang-Kendal Km 12 Semarang
Tel, (62-24) 8661645, Fax, (62-24) 8661476
Website : www.kiw.co.id
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah 51,09% |
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 40,39 %,
Pemerintah Kabupaten Cilacap 8,52 %

PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) pada awalnya bernama PT Kawasan Industri Cilacap (Persero) yang didirikan pada tahun 1988. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi usaha di bidang penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan pembangunan serta pengurusan, pengusahaan dan pengembangan dan melakukan kegiatan di bidang usaha kawasan industri, untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Transportasi dan Pergudangan



PT Kawasan Industri Medan (Persero)

Jl. Pulau Batam No.1 Kompleks KIM Tahap II
Medan, Sumatera Utara 20242 - Indonesia
Tel. (62-61) 6871177, Fax. (62-61) 6871088
Website: www.kim.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government
60% | Pemprov 30% | Pemkot Medan 10%

PT. Kawasan Industri Medan (Persero)
(Perusahaan) didirikan melalui Akta No. 9 tanggal
7 Oktober 1988. isnis utama Perusahaan meliputi
Penjualan Kavling Industri Siap Pakai. Sedangkan
bisnis lainnya Perusahaan meliputi Penyewaan
Gudang (SFB & Warehouse), Foodcourt,
Penyewaan Lapangan Futsal, SPBU, dan
Penyewaan Ruang Kantor (Wisma KIM).



PT Dirgantara Indonesia (Persero)

Jl. Pajajaran No.154 Bandung 40174, Indonesia
Telp: (62-22) 6054167 Faks: (021) 6054185
Website: www.Indonesian-aerospace.com
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government
100%

PT Industri Pesawat Terbang Nusantara mengalami
pergantian nama menjadi PT Dirgantara Indonesia
(Persero) berdasarkan akta yang dibuat tanggal 9
Oktober 2000. Kegiatan usaha utama perusahaan
yakni di bidang industri pesawat terbang, industri
sistem persenjataan, jasa rekayasa teknik dan jasa
perawatan, informasi teknologi, otomotif, maritim,
simulasi teknologi, industri turbin, dan jasa teknik.
Saat ini, Perusahaan mempunyai 4 unit bisnis:
perakitan pesawat, aerostructure, jasa pelayanan
pesawat, serta teknologi dan pengembangan.
Hasil produksi Perusahaan dipasarkan di dalam
dan di luar negeri.



PT Kawasan Industri Makassar (Persero)

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 15 Daya Makassar,
Sulawesi Selatan 90241, Indonesia
Tel. (62-24) 11510158, Fax. (62-24) 11510098
Website: www.ptkima-makassar.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government
60%

PT. Kawasan Industri Makassar (Persero)
(Perusahaan) merupakan sebuah BUMN yang
didirikan tanggal 31 Maret 1988. PT. Kawasan
Industri Makassar menjalankan dua bisnis, yaitu
bisnis utama dan bisnis penunjang. Bisnis utama
Perusahaan meliputi penjualan tanah kavling
industri dan penyewaan Bangunan Pabrik Siap
Pakai (BPSP) & Gudang. Sedangkan bisnis
penunjang Perusahaan meliputi Penyewaan alat
berat konstruksi & logistik, serta otomotif center.



PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta,
Indonesia 13550
Tel. (62-21) 8413526, 8413630, Fax. (62-21) 8401533,
8413540
Website: www.jasamarga.com
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government
70%, Publik 30%

PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("JSMR") dibentuk
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun
1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik
Indonesia dalam pendirian Perusahaan Perseroan
(Persero). Sebagai perusahaan penyedia jasa
layanan tol, perusahaan menyediakan layanan
yang terdiri dari: Layanan Transaksi, layanan
Lalu-Lintas, dan layanan konstruksi. Seiring
dengan perkembangan JSMR, layanan- layanan
tersebut juga berkembang dengan mengikuti
dinamika kebutuhan usaha dan masyarakat yang
membutuhkan infrastruktur jalan yang andal.

Profil BUMN

Transportasi dan Pergudangan



PT Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)

Jln Yos Sudarso No. 1, Batu Ampar, Batam, 29432 - Indonesia
Tel, (62-778) 458 284, Fax, (62-778) 457018
Website: www.perserobatam.com
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

PT. Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) yang berkedudukan di Pulau Batam dan didirikan pada tahun 1974. Kegiatan usaha perseroan antara lain Merencanakan, membangun dan mengusahakan pergudangan beserta fasilitas penunjangnya, baik berupa gudang tertutup maupun gudang terbuka di seluruh wilayah Bounded Warehouses di daerah Industri Pulau Batam.



PT Pos Indonesia (Persero)

Jl. Ujung Surabaya, PO BOX 1134
Surabaya 60165
Telp. (62-31) 329 2275, Fax (62-31) 329 2530
Website : www.pal.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

PT Pos Indonesia (Persero) pendiriannya diawali dengan pembukaan kantor pos pertama didirikan di Batavia pada tahun 1746. Pos Indonesia berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero) pada tahun 1995. Perseroan didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan usaha jasa pos dan giro termasuk jasa keuangan secara tunai maupun berbasis giro (account) bidang usaha jasa komunikasi, jasa logistik, jasa retail, jasa keagenan dan jasa-jasa lain yang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.



PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Jl, Krakatau Ujung No 100, Medan, Sumatera Utara 20241
Telp (62-61) 6610220 Fax : (62-61) 6610906
Website : www.pelindo1.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berdiri berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Desember 1992. Perusahaan menyelenggarakan usaha meliputi penyediaan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, pengisian bahan bakar minyak dan pelayanan air bersih, penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang/kendaraan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas, penyediaan dan/atau pelayanan jasa Gudang, tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan.



PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Jl, Pasoso No,1 Tanjung Priok Jakarta Utara, Indonesia 14310
Tel. (62-21) 4367505, 4301080, Fax, (62-21) 43911704
Website: www.Indonesiaport.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Perusahaan) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun tanggal 30 April 1983. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama yaitu pelayanan kapal yang merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar pelabuhan, meliputi pelayanan Jasa Labuh, Jasa Tambat, Jasa Pandu, Jasa Pelayanan Air, Jasa Tunda dan Kepil, dan Jasa Telepon, pelayanan barang yang merupakan pelayanan bongkar muat mulai dari kapal hingga penyerahan ke pemilik barang yang meliputi Jasa Bongkar Muat, Jasa Penumpukan, dan Pelayanan Dermaga. Pelayanan Rupa-rupa merupakan jasa pelayanan yang menunjang kegiatan yang ada di pelabuhan, meliputi Jasa Persewaan, Penyediaan Listrik, Alat-alat Pelabuhan, Pelayanan Jasa Lainnya, Penyediaan Air Bersih, dan Telepon Umum.

Transportasi dan Pergudangan



PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Jl, Perak Timur 610 Surabaya
Telp (62-31) 3298631 s/d 37 Fax (62-31) 3295207
Website : www.pelindo.co.id

PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III didirikan berdasarkan PP No.58 tahun 1991. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama: TPS yang bergerak dalam bidang pelayaran pelabuhan petikemas dan berkedudukan di Tanjung Perak Surabaya. RSPS yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan untuk karyawan Perseroan dan umum, RSPS berkedudukan di Surabaya, dan BJTI yang bergerak dalam bidang jasa pelayaran bongkar muat barang di terminal atau pelabuhan dan jasa terkait lainnya di Tanjung Perak serta jasa pengangkutan barang.



PT Dirgantara Indonesia (Persero)

Jl. Pajajaran No.154 Bandung 40174, Indonesia
Telp: (62-22) 6054167 Faks: (021) 6054185
Website: www.Indonesian-aerospace.com
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government 100%

PT Industri Pesawat Terbang Nusantara mengalami pergantian nama menjadi PT Dirgantara Indonesia (Persero) berdasarkan akta yang dibuat tanggal 9 Oktober 2000. Kegiatan usaha utama perusahaan yakni di bidang industri pesawat terbang, industri sistem persenjataan, jasa rekayasa teknik dan jasa perawatan, informasi teknologi, otomotif, maritim, simulasi teknologi, industri turbin, dan jasa teknik. Saat ini, Perusahaan mempunyai 4 unit bisnis: perakitan pesawat, aerostructure, jasa pelayanan pesawat, serta teknologi dan pengembangan. Hasil produksi Perusahaan dipasarkan di dalam dan di luar negeri.



PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

Jl, Soekarno No.1 Makasar 90173, Sulawesi Selatan
Telp, (62-411) 361549, Fax, (62-411) 3619044
Website: www.inaport4.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

Perum Pelabuhan IV (Pelindo IV) merupakan hasil merger PN. Pelabuhan V, VI, VII, dan VIII, ditambah dengan 6 (enam) pelabuhan yang tidak diusahakan di Propinsi Irian Jaya, yang pendiriannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1983. Perusahaan menyelenggarakan 5 bisnis utama yaitu pelayanan kapal, pelayanan barang, pelayanan terminal petikemas, pelayanan penumpang dan pelayanan alat.



Perum DAMRI

Jl. Matraman Raya No. 25 Jakarta Timur 13140 - Indonesia
Tel. (62-21) 8583131, Fax. (62-21) 8504876
Website: www.damri.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1984 dan diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2002, status PN Damri beralih menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Damri. Kegiatan usaha perseroan meliputi Jasa Angkutan Kota (seperti pelayanan dalam jaringan trayek kota, seperti dalam wilayah kota, Ibu kota propinsi dan kabupaten), Jasa Angkutan Antar Kota (pelayanan dalam jaringan trayek Antar Kota Antar Propinsi – AKAP dan Antar Kota Dalam Propinsi – AKDP), Jasa Angkutan Antar Negara (pelayanan trayek dari Pontianak - Kuching dan Pontianak - Brunai Darussalam), Jasa Angkutan Travel, dan Jasa Angkutan Khusus Bandara. Jasa Angkutan Barang melayani angkutan paket.

Profil BUMN

Transportasi dan Pergudangan



Perum PPD

Jl. D.I. Panjaitan No. 1, Cawang – Jakarta Timur 13350
Telp. (62-21) 859 12547, Fax (62 21) 8501047
Website : www.perumppd.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1981, ditetapkan perubahan status Perusahaan Negara Pengangkutan Perum PPD memiliki 3 (tiga) bisnis utama yaitu busway transjakarta, transjabodetabek dan pariwisata. Untuk kegiatan operasionalnya, Perum PPD memiliki 841 bus yang terdiri dari 84 bus regular, 13 bus patas, 32 bus patas AC, 9 bus segmen pariwisata, 15 bus APTB, 88 bus Transjabodetabek dan 600 bus busway. Djakarta (PN PPD) menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta (“Perum PPD”).



Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI)

Gedung AirNav Indonesia
Jl. Ir. H. Juanda No.1, Kec. Neglasari, Tangerang Banten – Indonesia 15121
Website: www.airnavIndonesia.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (PERUM LPPNPI) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2012 tanggal 13 September 2012. Perum LPPNPI memiliki bisnis utama yaitu pelayanan lalu lintas penerbangan, pelayanan telekomunikasi penerbangan, pelayanan informasi aeronautic, penerbitan dan penyebarluasan Notan, pelayanan informasi aeronautika bandar udara, pelayanan informasi meteorologi penerbangan, pelayanan informasi pencarian dan pertolongan.

Navigasi Penerbangan Indonesia



PT Angkasa Pura I (Persero)

Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B.12 Kav.24,
Jakarta 10610
Tel. (62-21) 654 1961, Fax. (62-21) 654 1513
Website: www.angkasapura1.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government
100%

PT Angkasa Pura I (Persero) pada awalnya merupakan Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran yang dibentuk pada dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 tahun 1962. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama: Jasa Pelayanan Penerbangan (Air Traffic Services), penyediaan, pengusahaan fasilitas navigasi. Jasa Pelayanan Kebandarudaraan yang pertama meliputi Aeronautika Non ATS yang terdiri dari penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan, pendaratan, lepas landas, parkir dan penyimpanan pesawat udara, kemudian untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo dan pos.



PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

SGaruda Indonesia Building Jl. Kebon Sirih No. 44
Jakarta 10110, Indonesia
Telp: (021) 231-1355 Faks: (021) 231-1223
Website: www.garuda-indonesia.com
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government
60,5%
Credit Suisse AG Singapore 24,6% | Publik 14,9 %

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk didirikan berdasarkan akta No.137 tanggal 31 Maret 1950. Ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi angkutan udara niaga berjadwal dan tidak berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri, reparasi dan pemeliharaan pesawat udara, jasa penunjang operasional angkutan udara niaga, jasa layanan sistem informasi yang berkaitan dengan industri penerbangan, jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan industri penerbangan, jasa layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan industri penerbangan, jasa layanan kesehatan personil penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun pihak ketiga.



PT Angkasa Pura II (Persero)

Soekarno - Hatta International Airport Building 600,
Jakarta 19120 Indonesia
Tel. (62-21) 550 5079, Fax. (62-21) 550 2141
Website : www.angkasapura2.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government
100%

PT. Angkasa Pura II (Persero), merupakan perusahaan pengelola jasa kebandarudaraan dan pelayanan lalu lintas penerbangan di kawasan Barat Indonesia. Perusahaan didirikan berdasarkan Akta nomor 3, tanggal 2 Januari 1993. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama: Penyediaan jasa aeronautika bertumpu pada terselenggaranya aspek keselamatan penerbangan. Jasa tersebut meliputi: jasa pendaratan, jasa penempatan, jasa pelayanan penerbangan, jasa penerbangan lintas, jasa pelayanan parkir, jasa pelayanan penumpang, pemakaian counter, pemakaian avoibridge, penyediaan jasa penunjang kegiatan bandara yang lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa bandara, termasuk keamanan bandara, penanganan kecelakaan pesawat udara di bandara, serta layanan kargo udara.



PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta
Tel p (62-21) 6334342, Fax : (62-21) 63854130
Website : www.pelni.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government
100%

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) didirikan pada tanggal 28 April 1952. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama: Usaha keagenan merupakan salah satu segmen andalan PT. PELNI yang dimulai sejak tahun 1960 meliputi jasa keagenan kapal-kapal baik domestik maupun luar negeri. Galangan PELNI SURYA adalah diresmikan pengoperasiannya pada 20 Mei 1996. Dengan fasilitas Graving Dock berukuran 80 x 18 x 17 meter siap melayani Running Repair & Docking kapal berukuran 300- 2000 DWT (Dead Weight Ton). Bidang Freight Forwarding merupakan kegiatan usaha pelayanan jasa dokumentasi dan pengangkutan barang.

Profil BUMN

Transportasi dan Pergudangan



PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1
Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40117
Tel. (62-22) 4230031, 4230039, 4230054, Fax. (62-22) 4203342
Website: www.kai.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 1 Juni 1999. Perseroan memiliki bisnis utama sebagai penyedia jasa transportasi perkeretaapian utama yang lengkap, mulai dari bidang angkutan penumpang, angkutan barang, pendukung angkutan kereta api, dan non angkutan. Dalam menjalankan kegiatan operasinya, Perusahaan memiliki 9 Daerah Operasi (Daop) yang terdiri dari Daop 1 Jakarta, Daop 2 Bandung, Daop 3 Cirebon, Daop 4 Semarang, Daop 5 Purwokerto, Daop 6 Yogyakarta, Daop 7 Madiun, Daop 8 Surabaya dan Daop 9 Jember; 4 Divisi Regional (Divre) terdiri dari Divre I Medan, Divre II Padang, Divre III Palembang dan Divre IV Tanjung Karang; dan 5 Balaiyasa terdiri dari Balaiyasa Manggarai Jakarta, Balaiyasa Tegal, Balaiyasa Yogyakarta, Balaiyasa Gubeng Surabaya, dan Balaiyasa Lahat.



PT Djakarta Lloyd (Persero)

Vinilon Building, Lt. 1 & 10
Jl. Raden Saleh Kav 13-17, Cikini
Jakarta Pusat 10430
Website : www.djakartalloyd.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

PPT Djakarta Lloyd (Persero) didirikan di Tegal pada tanggal 18 Agustus 1950. Perusahaan menjalankan usaha dalam bidang pelayaran angkutan laut, baik pelayaran samudera, feeder dan kegiatan angkutan yang menunjang usaha pelayaran samudera dan khususnya melayani pengangkutan container, menjalankan kegiatan pemilik kapal, menjalankan keagenan kapal-kapal atau perusahaan pelayaran, melakukan kegiatan terminal di beberapa pelabuhan dalam negeri, melakukan kegiatan oergudangan dan ekspedisi untuk keperluan kapal yang diageni, melakukan kegiatan reparasi dan pemeliharaan serta galangan yang dimungkinkan oleh fasilitas yang tersedia.



PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Jl. Ahmad Yani Kav 52 A, Jakarta Timur 10510
Telp (62-21) 4208911-13-15
Fax : (62-21) 4210544
Website : www.Indonesiaferry.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

Pada tahun 1992 pemerintah meningkatkan status PERUM ASDP menjadi PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero) dan kemudian menjadi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun 2004. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama: jasa penyeberangan berupa layanan perjalanan untuk penumpang, kendaraan dan barang; dan jasa pelabuhan berupa jasa sandar, pas pelabuhan, pemeliharaan dermaga, barang dan pas non terpadu, aneka usaha jasa berupa produksi atas properti dan non properti.



PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

Perkantoran Plaza Pasifik Blok B1 No.1
Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta 14240 - Indonesia
Telp. (62-21) 4584 7560, Fax. (62-21) 4584 7552
Website:
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

Berdasarkan Akte Notaris Nomor 6 tanggal 7 Januari 1977, PN. Varuna Tirta Prakasya diubah bentuk badan hukumnya menjadi "Perseroan" yaitu PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero). Perusahaan melakukan usaha di bidang penyelenggaraan usaha jasa logistik baik nasional maupun internasional serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya meliputi logistic ekspor/impor, manajemen proyek, supply chain management dan logistik distribusi.



PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)

Jl. Angkasa Blok B-15 Kav. 2 & 3,
Kemayoran Jakarta, 10720 Indonesia
Telp (62-21) 654-8888, Fax (62-21) 654-0620
Website:
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 95,79% | PT Garuda Indonesia 4,21%

PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 6 September 1975. Meskipun awalnya hanya menawarkan layanan penumpang, Merpati kini telah menjadi sebuah bisnis perjalanan udara yang komprehensif yang menyediakan perawatan pesawat terbang, layanan darat (ground handling) serta pelatihan awak dan pilot. Merpati Maintenance Facility (MMF) menyediakan perawatan dan perbaikan pesawat terbang yang terletak di Bandara Internasional Juanda, Surabaya (Jawa Timur).

Perdagangan dan Eceran



Perum BULOG

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 49, Jakarta Selatan
12950 - Indonesia
Tel. (62-21) 5252209, Fax. (62-21) 5256482
Website: www.bulog.co.id
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government
100%

Perusahaan Umum BULOG (Perum BULOG) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi usaha di bidang logistik dan perdagangan pangan, sekaligus menjalankan kegiatan pelayanan publik dengan melaksanakan kebijakan pengadaan gabah/beras, menjaga stok, dan menjaga keterjangkauan dan stabilitas harga pangan melalui CBP (cadangan beras pemerintah), dengan unit bisnis yang juga menjalankan usaha pemeriksaan kualitas dan pemberantasan hama komoditas pangan serta optimalisasi aset. Selain hal tersebut, Perum Bulog melalui anak-anak perusahaan menjalankan usaha di bidang jasa transportasi dan industri gula.



PT Sarinah (Persero)

Jl. M.H. Thamrin No. 11, Jakarta. 10350
Tel. (62-21) 31923008, Fax. (62-21) 31931853
Website: www.sarinah.co.id
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government
100%

PT Sarinah (Persero) didirikan berdasarkan gagasan Presiden RI Pertama, Ir. Soekarno, pada tanggal 17 Agustus 1962 dengan nama PT Departemen Store Indonesia. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Sarinah (Persero) meliputi perdagangan eceran, persewaan ruangan, perdagangan impor, perdagangan ekspor, perdagangan distribusi, perdagangan valuta asing, pengelolaan Hotel Sari Pan Pasific. Perusahaan juga berperan sebagai stimulator dan mitra usaha golongan ekonomi lemah, serta dalam mengubah struktur tata niaga eceran sehingga mantap dalam menunjang pembangunan dan berpartisipasi aktif dalam mengubah struktur tata nilai (social value) masyarakat dalam kaitannya dengan profesi usaha eceran.



PT Berdikari (Persero)

Jl, Merdeka Barat No,1 Jakarta 10110
Tel, (62-21) 3459955, Fax, (62-21) 3440509
Website: www.berdikari-persero.com
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government
100%

Perusahaan Pilot Proyek Berdikari resmi berubah status menjadi PT Berdikari (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 yang dituangkan dalam Akta No,16 tanggal 22 Agustus 2000. Perusahaan penyedia jasa pemasaran barang dan jasa di bidang perdagangan umum dan industri pertanian, peternakan serta jasa logistik (Total Logistic Services) yang meliputi jasa pergudangan, EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), angkutan darat, perkapalan, freight forwarding serta usaha-usaha lain yang menunjang kegiatan-kegiatan tersebut.



PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)

Wisma ITC, Jl. Abdul Muis No.8, Jakarta 10160 - Indonesia
Telp. (62-21) 3862141-42, Fax. (62-21) 3862143
Website: www.tradingIndonesia.com
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government
100%

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau Indonesia Trading Company (ITC) merupakan hasil penggabungan dari tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Dharma Niaga (Persero), PT Pantja Niaga (Persero) dan PT Cipta Niaga (Persero) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995. Ruang lingkup kegiatan usaha utama Perusahaan yaitu perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri mencakup ekspor, impor, antar pulau, perdagangan lokal, distribusi, perwakilan dan keagenan dan juga pengadaan barang-barang hasil pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pertambangan umum, industri, bahan-bahan konstruksi, alat-alat kesehatan dan laboratorium, jasa perdagangan, perdagangan besar farmasi, minyak dan gas serta produk turunannya.

Profil BUMN

Pertanian, Kehutanan, Perikanan



Perum Perhutani

Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt9-11
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Telp: (021) 5721282 Faks: (021) 5733616
Website: www.perumperhutani.com
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government 100%

Perhutani didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1972. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, yang meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pengelolaan hasil hutan menjadi bahan baku atau bahan jadi, pendidikan dan pelatihan di bidang kehutanan, penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan, pengembangan agroforesti, membangun dan mengembangkan hutan rakyat dan/ atau hutan tanaman rakyat dan perdagangan hasil hutan dan hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain.



PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

Jalan Denpasar raya Kav. D III Kuningan Mega Kuningan,
Jakarta Selatan 12950
Telp: (62-21) 2523820, (62-21) 2523830, Fax: (62-21) 5202827
Email: publicrelation@rni.co.id
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government 100%

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) disingkat RNI, didirikan pada tanggal 12 Oktober 1964 yang diambil alih pemerintah dan diberi nama Perseroan diubah dengan PT Pusat Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama: perkebunan dan pabrik gula, industri bio ethanol, industri pakan ternak, industri papan partikel, perkebunan teh, perkebunan kelapa sawit, industri kulit, industri ban, produk perawatan kesehatan, perdagangan.



Perum Perikanan Indonesia

Jl. Muara Baru Ujung, Jakarta, 14440
Telp (62-21) 6694822 Fax : (62-21) 6690523
Website : www.perumpps.co.id
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government 100%

Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) yang sebelumnya bernama Perusahaan Umum Prasarana Perikanan Samudra (Perum PPS) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990. Perusahaan ini diberi tugas dan tanggung jawab dalam rangka mengelola aset negara guna menyelenggarakan pengusahaan dan pelayanan barang jasa dan memupuk keuntungan serta pengembangan sistem bisnis perikanan, salah satunya kepada pengguna jasa pelabuhan perikanan yaitu nelayan pada khususnya dan masyarakat perikanan pada umumnya.



PT Perikanan Nusantara (Persero)

Jl. KH. Hasyim Ashari No. 17 A Jakarta, 10130
Tel. (62-21) 6332162, Fax. (62-21) 6332163
Website: www.BUMN.go.id/perikanan/
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government 100%

PT. Perikanan Nusantara (Persero) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1998. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama: bidang penangkapan ikan, pembudidayaan, pengolahan dan perdagangan/ pengumpulan ikan, jasa pengolahan, sewa gudang beku (cold storage), jasa docking, jasa sewa fasilitas perusahaan lainnya (lahan, gedung/ bangunan, perumahan, dermaga) serta usaha-usaha lain yang langsung menunjang usaha pokok tersebut di atas.

Pertanian, Kehutanan, Perikanan



PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Jl. Sei Batang Hari No. 2 Medan 20122
Kotak Pos 91, Sumatera Utara
Telp: (061) 8452244, 8453100 Fax. (061) 8455177,
8454728
Website: www.ptpn3.com
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government
100%

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) disingkat PTPN III didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 1996. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama meliputi pPengusahaan budidaya tanaman, produksi meliputi pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi atau barang jadi serta produk turunannya, perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan, pengembangan usaha bidang perkebunan, agrowisata, dan agro industry.



PT Sang Hyang Seri (Persero)

Wisma Benih, Jl. Dr. Saharjo 313 Tebet, Jakarta Selatan 12810
Telp. (62-21) 8291530, 8295956, Fax. (62-21) 8298614
Website: www.sanghyangseri.co.id

PT. Sang Hyang Seri (Persero) pada awalnya sebagai Perusahaan Umum (PERUM), dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 tahun kemudian sejak tahun 1995 diubah menjadi Perseroan Terbatas (Persero). Maksud dan tujuan pokok PT. Sang Hyang Seri (Persero) berdasarkan Akta pendiriannya adalah melakukan usaha pembenihan di bidang pertanian serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya, produksi benih dan/ atau bibit pertanian termasuk perkebunan, peternakan, dan perikanan, pemasaran, dan jasa penelitian.



PT Pertani (Persero)

Jl. Raya Pasar Minggu Pertani No.1 Jakarta Selatan
Telp: (62-21) 799-3108, Fax: (62-21) 799-3203
Website : www.pertani.co.id
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government
100%

Perusahaan Pertanian Negara berubah menjadi Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1973 dan Akta Perubahan No. 45 tanggal 6 Februari 1984 menjadi PT Pertani (Persero). Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pengadaan, produksi, dan pemasaran sarana produksi pertanian dan komoditi pertanian serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saling kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan.

Profil BUMN

Penyediaan Migas dan Listrik (Energi)



PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20, Jakarta 11140, Indonesia
T. (62-21) 633 4838, 633 4848, 633 4861
F. (62-21) 633 3080,
www.pgn.co.id
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government
56,96% , Publik / Public 43,04%

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1984, PN.Gas diubah menjadi perusahaan umum ("Perum") dengan nama Perusahaan Umum Gas Negara. Perusahaan melakukan perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan usaha hilir bidang gas bumi yang meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga, perencanaan, pembangunan, pengembangan produksi, penyediaan, penyaluran dan distribusi gas buatan; dan jasa telekomunikasi; serta pengelolaan properti Perusahaan dan penyediaan jasa tenaga kerja. Pada saat ini, usaha utama Perusahaan adalah distribusi dan transmisi gas bumi ke pelanggan industri, komersial dan rumah tangga.



PT Perusahaan Listrik Negara

Jl. Trunojoyo Blok M-I No.135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
Tel. +62 21 7251234, 7250550, 7261122
Fax. +62 21 7221330
Website: www.pln.co.id.
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government
100%

PT PLN ditetapkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1970 yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972. PT PLN turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang pengadaan, distribusi, dan pengembangan tenaga listrik pada umumnya.



PT Pertamina (Persero)

Jl. Medan Merdeka Timur No. 1A
Jakarta 10110 - Indonesia
Telp. (62-21) 381 5000
Website : www.pertamina.com
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government 100%

PT Pertamina (Persero) didirikan pada tanggal 17 September 2003. Perusahaan melaksanakan usaha diantaranya eksplorasi minyak dan gas bumi, menyelenggarakan kegiatan di bidang energi listrik, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan energi listrik yang dihasilkan Perseroan, pengolahan yang menghasilkan bahan bakar, penyediaan bahan baku, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel), kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan peneluran minyak bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau hasil/produk lainnya.

Pertambangan dan Penggalian



PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)

Kuala Tanjung. Kec. Sei Suka 21657 Kab. Batu Bara,
Sumatera Utara, Indonesia

P.O. BOX 1 Kuala Tanjung.

Telp: (+62622) 31311; Fax: (+62622) 31001

Website: www.inalum.id

Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government
100%

PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum) didirikan pada tanggal 6 Januari 1976. Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah melakukan usaha dalam produksi alumina, pabrik kalsinasi kokas dan turunannya, pemasaran, penjualan dan distribusi hasil produksi dan produk sejenis lainnya, serta membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik untuk penggunaan sendiri dan penjualan listrik.

Profil BUMN

Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Jl. Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta 10220, Indonesia
Telp: (021) 2511946 ,
Fax: (021) 2511214
Website: www.bni.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 60% | Masyarakat/Publik 40%

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia” (BNI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Perseroan menyelenggarakan kegiatan usaha utama antara lain Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan piutang, serta membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah untuk instrument surat berharga.



PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Plaza Mandiri, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, Indonesia
Telp: 14000, (021) 52997777,
Fax: (021) 5274477
Website: www.bankmandiri.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 60% | Masyarakat/Publik 40%

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“Bank Mandiri”, atau “Perseroan”) pertama kali didirikan pada 2 Oktober 1998. Perseroan menyelenggarakan kegiatan usaha utama antara lain Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan piutang, serta membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah untuk instrument surat berharga.



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Gedung BRI I Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210 Indonesia
Telp: (021) 2510244,
Fax: (021) 2500077
Website: www.bri.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 56,75% | Masyarakat/Publik 43,25%

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”, “Bank”, atau “Perseroan”) dimulai pada tahun 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wiriatmaja yang awalnya mengelola dana kas masjid untuk disalurkan kepada masyarakat dengan skema yang sederhana. Perseroan menyelenggarakan kegiatan usaha utama antara lain Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan piutang, serta membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah untuk instrument surat berharga.



PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130 Indonesia
Telp: (021) 6336789, 6332666
Fax: (021) 6346704
Website: www.btn.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 60% | Masyarakat/Publik 40%

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“Bank”) didirikan sebagai bank milik negara, semula dengan nama “Bank Tabungan Pos” berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950. Sejalan dengan visi BTN untuk menjadi Bank Terkemuka dalam Pembiayaan Perumahan, maka BTN melakukan pembagian usaha perusahaan menjadi KPR & Perbankan Konsumer, Perumahan dan Perbankan Komersial, serta Perbankan Syariah untuk memberikan pilihan lebih luas dalam melayani nasabah selain bidang pembiayaan perumahan yang sudah menjadi komitmen BTN sejak awal.

Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi



Perum Jaminan Kredit Indonesia

Gedung Jamkrindo, Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6
Kemayoran Jakarta Pusat 10610
Telp: (62-21) 6540335
Faks: (62-21) 6540344/48
Website: www.jamkrindo.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi an berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia. Perusahaan bergerak di bidang usaha penjaminan kredit, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang diberikan Bank atau Badan Usaha kepada Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi; penjaminan pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan pembiayaan pola bagi hasil; penjaminan pembelian barang secara angsuran; penjaminan Syariah atas pembiayaan baik bersifat tunai maupun non tunai, penjaminan atas transaksi kontrak jasa; dan penjaminan kredit perorangan, jasa konsultasi dan jasa manajemen kepada usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi.



PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Jl. Let Jend MT. Haryono Kav. 61 Jakarta 12780
Telp (62-21) 7994508,
Fax (62-21) 7995364
Website : www.jasindo.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1973. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama: asuransi kerugian yang meliputi usaha pengangkutan, harta benda, aviation, rekayasa, rangka kapal, kendaraan bermotor, aneka, asuransi keuangan dan oil & gas serta melakukan kegiatan investasi dengan memerhatikan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.



PT ASABRI (Persero)

Jl. Mayjen Sutoyo No. 11 Jakarta Timur 13630
Telp: (62-21) 8094140,
Faks: (62-21) 8012313
Website: www.asabri.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

PT ASABRI (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1971 tanggal 31 Juli 1971. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama: Jaminan Sosial untuk Prajurit TNI, Anggota Polri dan PNS Kemhan / Polri yang meliputi antara lain pelaksanaan Asuransi/Jaminan Kematian, Asuransi/Jaminan Kecelakaan Kerja, Asuransi/Jaminan Hari Tuadan Asuransi/Jaminan Pensiun kepada Peserta ASABRI yang terdiri atas Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS Kemhan/Polri serta melakukan kegiatan investasi dengan memerhatikan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.



PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

Jl. Ir. H. Juanda No. 34 Jakarta 10120
Telp (62-21) 384 5031,
Fax (62-21) 386 2344
Website : www.jiwasraya.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

PT Asuransi Jiwasraya (Persero), selanjutnya disebut Asuransi Jiwasraya, didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda (pada waktu itu) pada 31 Desember 1859. Perusahaan melakukan kegiatan usaha di bidang pertanggungan langsung dalam bidang asuransi jiwa, asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan, asuransi anuitas, pool asuransi dan co-asuransi. Perusahaan dapat pula mendirikan/ menjalankan usaha lain yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha tersebut di atas, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan badan lain.

Profil BUMN

Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi



PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)

Jl. Angkasa Blok B-9, Kavling No. 8 Kota Baru Bandar
Kemayoran, Jakarta 10610 – Indonesia
Telp (62-21) 654 6471-72,
Fax (62-21) 654 6483-84
Website : www.askrindo.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) didirikan pada tanggal 6 April 1971. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama di bidang asuransi kerugian seperti menerima pertanggungan atas risiko tidak diterimanya pelunasan kredit dan/atau pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dari Debitur terutama Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM) yang diberikan oleh Bank atau lembaga pembiayaan lainnya serta melakukan kegiatan investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.



PT Asuransi Jasa Raharja (Persero)

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-2 Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Telp (62-21) 5203454,
Fax (62-21) 5220284
Website : www.jasaraharja.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

PT Jasa Raharja (Persero) didirikan pada tahun 1960 berdasarkan No 19 PRP Tahun 1960. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama di bidang asuransi social yakni melaksanakan asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum, mengadakan dan menutup perjanjian asuransi kendaraan bermotor dan asuransi tanggung jawab serta melakukan kegiatan investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.



PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

Jl. Salemba Raya No. 30 Jakarta Pusat 10430
Telp: (62-21) 3920101,
Faks: (62-21) 3143828
Website: www.Indonesiare.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) (selanjutnya disebut “Indonesia Re”) didirikan dengan nama “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Ekspor Indonesia”, berdasarkan Akta No. 173 tanggal 30 Nopember 1985. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah menerima pertanggungan ulang dari perusahaan-perusahaan asuransi/reasuransi di dalam maupun di luar negeri atas segala jenis asuransi umum, asuransi jiwa dan asuransi dengan prinsip syariah; dan melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh perusahaan reasuransi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.



PT TASPEN (PERSERO)

Jl. Letjen Suprpto, Cempaka Putih No. 45 Jakarta 10520
Telp (62-21) 424 1808,
Fax (62-21) 420 3809
Website : www.taspen.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Perusahaan Persero, secara singkat disebut PT TASPEN (Persero) didirikan pada tanggal 17 April 1963. Perseroan melaksanakan kegiatan usaha di bidang pengelolaan Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perusahaan memiliki 6 kantor cabang utama, 49 kantor cabang dan 14.394 titik layanan.

Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi



PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

Graha CIMB Niaga Lt.18, Kav 58 Jalan Jendral Sudirman,
Jakarta 12190 Indonesia
Telp: (62-21) 2505080,
Faks: (62-21) 2505070
Website: www.bahana.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia ("BPUI") didirikan pada tahun 1973. Bahana melakukan kegiatan usaha sebagai Modal ventura, sekuritas, perdagangan, manajemen investasi, penasihat investasi, konsultan keuangan dan konsultan manajemen, serta usaha jasa-jasa keuangan lainnya, dalam arti kata yang seluas-luasnya, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku; Properti dimana bidang usaha ini timbul karena adanya restrukturisasi yang mengakibatkan Perusahaan menjadi pemegang saham mayoritas; dan Mendirikan atau turut serta dalam badan-badan lain, dengan persetujuan pihak yang berwenang, jika disyaratkan.



PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)

Graha Mandiri Lt 3 Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta 10310, Indonesia
Telp: (62-21) 398 33066
Faks: (62-21) 398 33065, 398 33715
Website: www.ptkbi.com
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

Kliring Berjangka Indonesia (KBI) berdiri tanggal 25 Agustus 1984. Perseroan bergerak pada bidang keuangan yaitu kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau derivatif lainnya yang di registasi oleh setiap anggota Kliring yang terjadi di Bursa Berjangka atau di luar bursa berjangka atau di luar Bursa Berjangka; melakukan fungsi penatausahaan Resi gudang dan Derivatif Resi Gudang; Kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi yang terjadi di pasar fisik komoditas; dan Produk emas retail.



PT Danareksa (Persero)

Jl. Medan Merdeka Selatan no.14, Jakarta Pusat 10110, Indonesia
Telp (62-21) 29555777,
Fax (62-21) 3500989
Website: www.danareksa.com
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

PT Danareksa (Persero) didirikan di Indonesia berdasarkan Akta No. 74 tanggal 28 Desember 1976. Perusahaan melakukan bisnis di bidang pasar modal dan pasar uang, yang meliputi kegiatan sebagai perusahaan pembiayaan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pasar modal, seperti perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, pengelolaan investasi, Reksa Dana dan sebagainya. Perusahaan juga memiliki kegiatan lain yang biasa dilakukan oleh Perseroan Amanat, seperti pengeluaran surat-surat berharga yang dikaitkan dengan portofolio dari beberapa perusahaan.



PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Gedung Arthalo Loka Lt. 1,2,6,7,8,10,15 Jl. Jend. Sudirman Kav.2 Jakarta 10220, Indonesia
Telp: (62-21) 251 1404,
Faks: (62-21) 251 1405
Website: www.pnm.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

PT Asuransi Jiwasraya (Persero), selanjutnya disebut Asuransi Jiwasraya, didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda (pada waktu itu) pada 31 Desember 1859. Perusahaan melakukan kegiatan usaha di bidang pertanggungan langsung dalam bidang asuransi jiwa, asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan, asuransi anuitas, pool asuransi dan co-asuransi. Perusahaan dapat pula mendirikan/ menjalankan usaha lain yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha tersebut di atas, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan badan lain.

Profil BUMN

Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi



PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero)

Jl. Cikini IV No. 11 Jakarta 10330
Telp: (62-21) 31922003
Faks: (62-21) 31922980
Website: www.pannmf.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government
93,04% Bank Mandiri (Persero) Tbk. 6,96%

PT (Persero) PANN Multi Finance atau disingkat dengan nama PT PANN (Persero) didirikan pertama kali dengan nama PT (Persero) Pengembangan Armada Niaga Nasional dengan Akte Pendirian Nomor 48 tanggal 16 Mei 1974. Pengembangan armada niaga nasional yang meliputi Penyediaan dan pengoperasian armada niaga; Pembiayaan konsumen; Jasa pengadaan kapal, termasuk perantara pengadaan kapal; dan Perdagangan di bidang armada niaga. Jasa lainnya terkait dengan pengembangan armada niaga nasional antara lain Jasa-jasa teknis dalam sector maritim; Jasa penilaian; Studi penelitian; Pendidikan; Pengembangan; Design engineering; Jasa teknologi informasi termasuk multimedia; Design dan pemograman piranti lunak; Distributor yang berhubungan dengan piranti lunak; dan Konsultasi



PT Pegadaian (Persero)

Gedung Pegadaian Jl. Kramat Raya No. 162 Jakarta Pusat 10430, Indonesia
Telp: (62-21) 3155550
Faks: (62-21) 3914221
Website: www.pegadaian.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government
100%

Pegadaian didirikan pada tanggal 1 April 1901. Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek; jaminan fidusia; dan Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi, dan perdagangan logam mulia serta batu adi. Selain melaksanakan kegiatan usaha utama, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman; dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan.



PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Sampoerna Strategic Square, North Tower 9th-12th floor, Jl. Jendral Sudirman Kav 45-46, Jakarta Selatan 12930
Tel. (62-21) 57982222,
Fax. (62-21) 57982233
Website: www.ptppa.com
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan akta notaris No. 7 tanggal 27 Februari 2004. Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah dibidang ekonomi dan program pembangunan nasional pada umumnya. Untuk itu, Perusahaan melakukan kegiatan usaha yang meliputi: Pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN") dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas, Restrukturisasi dan/atau revitalisasi Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), Kegiatan investasi, dan Kegiatan pengelolaan aset BUMN.

Sektor Pengolahan Air, Limbah dan Sampah



Perum Jasa Tirta I

Jl. Lurah Kawi, Jatiluhur - Purwakarta - Jawa Barat
Telp. (62-264) 201 972,
Fax. (62-264) 201 972
Website : www.jasatirta2.co.id
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government
100%

Perum Jasa Tirta II disingkat PJT II didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1967 dengan nama Perusahaan Negara (PN) Djatiluhur. Ruang lingkup kegiatan perusahaan dalam pengusahaan sumber daya air wilayah sungai adalah Pelayanan, Penjernihan air, dan penjaminan ketersediaan air untuk memenuhi kepentingan pengusahaan sumber daya air dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada



Perum Jasa Tirta II

Jl. Lurah Kawi, Jatiluhur - Purwakarta - Jawa Barat
Telp. (62-264) 201 972,
Fax. (62-264) 201 972
Website : www.jasatirta2.co.id
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government
100%

Perum Jasa Tirta II disingkat PJT II didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1967 dengan nama Perusahaan Negara (PN) Djatiluhur. Ruang lingkup kegiatan perusahaan dalam pengusahaan sumber daya air wilayah sungai adalah Pelayanan, Penjernihan air, dan penjaminan ketersediaan air untuk memenuhi kepentingan pengusahaan sumber daya air dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada

Profil BUMN

Sektor Penyediaan Akomodasi



PT Hotel Indonesia Natour (Persero)

Menara BCA Lt. 39, Grand Indonesia, Jl. MH Thamrin
No. 1 Jakarta 10310 Indonesia
Telp (62-21) 235-86009,
Fax (62-21) 235-86008
Website : www.innagroups.com
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government
100%

Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama: Membangun, mengoperasikan, mengembangkan dan memasarkan hotel yang dimiliki sendiri, baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia. Melakukan usaha pengelolaan, pemasaran hotel dan fasilitas pendukungnya yang dimiliki oleh pihak lain. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah serta menggunakan tanah untuk keperluan industri jasa perhotelan dan menata serta membagi lebih lanjut dalam satuan-satuan lingkungan tertentu dan mengembangkan jasa-jasa prasarana dan fasilitas-fasilitas hotel lainnya.

Sektor Real Estate



PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero)

Jl. Raya Yogya Solo Km 16 Prambanan Yogyakarta 55571
Telp (62-274) 496402,
Fax (62-274) 496404
Website: www.borobudurpark.com
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government
100%

PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 tahun 1980. TWC menyelenggarakan kegiatan usaha utama: Mengelola lingkungan Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko serta peninggalan sejarah purbakala lainnya sebagai taman wisata, termasuk kegiatan – kegiatan perencanaan teknis, pemeliharaan dan pengawasan lingkungannya, satu dan lain sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku; Merencanakan dan mengembangkan dan memanfaatkan prasarana, sarana dan fasilitas umum lainnya di lingkungan Taman Wisata Candi untuk kegiatan pariwisata; dan Melakukan kegiatan usaha lainnya di bidang pariwisata.



PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)

Kawasan Pariwisata Nusa Dua – Bali Kabupaten Badung
80363
Telp (0361) 771010
Fax. (0361) 771014
Website : www.itdc.co.id
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government
100%

Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1972. Perseroan menyelenggarakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah untuk keperluan daerah pariwisata (Nusa Dua dan Kawasan Pariwisata Mandalika Lombok), menyewakan bagian-bagian tanah untuk membangun satuan hotel-hotel dan fasilitas pariwisata lainnya, serta merencanakan, membangun dan mengembangkan jasa-jasa prasarana dan fasilitas-fasilitas umum lainnya.

Profil BUMN

Sektor Industri Pengolahan



PT Pupuk Indonesia (Persero)

Jl. Taman Anggrek – Kemanggisan Jaya Jakarta Barat 11480 – Indonesia
Tel. (62-21) 53654900,
Fax. (62-21) 5481755
Website: www.pupuk-Indonesia.com
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government 100%

PT Pupuk Indonesia (Persero) disingkat PIHC adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dahulu dikenal dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) atau PUSRI (Persero), dan didirikan pada tanggal 24 Desember 1959. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan dan anak-anak Perusahaannya meliputi usaha di bidang usaha pengelolaan/ manajemen Perusahaan, perdagangan dan jasa di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia dan kimia Lainnya serta agro industri untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.



PT Kimia Farma (Persero) Tbk

Jl. Veteran No. 9, Jakarta 10110, Indonesia
Telp: (021) 3847709
Faks: (021) 3814441
Website: www.kimiarfarma.co.id
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government 90,03% | Publik / Public 9,97%

PT Kimia Farma (Persero) Tbk selanjutnya disebut “Entitas” didirikan berdasarkan akta No 18 tanggal 16 Agustus 1971. Maksud dan tujuan Entitas ini menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat khususnya bidang industri kimia, farmasi, biologi, kesehatan, industri makanan serta minuman, dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Entitas dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.



PT Bio Farma (Persero)

Jl. Pasteur 28, Bandung 40161 – Indonesia
Telp. (62-22) 2033755,
Fax. (62-22) 2041376
Website: www.biofarma.co.id
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government 100%

PT Bio Farma (Persero) “Perusahaan”, pada awalnya bernama “Parc Vaccinogene” yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda No.14 tanggal 6 Agustus 1890. Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama seperti penelitian dan pengembangan produk biologi dan farmasi, baik yang dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain, produksi produk biologi dan produk farmasi, baik yang dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain, pemasaran, perdagangan dan distribusi produk biologi, farmasi, alat kesehatan, termasuk barang umum, baik di dalam maupun di luar negeri, pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Klinik.



PT Garam (Persero)

Jalan Raya Kalianget 9, Kalianget, Sumenep, Madura 69471
Tel. (62-328) 662461,
Fax. (62-328) 662361
Website: www.ptgaram.com
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

PT Garam (Persero), selanjutnya disebut Perusahaan, didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 12 tahun 1991 tanggal 11 Pebruari 1991. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi usaha di bidang Industri Garam dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang Produksi, Pemberian Jasa dan Perdagangan.

Sektor Industri Pengolahan



PT Indofarma (Persero) Tbk

Jl Indofarma No.1, Cikarang Barat Bekasi, Jawa Barat 17530
Tel. (62-31) 8832 3971,
Fax. (62-31) 8832 3972
Website: www.Indofarma.co.id
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government 80,66% Publik / Public 12,88% | Lainnya 6,45%

PT Indonesia Farma Tbk, disingkat dengan PT Indofarma (Persero) Tbk dan selanjutnya disebut "Perseroan" didirikan berdasarkan akta No.1 tanggal 2 Januari 1996. Tujuan pendirian Perseroan adalah melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang farmasi, diagnostik, alat kesehatan, serta industri produk makanan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan



Perum Percetakan Negara Republik Indonesia

Jalan Percetakan Negara no. 21, Jakarta 10560
Tel. (62-21) 4221701-05, F
ax. (62-21) 4207251
Website: www.pnri.co.id
Kepemilikan / Ownership : Pemerintah / Government 100%

Perusahaan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1962. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama: melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang percetakan dan penyebaran dokumen negara, mencetak kartu ATM, kartu kredit, kartu debit, smart card dengan solusi teknologi informasi, dan smart card lainnya, mencetak dokumen sekuriti, dokumen pemilihan umum, serta pencetakan lainnya, Penerbitan dan jasa grafika lainnya, dan Multimedia dan solusi dokumen (document solution information).



Perum Percetakan Uang Republik Indonesia

Jl. Palatehan No. 4 Kebayoran Baru Blok K-V Jakarta 12160 – Indonesia
Tel. (62-21) 7395000,
Fax. (62-21) 7221567
Website: www.peruri.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) didirikan pada tanggal 15 September 1971. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama: bidang percetakan uang. Perusahaan mencetak uang kertas dan uang logam, mencetak sekuriti untuk negara yaitu dokumen keimigrasian, pita cukai, meterai dan dokumen pertanahan, dan mencetak dokumen sekuriti lainnya.



PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Jl. Veteran, Gresik 61122, Jawa Timur
Telp: (62-31) 3981732
Faks: (62-31) 3983209
Website: www.semenIndonesia.com
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 51% | Masyarakat/Publik 49%

PT Semen Indonesia (Persero) (SMGR) Tbk didirikan dengan nama NV Pabirk Semen Gresik pada tanggal 1953. Kegiatan SMGR dan entitas anak terdiri atas 2 segmen usaha, yakni Produksi Semen dan Produksi Non Semen. Produksi semen adalah segmen usaha utama dengan kontribusi pendapatan di atas 97% dari total pendapatan konsolidasi SMGR.

Profil BUMN

Sektor Industri Pengolahan



PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Jl. Abikusno Cokrosuyoso Kertapati, Palembang
Telp: (62-711) 511261
Faks: (62-711) 512126
Website: www.semenbaturaja.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government
76% | Masyarakat/Publik 24%

Ruang lingkup kegiatan SMBR meliputi usaha di bidang industri semen termasuk produksi, distribusi, dan jasa-jasa lain yang terkait dengan industri semen. SMBR bergerak terutama di industri semen. Produksi yang dihasilkan oleh PT Semen Baturaja adalah Semen Portland Type I dan Semen Portland Komposit (SPK) dengan lokasi pabrik di Baturaja, Palembang dan Panjang. Pusat produksi terletak di Baturaja yaitu produksi Terak. Sedangkan proses penggilingan dan pengantongan semen selain dilaksanakan di Pabrik Baturaja sendiri juga dilaksanakan di Pabrik Palembang dan Panjang yang selanjutnya siap untuk didistribusikan ke daerah-daerah pemasaran. Daerah pemasaran utama SMBR adalah Sumatera Bagian Selatan, yaitu Sumatera Selatan dan Lampung. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk memproduksi dua tipe semen 1. Ordinary Portland Cement (OPC) Tipe I 2. Portland Composite Cement (PCC).



PT Balai Pustaka (Persero)

Jl. Pulo Kambing Kav. J No. 15, Kawasan Industri
Pulogadung, Jakarta Timur
Telp. (62-21) 468 31015, 468 31016
Fax. (62-21) 4613520
Website: www.balaipustaka.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

PT Balai Pustaka (Persero) (Perusahaan) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1996 tanggal 4 November 1996 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama: di bidang penerbitan dan percetakan dengan tujuan turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang perbukuan dan multimedia pendidikan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.



PT Semen Kupang (Persero)

Jl. Yos Sudarso, Osmo, Tenau, Kupang Nusa Tenggara Timur 85224 - Indonesia
Tel. (62-380) 890090
Website: www.BUMN.go.id/semenkupang
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government
61,48% | Bank Mandiri 37,39% | Pemda NTT 1,13%

Pada tanggal 1 September 2009 dilakukan Kerjasama Operasi antara PT Semen Kupang (Persero) dengan PT Sarana Agra Gemilang untuk jangka waktu 10 tahun ditambah grace period sehingga KSO akan berakhir pada Juni 2021,



PT PAL Indonesia (Persero)

Jl. Ujung Surabaya, PO BOX 1134 Surabaya 60165
Telp. (62-31) 329 2275,
Fax (62-31) 329 2530
Website : www.pal.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

PT. PAL berlokasi di Surabaya, didirikan pada tahun 1980, dan dapat dilihat sejarahnya sejak tahun 1939. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama: pembuatan kapal dagang, kapal laut, teknik umum, dan perbaikan dan pemeliharaan. PT. PAL mendesain dan mengkonstruksi kapal dagang dari berbagai jenis dan ukuran hingga 50.000 DWT (Dead Weight Tonnes).

Sektor Industri Pengolahan



PT Industri Kapal Indonesia (Persero)

Galangan Kapal No. 31 PO Box 1196, Makassar 90211 Indonesia
Telp. (62-411) 448 653,
Fax (62-411) 448 658
Website : www.ikishipyard.com
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

PT Industri Kapal Indonesia, didirikan tahun 1977. PT Industri Kapal Indonesia memiliki tiga lini usaha: pembuatan kapal, perbaikan kapal, dan perdagangan. PT Industri Kapal Indonesia membangun kapal-kapal berbasis kayu dan baja berbagai jenis dan ukuran hingga 6.000 DWT. Ini termasuk kapal penangkap ikan komersial, pengangkut kontainer, feri roro, kapal patroli cepat, tanker, dan kapal pendorong (pusher tug boat). PT Industri Kapal Indonesia (Persero) (IKI) merupakan Perusahaan pembuatan dan perbaikan kapal terbesar di Indonesia timur. Pada tahun-tahun belakangan ini permintaan untuk perbaikan kapal telah tumbuh lebih cepat daripada permintaan terhadap kapal baru.



Dok dan Perkapalan Surabaya

Jl. Tanjung Perak Barat No. 433 – 435, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 60167
Tel. (62-31) 3291286,
Fax. (62-31) 3291659
Website: www.dok-sby.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) (Perusahaan) didirikan tanggal 22 September 1910. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan dan anak-anak Perusahaannya meliputi usaha di bidang perancangan desain, pembangunan, perbaikan, pemeliharaan kapal-kapal, alat-alat apung, dan konstruksi bangunan lepas pantai, pekerjaan bawah air, fabrikasi struktur baja, pemeriksaan, pembersihan, perakitan dan pemasangan permesinan dan pekerjaan mekanikal lainnya, pekerjaan-pekerjaan rekayasa pada umumnya, melakukan kegiatan perdagangan dan penyaluran kapal-kapal baik di dalam maupun luar negeri, pemasok dan agen suku cadang kapal dan material, barang-barang dan peralatan terkait yang diperlukan, dan melakukan jasa terkait.



PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)

Jl. Sindang Laut No. 101, Cilincing, Jakarta Utara, 14110
Telp. (62-21) 4302228, 021-4302232,
Fax. (62-21) 4303039
Website: www.dkb.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 99% | Yayasan Sosial BhumiYamca 1%

PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (Perusahaan) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1990 tanggal 13 Desember 1990. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama: membuat kapal hingga 50.000 DWT (termasuk kapal-kapal pesiar, kapal tanker, kapal kontainer, pengangkut, tug boat, kapal-kapal angkatan laut, dan feri) dan melayani perbaikan kapal untuk berbagai jenis kapal hingga 30.000 DWT serta perbaikan dermaga. Perusahaan juga menyediakan fasilitas produksi/fabrikasi minyak dan gas lepas pantai, serta peralatan dan perawatan alat-alat manufaktur (seperti penukar panas, bejana tekan, struktur baja). Infrastruktur dan Pendukung Kelautan, dan Layanan Kelautan. Infrastruktur dan Pendukung Kelautan merupakan jasa kegiatan operasional kapal termasuk ekspedisi kargo internasional, penyimpanan container, proses kimiawi (seperti pengobatan kimia, pembersih kimia, pengolahan kayu).



PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

Jl. Industro No. 5, PO BOX 14, Cilegon, Banten 42435, Indonesia Telp: (0254) 392159
Faks: (0254) 372246
Website: www.krakatausteel.com
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 80% | Masyarakat/Publik 20%

Dicanangkan pertama kali sebagai Proyek Besi baja Trikora oleh Pre siden Soekarno, PT Krakatau Steel yang berdiri pada tahun 1970 telah berkembang menjadi produsen baja terbesar di Indonesia. Perseroan memiliki fasilitas produksi seperti Pabrik Besi Spons, Pabrik Billet Baja, Pabrik Baja Batang Kawat, serta fasilitas infrastruktur berupa pusat pembangkit listrik, pusat penjernihan air, pelabuhan dan sistem telekomunikasi. Selain memasarkan produk-produknya untuk konsumen domestik. Perseroan juga memasarkannya ke luar negeri/ekspor. Keahlian Perseroan untuk memproduksi baja dengan spesifikasi khusus, termasuk untuk keperluan pertahanan nasional, semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu industri strategis Indonesia.

Profil BUMN

Sektor Industri Pengolahan



PT Boma Bisma Indra (Persero)

Jln. KH M Mansyur 229 Surabaya, Indonesia 60162
Telepon: (62-031) 3530513, (62-031) 3531686
Fax: (62-031) 3531686
Website : www.ptbbi.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

PT. Boma Bisma Indra (Persero) (Perusahaan) didirikan pada tahun 1971. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama: bidang industri konversi energi, industri permesinan, sarana dan prasarana industri dan agro industri, jasa dan perdagangan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. PT Boma Bisma Indra (Persero) memiliki kemampuan untuk menghasilkan berbagai jenis produk peralatan industri dan permesinan yang mengkonsentrasikan usahanya pada industri konversi energi baik untuk industri minyak, gas bumi maupun kelistrikan. Perusahaan juga memberikan layanan manajemen proyek dan fabrikasi baja terutama untuk sektor energi dan pertanian.



PT Barata Indonesia (Persero)

Jl. Veteran No 241 Gresik 61123
Telp. (62-31) 3990555,
Fax. (62-31) 3990666
Website : www.barata.com
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

PT. Barata Indonesia (Persero) didirikan pada tahun 1971. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama: Foundry (melaksanakan order/pekerjaan yang kegiatannya berhubungan dengan pengecoran dengan hasil produk antara lain: bogie, coupler, roll gilingan, mill stand, grate plate, crusher dan roder horn), Industry Equipment & Components/ IEC (melaksanakan order/pekerjaan yang berhubungan antara lain dengan produk pintu air, rig (on shore), boiler, vessels, kiln dan cane preparation), Special Project, dan Engineering Procurement and Construction (melaksanakan order/pekerjaan proyek antara lain berupa storage tank and utilities, pipeline / plant piping, agro industries plant, power plant).



PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)

Kawasan Puspatek Gedung 70 Serpong, Tangerang Selatan, Banten 15314
Telp. (62-21) 7560118,
Fax. (62-21) 7560211 Website : www.inuki.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) yang sebelumnya bernama PT. Batan Teknologi (Persero) didirikan pada tanggal 24 Mei 1996. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama: memproduksi Radioisotop, Radiofarmaka, Elemen Bakar Nuklir Kendali, Instrumentasi Nuklir, menyediakan energi nuklir untuk kelistrikan, melakukan penambangan serta pemrosesan bahan tambang untuk industri nuklir, menyediakan jasa rekayasa, pembangunan fisik dan jasa di bidang lainnya terkait dengan industri nuklir, dan menyediakan jasa konsultansi dan manajemen di bidang industri nuklir. Selain melakukan kegiatan utama.



PT Dahana (Persero)

Energetic Material Center
Jl. Raya Subang – Cikamurang Km. 12 Cibogo Subang 41285
Telp. (62-260) 7423333,
Fax. (62-260) 7423888
Website : www.dahana.com
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

PT Dahana (Persero) atau “DAHANA” adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang bahan berenergi tinggi di Indonesia. DAHANA didirikan pada tahun 1966. Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah produsen bahan peledak dan penyedia jasa peledakan menyeluruh seperti explosive manufacturing antara lain produksi dan perdagangan bahan peledak komersil maupun militer beserta komponen perlengkapannya, Drilling and Blasting Services antara lain jasa pengeboran, Down the Hole Loading serta Peledakan, transportasi bahan peledak, pergudangan, ekspor impor, konsultasi Blasting Cost Effectiveness, jasa pengukuran, Ground Vibration, penelitian dan pengembangan bidang handak, pemusnahan bahan peledak.

Sektor Industri Pengolahan



PT LEN Industri (Persero)

Jl. Soekarno Hatta No.442, Bandung, Indonesia 40254
Telp: (62-22) 5202682
Faks: (62-22) 5202695
Website: www.len.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

PT LEN Industri (Persero) (Perusahaan) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia No. 16 tahun 1991. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama: bidang perdagangan (export dan import, Perdagangan besar lokal, perdagangan alat transmisi telekomunikasi, dll), Industri manufaktur dan Fabrikasi (industri pengembangan dan pengintegrasian sistem, industri peralatan navigasi telematika, industri pembuatan kartu elektronik, dll), bidang pembangunan (konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga, dll), dan bidang jasa (jasa teknologi informasi, manajemen dan administrasi engineering, mesin, listrik, energi, telekomunikasi umum, dll).



PT Pindad (Persero)

Jl. Veteran, Gresik 61122, Jawa Timur
Telp: (62-31) 3981732
Faks: (62-31) 3983209
Website: www.semenIndonesia.com
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

PT Pindad (Persero) didirikan berdasarkan akta Nomor: 30 tanggal 29 April 1983. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama di antaranya memproduksi senjata, munisi dan peralatan sistem pertahanan untuk kebutuhan Pertahanan dan Keamanan RI dan memproduksi alat-alat, perkakas dan komponen-komponen lain untuk sektor-sektor perhubungan, pertanian/ perkebunan, pertambangan dan industri.



PT Industri Kereta Api (Persero)

Jl. Yos Sudarso No. 71 Madiun, Jawa Timur 63122 – Indonesia
Telp: (62-351) 452271
Faks: (62-351) 452275
Website: www.inka.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

PT Industri Kereta Api (Persero), selanjutnya disebut Perseroan didirikan tanggal 18 Mei 1981. Perseroan merupakan satu-satunya pemain industri kereta api nasional. Hampir sebagian besar pendapatan yang diperoleh perseroan berasal dari pesanan pemerintah, baik melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero) maupun melalui Kementerian Perhubungan. Perseroan juga pernah membuat pesanan produk dari luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Jerman, Uni Emirat Arab dan Bangladesh. Produk-produk yang dikembangkan oleh Perseroan secara garis besar terdiri dari produk gerbong, kereta dan proyek pengembangan dan perbaikan perkeretaapian.



PT Industri Gelas (Persero)

Jl. Kapten Darmosugondho, Segoromadu Gresik Indonesia 61153
Telp: (62-31) 3974484, 3973720, 3973720, 3985682, 3971648,
Fax (62-31) 3974483
Website : www.iglas.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 63,82% | PT BNI (Persero) Tbk. 36,18%

PT Industri Gelas (Persero) didirikan pada tahun 1956 adalah pembuat kemasan gelas terbesar di Indonesia, yang memasok hingga 35 persen hasil botol dan staples di seluruh negara. Perseroan menyelenggarakan kegiatan usaha utama meliputi bidang produksi dan perdagangan barang-barang dan peralatan yang terbuat dari gelas serta hasil olahan lainnya yang berhubungan dengan produksi gelas. PT Industri Gelas ingin mengembangkan pangsa pasarnya dengan tujuan menjadi Perusahaan pembuat kemasan gelas terbesar di Asia Pasifik. Untuk mencapai hal ini, PT Iglas meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksinya dan melebarkan jaringan pelanggannya.

Profil BUMN

Sektor Industri Pengolahan



PT Industri Sandang Nusantara (Persero)

Jl. KH. Agus Salim No. 45, Bekasi
Tel. (62-21) 8801007,
Fax. (62-21) 8801777
Website: www.isn.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

PT Industri Sandang Nusantara (Persero) didirikan pada tanggal 22 Mei 2000. Perseroan merupakan pabrik permintalan dan pertenunan nasional yang memproduksi benang dan kain dengan 8 unit produksi yang tersebar diseluruh Indonesia. Perseroan memiliki 8 unit produksi yang terdiri dari 6 pabrik pemintalan (patal), 1 pabrik tekstil (pabriteks), dan 1 pabrik karung plastik. Seluruh hasil produksi benang, pertenunan dan karung plastik dipasarkan di pasar lokal yang meliputi Jawa, Bali dan Sulawesi Selatan.



PT Primiissima (Persero)

Jl. Raya Magelang Km 15, Medari, Sleman Yogyakarta 55515 - Indonesia
Telp. (62-274) 868408,
Fax. (62-274) 868417
Website: www.primiissima.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 52.79% | PT GKBI Investment 47.21%

PT Primiissima (Persero) didirikan sebagai Perusahaan patungan antara Pemerintah RI dan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) dalam rangka pelaksanaan UU No.9 tahun 1969. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama: produksi tekstil atau benang atau serat dan mengolahnya, jasa industri tekstil, memasarkan dan mendistribusikan hasil produksi serta melakukan perdagangan baik dalam maupun luar negeri.



PT Kertas Kraft Aceh (Persero)

Desa Jamuan, Kecamatan Bandabaro, Kabupaten Aceh Utara, Aceh 24352
Telp. (62-21) 85905721,
Fax: (62-21) 8560932
Website : www.kka.co.id
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 96,65% | PT Alas Helau 3,35%

PT Kertas Kraft Aceh (Persero) adalah industri bidang pulp dan kertas yang didirikan pada tahun 1983 dalam rangka swasembada pengadaan kertas kantong semen (sack kraft) di dalam negeri, dan disisi lain ikut serta dalam menunjang peningkatan ekspor non-migas. Pabrik mulai berproduksi tahun 1989 dengan produksi komersial awal tahun 1990 dengan kapasitas terpasang 135 ribu ton pertahun dibangun didaerah zona industri Lhokseumawe, Aceh Utara. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama: memproduksi berbagai jenis kertas dan pulp dengan cara mengolah bahan-bahan mentah menjadi bahan baku, yang dipergunakan untuk pembuatan pulp dan kertas, menyalurkan dan memperdagangkan berbagai hasil produksi serta barang-barang pelengkap lainnya.



PT Kertas Leces (Persero)

Jl. Raya Leces, Leces Probolinggo 67202 Jawa Timur
Tel. (62-335) 680993,
Fax. (62-335) 680954
Kepemilikan/Ownership : Pemerintah/Government 100%

Perusahaan PT Kertas Leces (Persero) (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta Nomor 24 tertanggal 23 Nopember 1983. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi usaha di bidang pengusahaan produksi kertas yang terintegrasi, berwawasan lingkungan dan kuat dalam persaingan global. Untuk itu, perusahaan menghasilkan produk yang bermutu dan mampu bersaing di pasar bebas, meningkatkan produktifitas dan efisiensi yang berkesinambungan, berorientasi pada keuntungan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham, memberikan kesejahteraan karyawan dan peduli terhadap masyarakat sekitar, peduli terhadap kelestarian lingkungan serta mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, mengelola perusahaan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

BUMN
Hadir untuk negeri



Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13
Gambir, Kota Jakarta Pusat 10110

T: 021 - 29935678
F: 021 - 29935740